KPPN SANGGAU

LAPORAN KINERJA TAHUN 2023

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG
B. TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI
C. PERAN STRATEGIS
D. SISTEMATIKA LAPORAN

A. LATAR BELAKANG

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A2 Sanggau (KPPN Sanggau) sebagai Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Barat, wajib menyusun laporan kinerja.

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Sanggau sebagai unsur pelaksana Direktorat Jenderal Perbendaharaan mempunyai tugas melaksanakan fungsi Kuasa Bendahara Umum Negara didaerah dalam melaksanakan kewenangan perbendaharaan dan bendahara umum Negara, penyaluran pembiayaan atas beban APBN, penatausahaan penerimaan Negara, serta pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran. Dalam melaksanakan tugas tersebut KPPN Sanggau mempunyai wilayah kerja yang meliputi Kabupaten Sanggau, Kabupaten Landak dan Kabupaten Sekadau.

Salah satu azas penyelenggaraan *good governance* yang tercantum dalam UU No. 28 Tahun 1999 adalah azas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN).

Laporan Kinerja KPPN Sanggau Tahun 2023 disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban KPPN Sanggau dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama tahun 2023 dalam rangka melaksanakan misi dan mencapai visi KPPN Sanggau dan sekaligus sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja setiap unit di KPPN Sanggau, serta sebagai salah satu alat untuk mendapatkan masukan dari *stakeholders* demi perbaikan kinerja Ditjen Perbendaharaan. Selain untuk memenuhi prinsip akuntabilitas, LAKIN juga merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

B. TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan maka tugas KPPN Sanggau adalah melaksanakan kewenangan perbendaharaan dan bendahara umum, penyaluran pembiayaan atas beban anggaran, serta penatausahaan penerimaan dan pengeluaran anggaran melalui dan dari kas negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam menjalankan tugas tersebut di atas, KPPN Sanggau menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Pengujian terhadap surat perintah pembayaran berdasarkan peraturan perundang-undangan;
2. Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari kas negara atas nama Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara;
3. Penyaluran pembiayaan atas beban APBN;
4. Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran negara melalui dan dari Kas Negara;
5. Penyusunan laporan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara;
6. Pelaksanaan verifikasi transaksi keuangan dan akuntansi serta pertanggungjawaban bendahara;
7. Pembinaan dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);
8. Pelaksanaan tugas kepatuhan internal;
9. Pelaksanaan manajemen mutu layanan;
10. Pelaksanaan manajemen hubungan pengguna layanan (*customer relationship management*);
11. Pelaksanaan tugas dan penyusunan laporan Pembina Pengelola Perbendaharaan (*treasury management representative*);.
12. Pelaksanaan dukungan penyelenggaraan sertifikasi bendahara;
13. Pengelolaan rencana penarikan dana;
14. Pengelolaan rekening pemerintah;
15. Pelaksanaan fasilitasi Kerjasama Ekonomi dan Keuangan Daerah;
16. Pelaksanaan layanan bantuan (*helpdesk*) penerimaan negara;
17. Pelaksanaan system akuntabilitas dan kinerja;
18. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kredit program;
19. Pelaksanaan Kehumasan dan Layanan Keterbukaan Informasi Publik (KIP);
20. Pelaksanaan administrasi KPPN

Saat ini KPPN Sanggau dihadapkan pada tantangan internal maupun eksternal pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan sebagai induk dari organisasi KPPN Sanggau. Tantangan internal tersebut di antaranya adalah kebijakan ***minus growth kemenkeu*, penyederhanaan birokrasi**, **disrupsi teknologi** dan ***Job shifting***. Sedangkan tantangan secara eksternal adalah bagaimana Ditjen Perbendaharaan mempunyai peranan lebih dalam lagi terkait pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di daerah. Untuk menjawab tantangan tersebut, Ditjen Perbendaharaan menerbitkan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-2/PB/2023 dan KEP-3/PB/2023 tentang pembentukan *shadow organization* pada Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan dan KPPN.

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Sanggau telah menerbitkan Surat Keputusan Kepala KPPN Sanggau Nomor KEP-29/KPN.1703/2023 tanggal 24 Maret 2023 tentang pembentukan Struktur *Shadow Organization* (SO) pada KPPN Sanggau. Pembentukan struktur *SO* ini dalam rangka menjawab tantangan ke depan sebagai pengelola APBN (*Treasury*) dan pengembangan tugas sebagai *Financial Advisor* serta *Regional Chief Economist* (RCE).

Struktur Organisasi KPPN Sanggau

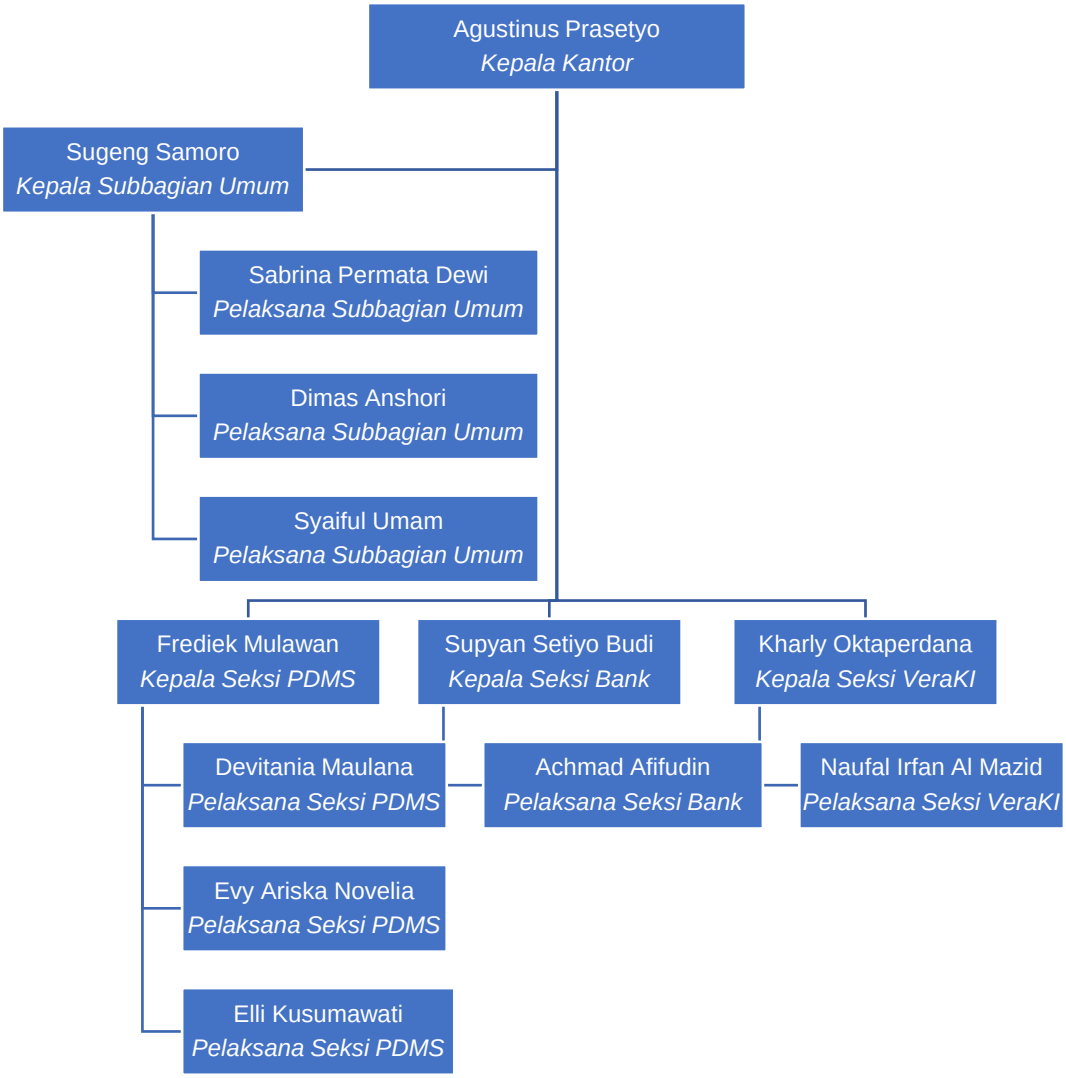

Struktur organisasi yang bagus tanpa didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) memadai tidak akan membawa ke arah pencapaian misi yang dicita-citakan. Pengelolaan SDM ditujukan kepada terwujudnya SDM yang berkomitmen pada integritas, moralitas, profesionalitas dan kesejahteraan. Jumlah SDM KPPN Sanggau per 31 Desember 2023 adalah sebanyak 13 orang dengan rincian sebagai berikut:

Sumber Daya Manusia KPPN Sanggau

TABEL 1.1
Profil SDM KPPN Sanggau per 31 Desember 2023

GENDER			USIA			PENDIDIKAN		
Pria	:	9	20 s.d. 29	:	6	Strata III / Doktoral	:	0
Wanita	:	4	30 s.d. 39	:	2	Strata II / Magister	:	2
			40 s.d. 49	:	3	Diploma IV (Keu.)	:	1
			50 s.d. 59	:	2	Strata I / Sarjana	:	2
						Diploma III	:	5
						Diploma I (Keu.)	:	2
						SMA	:	1
						SMP	:	0
						SD	:	0

C. PERAN STRATEGIS

Sebagai sebuah organisasi yang dapat dikategorikan sebagai sebuah *holding type organization* karena memiliki kantor vertikal cukup banyak, ditambah dengan jumlah pegawai ribuan orang, serta memberikan pelayanan langsung kepada *stakeholders*, Ditjen Perbendaharaan memiliki peran strategis dalam pengelolaan keuangan negara khususnya di bidang pelaksanaan anggaran, pengelolaan kas dan investasi, pembinaan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum, dan akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peran strategis KPPN Sanggau terkait dengan pelayanan publik antara lain:

1. Terciptanya pelaksanaan tugas dan fungsi KPPN sesuai ketentuan;
2. Tersalurnya dana APBN sesuai ketentuan;
3. Terciptanya tertib adminsitrasi pengelolaan dan pemanfaatan BMN;
4. Terwujudnya penatausahaan PNBP;
5. Terbukukannya seluruh penerimaan dan pengeluaran APBN;
6. Terciptanya pengendalian dan evaluasi pelaksanaan APBN;
7. Terwujudnya informasi dan pelaporan perbendaharaan sesuai dengan sistem akuntansi pemerintah;
8. Terciptanya pengelolaan administrasi keuangan secara efisien dan efektif;
9. Tersedianya SDM yang berkualitas;
10. Terpenuhinya sarana dan prasarana kantor yang memadai guna menunjang pelaksanaan tugas pokok.

Seluruh fungsi di internal KPPN Sanggau saling bersinergi dan terintegrasi penuh, baik antar seksi maupun subbag umum. Sebagai suatu organisasi terbuka, KPPN Sanggau berinteraksi dan menyelaraskan diri dengan lingkungan eksternal, seperti teknologi, ekonomi, undang-undang, dan faktor sosial kemasyarakatan, serta selalu berusaha menggunakan teknologi yang tepat guna dan menjadi organisasi pembelajar yang menuntut seluruh elemen di dalamnya untuk selalu mengembangkan diri sesuai kerangka budaya organisasi yaitu profesional, disiplin, akuntabel, pelayanan prima, dan inovatif. Segenap elemen senantiasa berpikir dengan langkah-langkah yang sistematis dan terencana, memiliki *role model* dalam hal berpikir mengenai kemajuan organisasi melalui keteladanan para pimpinan organisasi, pandangan dan harapan pimpinan terhadap organisasi ke depan.

Dengan dukungan pimpinan terkait manajerial organisasi dalam melaksanakan tugas sehari-hari, fungsi-fungsi *treasury* akan berkembang untuk mengikuti tuntutan *stakeholders*. Konsep keterpaduan telah diperluas dari sekedar untuk kepentingan salah satu fungsi secara sempit, menjadi lebih komprehensif dan menyentuh fungsi-fungsi lain di dalam organisasi. Hal tersebut dimaksudkan untuk memberikan kemudahan dalam penyelesaian tugas-tugas keseharian yang sebelumnya dilaksanakan secara manual dan mampu meningkatkan peran atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) terkait fungsi distribusi, stabilisasi, dan alokasi dalam menciptakan kondisi fiskal negara yang sehat dan berkesinambungan.

Adapun isu dan kegiatan strategis yang dilaksanakan KPPN Sanggau pada tahun 2023 antara lain:

1. Melakukan sosialisasi dan pemantauan IKPA khususnya pada indikator capaian output melalui Aplikasi OM SPAN, melakukan pembahasan dan reviu capaian IKPA secara triwulanan;
2. Melaksanakan sosialisasi aturan dan implementasi pelaksanaan kartu kredit pemerintah serta melaksanakan monitoring dan evaluasi atas kegiatan tersebut;
3. Melaksanakan sosialisasi aturan dan implementasi pelaksanaan digitalisasi pembayaran (Digipay) pada satuan kerja;
4. Melakukan *refreshment* PPK/PPSPM dan meningkatkan implementasi standardisasi kompetensi pejabat perbendaharaan;
5. Menyelenggarakan sosialisasi kepada satuan kerja penyusunan laporan keuangan dan laporan pertanggungjawaban bendahara;
6. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pembiayaan Ultra Mikro (UMi) kepada debitur secara *on the spot* dan melaporkannya secara semesteran.
7. Melaksanakan transfer ke daerah berupa Dana Desa, DAK Fisik dan DAK Non Fisik kepada Kabupaten Sanggau, Kabupaten Landak dan Kabupaten Sekadau.
8. Melaksanakan pengembangan fungsi sebagai *Financial Advisor*, *Regional Chief Economist (RCE)* dan Penguatan Pemberdayaan UMKM. Kegiatan dilakukan dalam bentuk *Focus Group Discussion (FGD), Sharing Session,* dan lain-lain;
9. Melakukan kegiatan monitoring dalam rangka pelaksanaan penugasan sebagai unit *piloting Quality Assurance* peran KPPN sebagai *Financial Advisor* pada Belanja Pemerintah Pusat.

Selain hal yang disebutkan di atas, KPPN Sanggau telah melaksanakan pelatihan aplikasi serta internalisasi mengenai aturan dan *current issues* bagi seluruh pegawai untuk meningkatkan kompetensi dan pengetahuan pegawai.

D. SISTEMATIKA LAPORAN

Sistematika penyajian LAKIN KPPN Sanggau Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Bab I Pendahuluan

   Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issues*) yang sedang dihadapi organisasi.
2. Bab II Perencanaan Kinerja

   Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.
3. Bab III Akuntabilitas Kinerja
   a. Capaian Kinerja Organisasi

      Subbab ini menjelaskan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.
   b. Realisasi Anggaran

      Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.
   c. Kinerja Lain-Lain

      Subbab ini berisi informasi capaian kinerja lainnya (bukan kinerja utama yang ditetapkan dalam Kontrak Kinerja Tahun 2023).

4. Bab IV Penutup

   Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

5. Lampiran

   Perjanjian Kinerja (Kontrak Kinerja) Tahun 2023, Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2023, Matriks Cascading Tahun 2023, dan Rincian Kerta Kerja Revisi Terakhir Tahun 2023.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

B. PENETAPAN/PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Sebagai instansi vertikal Ditjen Perbendaharaan, KPPN Sanggau melaksanakan Rencana Strategis DJPb 2020-2024 yang merupakan dokumen perencanaan yang bersifat indikatif yang memuat arah, kebijakan dan strategi dan *milestone* DJPb dan *Roadmap* Organisasi DJPb. Strategi organisasi disusun oleh seluruh pegawai KPPN Sanggau untuk menghadapi tantangan dalam pencapaian visi dan misi. Untuk lebih mempertajam dan memberikan pemahaman setiap pegawai untuk pencapaian tujuan organisasi ditetapkan pula rencana kerja tahunan yang memuat rencana aksi dalam melaksanakan fungsi *treasury*. Dengan dukungan SDM yang profesional dan anggaran yang memadai mampu memberikan layanan terbaik dalam peningkatan kualitas layanan publik. KPPN Sanggau telah menetapkan visi, yaitu:

Visi dan Misi KPPN Sanggau

"Menjadi Pengelola Perbendaharaan Negara yang Unggul di Tingkat Dunia"

Untuk mewujudkan visi tersebut, KPPN Sanggau menjalankan Misi Ditjen Perbendaharaan yang meliputi:

1. Mewujudkan pengelolaan kas negara yang pruden, efisien, dan optimal;
2. Mendukung kinerja pelaksanaan APBN yang efisien, efektif, dan akuntabel;
3. Mewujudkan akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah yang akuntabel, transparan, andal, dan tepat waktu;
4. Mewujudkan tata kelola investasi pemerintah yang modern, inklusif, dan berkelanjutan;
5. Mewujudkan layanan dan tata kelola keuangan Badan Layanan Umum yang inovatif dan modern;
6. Mewujudkan tata kelola sumber daya, proses bisnis, dan sistem teknologi informasi perbendaharaan yang modem,efektif, dan adaptif.

B. PENETAPAN/ PERJANJIAN KINERJA

Penetapan Kinerja tahun 2023 merupakan Kontrak Kinerja Kepala KPPN Sanggau sebagai Pemilik Peta Strategi, dijabarkan dalam 9 (sembilan) Sasaran Strategis dan 18 (delapan belas) Indikator Kinerja Utama (IKU). Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama pada Peta Strategi KPPN Sanggau tahun 2023 tersebut dapat ditunjukkan pada gambar berikut.

Peta Strategi KPPN Sanggau Tahun 2023

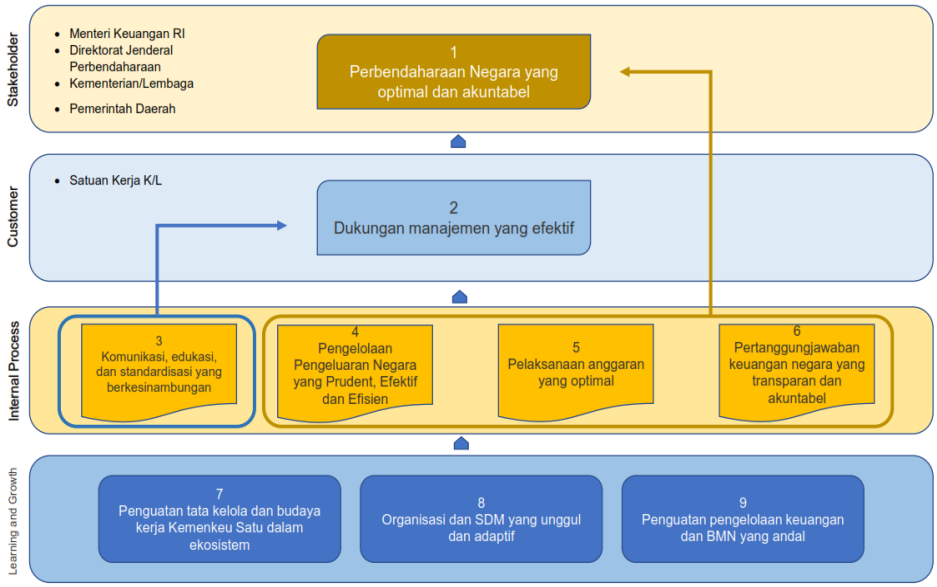

Peta Strategi yang telah disusun tersebut dapat dilihat berdasarkan 4 (empat) perspektif, yaitu:

1. ***Stakeholders Perspective***

   Perspektif ini mencakup sasaran strategis yang ingin diwujudkan organisasi untuk memenuhi harapan sehingga dinilai berhasil dari sudut pandang *stakeholder* (pemangku kepentingan). Stakeholder adalah pihak internal dan eksternal yang secara langsung atau tidak langsung memiliki kepentingan atas *output* atau *outcome* dari suatu organisasi, tetapi tidak menggunakan layanan organisasi secara langsung.

2. ***Customer Perspective***

   Perspektif ini mencakup sasaran strategis yang ingin diwujudkan organisasi untuk memenuhi harapan *customer* (pengguna layanan) dan/atau harapan organisasi terhadap *customer*. *Customer* merupakan pihak luar yang terkait langsung dengan pelayanan suatu organisasi.

3. ***Internal Process Perspective***

   Perspektif ini mencakup sasaran strategis yang ingin diwujudkan melalui rangkaian proses yang dikelola organisasi dalam memberikan layanan dan menciptakan nilai bagi *stakeholder* dan *customer* (*value chain*).

4. ***Learning and Growth Perspective***

   Perspektif ini mencakup sasaran strategis berupa kondisi ideal atas sumber daya internal organisasi yang ingin diwujudkan atau yang seharusnya dimiliki oleh organisasi untuk menjalankan proses bisnis guna menghasilkan *output* atau *outcome* organisasi yang sesuai dengan harapan *customer* dan *stakeholder*.

Sembilan sasaran strategis yang telah ditetapkan pada setiap perspektif untuk tahun 2023 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. *Stakeholders perspective* terdiri atas 1 (satu) sasaran strategis, yaitu:

   Perbendaharaan Negara yang optimal dan akuntabel

   Ditjen Perbenaharaan melakukan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara secara optimal dan akuntabel. Keuangan negara dikelola secara optimal dalam mencapai output dan outcome sesuai dengan tujuan dan prioritas pembangunan pada APBN. DJPb juga mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara, laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah disampaikan secara tepat waktu dan disusun mengikuti standar akuntansi pemerintahan.

2. *Customer perspective* terdiri atas 1 (satu) sasaran strategis, yaitu:

   Dukungan Manajemen yang Efektif

   Ditjen Perbendaharaan memberikan dukungan manajemen yang efektif dalam upaya mensukseskan dan mewujudkan program, output, atau outcome. Dukungan manajemen dilakukan dalam bentuk kegiatan-kegiatan pendukung pelaksanaan fungsi DJPb dan Kementerian Keuangan yang dilaksanakan oleh unit terkait. Tugas dan fungsi Ditjen Perbendaharaan diantaranya meliputi pelaksanaan anggaran, pengelolaan kas negara, dan penyusunan laporan keuangan pemerintah. Pengolahan dan analisis data dan informasi dapat menghasilkan rekomendasi berkualitas yang dapat menjadi pilihan dalam pengambilan kebijakan keuangan negara. Data dan infomasi yang diolah dan dianalisis tidak hanya data pusat tetapi juga pada tingkat regional sebagai upaya mewujudkan pembangunan nasional melalui pembangunan di daerah.

3. *Internal process perspective* terdiri atas 4 (empat) sasaran strategis, yaitu:
   a. **Komunikasi, edukasi, dan standardisasi yang berkesinambungan**
      Komunikasi dan edukasi merupakan upaya untuk meningkatkan pemahaman stakeholders atas peraturan dan kebijakan di bidang perbendaharaan untuk memperkuat implementasi peraturan dan kebijakan dalam rangka mendorong tercapainya tujuan organisasi. Standardisasi bertujuan untuk mewujudkan profesionalisme Sumber Daya Manusia (SDM) pengelola perbendaharaan melalui peningkatan kompetensi pengelola perbendaharaan berdasarkan kualifikasi kompetensi yang dipersyaratkan dalam rangka mendukung terwujudnya pengelolaan APBN yang semakin berkualitas di seluruh Kementerian/Lembaga sehingga dapat menghasilkan output dan outcome yang maksimal sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Standardisasi pengelola perbendaharaan dimaksud dilaksanakan melalui program pengembangan kapasitas, uji kompetensi, sertifikasi kompetensi, dan pengembangan profesi jabatan fungsional di bidang perbendaharaan. Dalam rangka memenuhi tuntutan perkembangan tata kelola keuangan yang bersifat dinamis, dibutuhkan strategi komunikasi, edukasi, dan standardisasi yang tidak tambal sulam serta berorientasi pada usaha membuat satker mampu menguasai secara menyeluruh aspek filosofi sampai dengan aspek teknis pengelolaan perbendaharaan.
   b. **Pengelolaan Pengeluaran Negara yang Prudent, Efektif dan Efisien**
      Pengelolaan pengeluaran negara yang prudent, efektif dan efisien diwujudkan dengan menjaga pengeluaran negara yang dilakukan Kementerian Negara/Lembaga dengan penuh kehati-hatian, agar setiap Rupiah yang keluar dari kas negara dapat dipertanggungjawabkan serta memberi multiplier effect terhadap seluruh perekonomian Indonesia. Tata cara pengelolaan pengeluaran negara secara efektif dan efisien dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan serta memperhatikan prioritas dan tujuan nasional.
   c. **Pelaksanaan anggaran yang optimal**
      Pelaksanaan anggaran yang efektif dan efisien adalah kemampuan BUN untuk menjalankan kebijakan pelaksanaan anggaran dapat berjalan secara tepat sasaran, tepat guna, dan memastikan pelaksanaan anggaran pada Kementerian Negara/Lembaga maupun BA BUN berjalan sesuai dengan ketentuan/ kebijakan Pelaksanaan Anggaran.
   d. **Pertanggungjawaban keuangan negara yang transparan dan akuntabel**
      Akuntabilitas dan transparansi pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara diwujudkan dengan penyusunan laporan keuangan oleh Pemerintah Pusat. Penyusunan laporan keuangan Pemerintah harus disusun secara profesional dan modern. Kualitas laporan keuangan Pemerintah dapat diidentifikasi dari ketepatan waktu penyelesaian LKPP, penyelesaian rekomendasi BPK, serta opini audit yang baik dari BPK.
4. *Learning and growth perspective* terdiri atas 3 (tiga) sasaran strategis, yaitu:
   a. **Penguatan tata kelola dan budaya kerja Kemenkeu Satu dalam ekosistem**
      Pemerintahan di masa depan akan dipengaruhi oleh tiga aspek, yaitu: work (proses bisnis), workforce (SDM), dan workplace (tempat bekerja). Dimana ketiga aspek tersebut akan sangat erat kaitannya dengan pemanfaatan teknologi sebagai enabler.

Untuk itu, diperlukan penguatan ketiga sumber daya tersebut secara terintegrasi melalui penguatan Budaya Kerja Kemenkeu Satu. Kemenkeu Satu merupakan bentuk kolaborasi dari berbagai unsur dalam Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Setiap entitas dalam Kemenkeu memiliki tugas dan fungsinya masing-masing, namun dapat berkolaborasi dan bekerja bersama untuk akhirnya tumbuh dan berkembang bersama (kolaboratif).

b. Organisasi dan SDM yang unggul dan adaptif

Organisasi yang unggul dan adaptif adalah organisasi yang mampu mewadahi dan memfasilitasi kegiatan-kegiatan dalam rangka mencapai tujuan. Dengan demikian organisasi beserta proses bisnis di dalamnya akan bersifat dinamis dan fleksibel sesuai dengan tuntutan kebutuhan dan dinamika transformasi kelembagaan Kementerian Keuangan. SDM yang unggul dan optimal adalah SDM yang memiliki kepemimpinan yang tepat, mengetahui apa yang akan dilakukan untuk semua informasi yang diterima dan kompetensi yang dibutuhkan untuk keberhasilan organisasi serta melakukan pekerjaan dengan penuh semangat, efektif, efisien dan produktif, sesuai dengan proses kerja yang benar agar mencapai hasil kerja yang optimal.

c. Penguatan pengelolaan keuangan dan BMN yang andal

Pengelolaan keuangan meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring anggaran selama satu tahun anggaran yang selanjutnya dipertanggungjawabkan kepada para stakeholder. Kualitas pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran, tercermin dari opini yang diberikan oleh BPK. Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA) harus dikelola secara efektif dan efisien, sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan (akuntabel) dalam rangka mencapai output yang diharapkan. Pengelolaan BMN meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian. Optimalisasi pengelolaan BMN merupakan proses kerja dalam manajemen aset yang bertujuan untuk mengoptimalkan potensi fisik, lokasi, nilai, jumlah/volume, legal dan ekonomis yang dimiliki aset tersebut.

Sembilan Sasaran Strategis tersebut dirumuskan ke dalam 18 (delapan belas) Indikator Kinerja Utama yang masing-masing ditargetkan dan ditetapkan sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 2.1.

TABEL 2.1
Target Indikator Kinerja Utama (IKU) Kemenkeu-*Three* KPPN Sanggau

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama		Target
	Perbendaharaan Negara yang Optimal dan Akuntabel	1a-CP	Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran K/L	90.00
		1b-N	Indeks kualitas LK Kuasa BUN KPPN	3.00

	Dukungan Manajemen yang Efektif	2a-N	Indeks kepuasan satker terhadap layanan KPPN	4.66 (skala 5)
3.	Komunikasi, edukasi, dan standardisasi yang berkesinambungan	3a-N	Persentase tingkat implementasi standardisasi kompetensi pejabat perbendaharaan	93.00
		3b-N	Tingkat efektivitas edukasi di bidang pengelolaan perbendaharaan	89.00
4.	Pengelolaan Pengeluaran Negara yang Prudent, Efektif dan Efesien	4a-CP	Persentase akurasi perencanaan kas	80.00
		4b-N	Tingkat Kualitas Penyelesaian SP2D	3.00
5.	Pelaksanaan anggaran yang Optimal	5a-CP	Nilai kinerja penyaluran Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa	90
		5b-N	Indeks Kualitas Implementasi Digipay	3.10
6.	Pertanggungjawaban keuangan negeri yang transparan dan akuntabel	6a-CP	Indeks Kualitas Pelaksanaan rekonsiliasi tingkat UAKPA	3.25
		6b-N	Indeks Kualitas Laporan Pertanggungjawaban Bendahara K/L	3.00
7.	Penguatan tata Kelola dan budaya kerja Kemenkeu Satu dalam ekosistem kolaboratif	7a-CP	Tingkat Implementasi Penajaman Tugas Treasury dan Financial Advisory	80.00
8.	Organisasi dan SDM yang unggul dan adaptif	8a-N	Tingkat kualitas pengelolaan kinerja berbasis *Strategy Focused Organization*	85.00
		8b-N	Tingkat Implementasi Learning Organization	85.00
		8c-N	Nilai hasil evaluasi pelaksanaan tugas kepatuhan internal	86.00
9.	Penguatan Pengelolaan keuangan dan BMN yang andal	9a-CP	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran KPPN	95.50
		9b-N	Nilai kualitas LK tingkat UAKPA dan UAKPB	84.00
		9c-N	Tingkat kualitas pengelolaan BMN	100.00

Sebagaimana disepakati dalam Kontrak (Perjanjian) Kinerja Tahun 2023, dalam upaya mencapai 9 (sembilan) Sasaran Strategis tersebut, KPPN Sanggau didukung anggaran yang dibagi ke dalam 2 (kegiatan) kegiatan sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 2.2.

TABEL 2.2
Pendanaan Per Kegiatan untuk Mendukung Pencapaian Sasaran Strategis

No	Kegiatan	Anggaran
1.	Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara dan Resiko	Rp. **92.116.000**
2.	Dukungan Manajemen	Rp. **1.852.403.000**
	Jumlah	**Rp. 1.944.519.000**

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

C. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI
D. REALISASI ANGGARAN
E. KINERJA LAINNYA

C. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran capaian kinerja KPPN Sanggau tahun 2023 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) pada setiap perspektif. Dari hasil pengkuran kinerja tersebut, diperoleh data bahwa capaian **Nilai Kinerja Organisasi (NKO) KPPN Sanggau adalah sebesar 111.77**. Nilai tersebut berasal dari capaian kinerja pada setiap perspektif sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.1.

PERSPECTIVE	BOBOT	REALISASI	NILAI
STAKEHOLDER	30.00	113,65	34.10
CUSTOMER	20.00	105.69	21.14
INTERNAL PROCESS	25.00	113.99	28.50
LEARNING AND GROWTH	25.00	112.11	28.03
NILAI KINERJA ORGANISASI			**111.77**

TABEL 3.1
Nilai Kinerja Organisasi Berdasarkan Perspektif

Sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.1, realisasi seluruh perspektif mendapat nilai di atas 100% dengan nilai tertinggi terdapat pada *Stakeholder Perspective.* Kinerja KPPN Sanggau tahun 2023 mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan tersebut dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2023 dapat ditunjukkan pada Grafik 3.1.

Nilai Kinerja Organisasi KPPN Sanggau Tahun 2023

Sebagaimana ditunjukkan pada Grafik 3.1, dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2023, NKO KPPN Sanggau mendapatkan nilai pada tahun 2018 sebesar 106.81, kemudian turun menjadi 106.27 pada tahun 2019 dan kemudian meningkat pada tahun 2020 menjadi 108.11. Peningkatan capaian NKO secara berturut – turut terjadi lagi pada tahun 2021 sebesar 108.66, tahun 2022 sebesar 108.93 dan pada tahun 2023 mengalami peningkatan yang sangat tinggi dengan capaian sebesar 111.77.

GRAFIK 3.1
NKO KPPN Sanggau Tahun 2018—2023

Capaian IKU KPPN Sanggau Tahun 2023

Data capaian 18 IKU dapat ditunjukkan pada Tabel 3.2.

TABEL 3.2
Capaian IKU Kemenkeu-*Three* KPPN Sanggau Tahun 2023

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Nilai
	Stakeholder Perspective (30%)			34.10
1	Perbendaharaan Negara yang Optimal dan Akuntabel			113.65
1a-CP	Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran K/L	90.00	96.56	107.29
1b-N	Nilai kualitas LK Kuasa BUN KPPN	3.00	4.00	120.00

Customer Perspective (20.00)				21.14
2	Dukungan Manajemen yang Efektif			105.69
2a-N	Indeks kepuasan satker terhadap layanan KPPN	4.66	4.93	105.69
Internal Process Perspective (25.00)				28.50
3	Komunikasi, edukasi, dan standardisasi yang berkesinambungan			104.21
.3a-N	Persentase tingkat implementasi standardisasi kompetensi pejabat perbendaharaan	93.00	93.30	100.32
3b-N	Tingkat efektivitas edukasi di bidang pengelolaan perbendaharaan	89.00	96.20	108.09
4	Pengelolaan pengeluaran negara yang prudent, efektif dan efisien			120.00
4a-CP	Persentase akurasi perencanaan kas	80.00	98.01	120.00
4b-N	Tingkat kualitas penyelesaian SP2D	3.00	4.61	120.00
5	Pelaksanaan anggaran yang optimal			111.75
5a-CP	Nilai kinerja penyaluran Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa	90.00	99.53	110.59
5b-N	Indeks kualitas Implementasi Digipay	3.10	3.50	112.90
6	Pertanggungjawaban keuangan negara yang akuntabel			120.00
6a-CP	Indeks Kualitas Pelaksanaan Rekonsiliasi tingkat UAKPA	3.25	4.00	120.00
6b-N	Indeks kualitas laporan pertanggungjawaban Bendahara K/L	3.00	4.00	120.00
Learn and Growth Perspective (25.00)				28.03
7	Penguatan tata Kelola dab budaya kerja kemenkeu satu dalam ekosistem kolaboratif			120.00
7a-CP	Tingkat implementasi penajaman tugas Treasury dan Financial Adisory	80.00	100.00	120.00
8	Organisasi dan SDM yang unggul dan adaptif			107.29
8a-N	Tingkat kualitas pengelolaan kinerja berbasis Strategy Focused Organization	85.00	88.61	104.25
8b-N	Tingkat Implementasi Learning Organization	85.00	91.06	107.13
8c-N	Nilai hasil evaluasi pelaksanakan tugas kepatuhan internal	86.00	95.04	110.51
9	Penguatan pengelolaan keuangan dan BMN yang andal			109.05
9a-CP	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran KPPN	95.50	99.12	103.79
9b-N	Nilai kualitas LK tingkat UAKPA dan UAKPB	84	86.85	103.39
9c-N	Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaarn	100.00	120.00	120.00
NILAI KINERJA ORGANISASI (NKO)				**111.77**

Sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.2, realisasi seluruh IKU KPPN Sanggau (18 IKU) telah mencapai target yang telah ditentukan. Penjelasan capaian IKU untuk setiap sasaran strategis adalah sebagai berikut:

1.	**Sasaran Strategis**	Ditjen Perbendaharaan melakukan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara secara optimal, transparan dan akuntabel. Keuangan negara dikelola secara optimal dalam mencapai *output* dan *outcome* sesuai dengan tujuan dan prioritas pembangunan pada APBN. DJPb juga mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara, laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah disampaikan secara tepat waktu dan disusun mengikuti standar akuntansi pemerintahan.
	Perbendaharaan Negara yang Optimal dan akuntabel	

Dalam pencapaian sasaran strategis ini, KPPN Sanggau mengidentifikasikan 1 (satu) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang pencapaiannya ditabulasikan dalam Tabel 3.3.

TABEL 3.3
Capaian IKU pada Sasaran Strategis Perbendaharaan Negara yang optimal dan akuntabel

SS 1: Pengelolaan perbendaharaan yang akuntabel

Kode	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Nilai
1a-CP	Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran	90.00	96.56	107.29
1b-N	Nilai kualitas LK Kuasa BUN KPPN	3.00	4.00	120.00

1a-CP **Nilai kinerja pelaksanaan anggaran K/L**

Dalam rangka memonitor perkembangan upaya peningkatan kualitas pelaksanaan anggaran Satker, diperlukan suatu alat penilaian kualitas/kinerja yang sekaligus dapat berperan sebagai katalis perubahan perilaku dan pola pikir Satker dalam pelaksanaan anggaran.

Persentase Kinerja Pelaksanaan Anggaran mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran secara kuantitatif, yang dapat terwakili oleh aspek pelaksanaan anggaran meliputi:

1. Aspek Kualitas Perencanaan, dengan indikator sebagai berikut:
   a. Revisi DIPA
   b. Deviasi Halaman III
2. Aspek Kepatuhan Kualitas Pelaksanaan, dengan indikator:
   a. Penyerapan anggaran
   b. Belanja kontraktual
   c. Penyelesaian tagihan
   d. UP dan TUP
   e. Dispensasi
3. Aspek Kualitas Hasil, dengan indikator:
   a. Capaian output

Rincian variabel/indikator, tata cara dan bobot perhitungan untuk setiap aspek diatur dalam ketentuan mengenai Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga yang ditetapkan Direktur Jenderal Perbendaharaan.

Cara ukur / formula

Nilai Kinerja pelaksanaan anggaran K/L = Hasil penilaian IKPA tingkat Nasional sebagai BUN pada Aplikasi OMSPAN

Nilai IKPA pada Aplikasi OM-SPAN dihitung berdasarkan data transaksi pelaksanaan anggaran pada seluruh indikator kinerja seluruh KL yang diambil dari Aplikasi SPAN dan SAKTI. Dihitung dengan formula yang ditetapkan dalam Perdirjen No 5 Tahun 2022.

IKPA =∑ [10% (REV) + 10% (HAL3) + 20% (REAL) + 10% (KTR) + 10% (TAG) + 10% (PUP) + 5% (DSPM) + 25% (CO)] x 100

Target tahun 2023

Target IKU tersebut untuk tahun 2023 adalah sebesar 90.00 sebagaimana ditetapkan dalam Kontrak Kinerja Kemenkeu-*Three* KPPN Sanggau Tahun 2023. Target tersebut sama dengan target yang ditetapkan dalam Renstra Ditjen Perbendaharaan Tahun 2020-2024 yaitu sebesar 90.00.

Realisasi tahun 2023

Nilai kinerja pelaksanaan K/L tahun 2023 yaitu sebesar 96.56.

Perhitungan / penjelasan perolehan

Perbandingan antara target dan realisasi tahun 2023

Hasil penilaian IKPA pada Aplikasi OM SPAN.

TABEL 3.4
Capaian IKU Nilai Kinerja pelaksanaan anggaran K/L Tahun 2023

Target/ Realisasi	Trw I	Trw II	Smt I	Trw III	s. d. Trw III	Trw IV	Tahunan	Pol /KP
Target	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	89	*Maximize/ Average*
Realisasi	97.14	96.67	96.67	97.26	97.26	96.56	96.56	
Indeks Capaian	107.93%	107.41%	107.41%	108.06%	108.06%	107.29%	107.29%	

Sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.4, nilai realisasi tahunan IKU sebesar 96.56 tersebut melampaui target IKU sebesar 90.00 dengan indeks capaian 107.29%.

Perkembangan Nilai kinerja pelaksanaan anggaran K/L dari tahun 2018 s.d 2023 ditunjukkan pada Tabel 3.5 dan Grafik 3.9.

Perbandingan antara capaian kinerja tahun 2023 dengan beberapa tahun terakhir

TABEL 3.5
Perkembangan Nilai kinerja pelaksanaan anggaran K/L Tahun 2018 - 2023

Deskripsi	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Target	80	88	88	89	89	90
Realisasi	92.98	93.78	98.61	98.43	95.36	96.56
Nilai	**116.23%**	**106.57%**	**112.06%**	**110.60%**	**107.15%**	**107.29%**

GRAFIK 3.2
Perkembangan Nilai kinerja pelaksanaan anggaran K/L Tahun 2018 – 2023

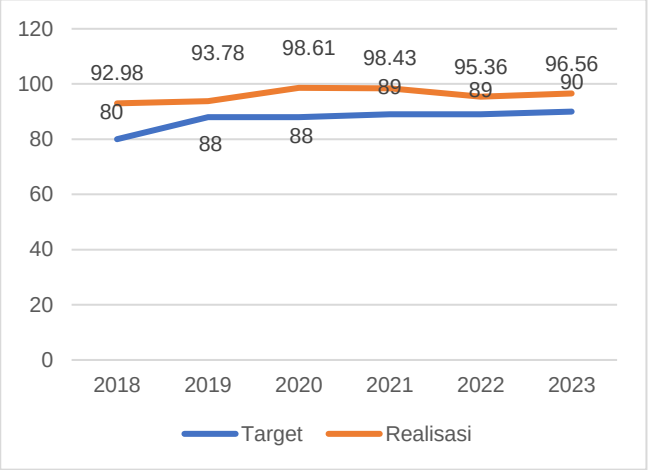

Sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.5 dan Grafik 3.9, Nilai kinerja pelaksanaan anggaran K/L meningkat pada tahun 2018 hingga 2020 dan kembali menurun pada tahun 2021 hingga 2022. Namun pada tahun 2023 mengalami peningkatan kembali sebanyak 1.2 poin dibanding tahun 2022 yaitu sebesar 96.56. Pencapaian nilai tertinggi sejak 5 tahun terakhir yaitu pada tahun 2020 dengan capaian 98.61.

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-5/PB/2022 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga, terdapat pokok-pokok reformulasi IKPA sejak tahun 2022 yaitu kualitas perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, dan hasil pelaksanaan anggaran serta penyesuaian bobot 8 indikator dalam IKPA.

	Isu, permasalahan, tantangan, dan tindakan, serta analisis pelaksanaan rencana aksi dan mitigasi risiko *Analisis penyebab* *Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya* *Rencana aksi masa depan*	Capain di tahun 2023 ini tentunya menghadapi permasalahan dan tantangan di antaranya adalah: 1. Tantangan Penyelarasan Realisasi Belanja dengan rencana kerja karena adanya perubahan kebijakan kantor pusat K/L 2. Satker kurang dapat melakukan penyerapan anggaran per jenis belanja sesuai dengan masing masing target triwulanannya karena adanya perubahan kondisi pada saat DIPA disusun dengan ketika pelaksanaan anggaran 3. Ketika terdapat proses revisi DIPA secara terpusat yang mendekati batas waktu revisi halaman III DIPA mengakibatkan satker tidak bisa melakukan penyesuaian halaman III DIPA 4. Kurang koordinasi antara penyusun rencana keuangan dengan pelaksana kegiatan. 5. Terdapat satker yang mendapat tambahan pagu DIPA pada akhir triwulan III 2023 yang pemilihan penyedia barang/jasanya menggunakan mekanisme lelang sampai akhir tahun, sehingga penyedia barang/jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan fisik. Adapun tindakan yang telah dilaksanakan antara lain: 1. Secara persuasif mengajak satker agar segera melakukan kontrak/kegiatan di awal tahun melalui berbagai media baik luring maupun daring. 2. Melakukan pembinaan dan konsultasi kepada satker secara *one on one* maupun menyeluruh baik melalui kegiatan offline, WA maupun video conference melalui Aplikasi Zoom. 3. Mengingatkan satuan kerja untuk mengirimkan ADK kontrak maksimal 5 (lima) hari kerja setelah SPK ditandatangani oleh PPK dan rekanan. 4. Menghimbau satuan kerja untuk melakukan revolving 100% dari UP/TUP agar tidak terdapat setoran pengembalian UP/TUP. 5. Berkoordinasi dengan satker agar dalam pengisian Capaian Output sesuai dengan real output yang telah dilaksanakan tepat waktu melalui berbagai media. 6. Menghimbau satker untuk meningkatkan realisasi dengan disiplin berdasarkan jenis belanja dan melaksanakan rencana kegiatan yang telah disusun. 7. Melaksanakan monitoring bulanan terhadap nilai capaian setiap variabel bagi seluruh satuan kerja. 8. Mengingatkan satuan kerja untuk selalu *aware* dan memonitor nilai IKPA melalui aplikasi OMSPAN. Dari langkah-langkah yang telah dilakukan sebagaimana diuraikan di atas, perlu dilakukan tindakan perbaikan-perbaikan guna meningkatkan capaian yang lebih optimal lagi dimasa yang akan datang. Adapun rencana kegiatan yang akan dilakukan adalah: 1. Memanfaatkan sarana komunikasi secara efektif dan efisien untuk menginformasikan ketentuan terbaru mengenai pelaksanan anggaran. 2. Menghimbau satker selalu meningkatkan capaian IKPA terutama indikator penyerapan anggaran dengan memperhatikan rencana pencairan kegiatan yang telah disusun dalam halaman III DIPA. 3. Melaksanakan monitoring secara bulanan melalui OMSPAN terhadap nilai capaian setiap variabel bagi seluruh satuan kerja, dalam hal ditemukan satuan kerja yang masih belum maksimal maka disampaikan permintaan untuk segera melakukan realisasi atau pencatatan capaian. 4. Menyampaikan surat kepada satuan kerja untuk mendorong realisasi anggaran khususnya bagi satuan kerja yang belum melakukan realisasi sesuai dengan halaman III DIPA,

		mengingatkan satker agar mengisi capaian output secara tepat waktu, dan mengingatkan satuan kerja untuk menyampaikan ADK kontrak maksimal 5 (lima) hari kerja setelah SPK ditandatangani oleh PPK dan rekanan.
1b-N	**Indeks Kualitas LK Kuasa BUN KPPN**	Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 218/PMK.05/2016 tanggal 30 Desember 2016, tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.05/2014 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, KPPN selaku UAKBUN-Daerah melakukan penyusunan Laporan Keuangan tingkat UAKBUN-Daerah berupa Laporan Arus Kas, Neraca KUN, Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca SAU. KPPN menyusun laporan keuangan berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 221/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 216/PMK.05/2015 tentang Tata Cara Penyusunan Dan Penyampaian Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara. Selanjutnya, KPPN menyusun laporan Keuangan dengan sistematika dan lampiran sesuai Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-6193/PB/2017 tanggal 17 Juli 2017 hal Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Kuasa BUN-Daerah dan Koordinator Kuasa BUN-Kanwil. LK Kuasa BUN tingkat Daerah tersebut secara periodik disampaikan kepada Kanwil DJPb, Dit. PKN (selaku UAPBUN-AP) dan Dit. APK Ditjen Perbendaharaan. Untuk mewujudkan kualitas penyusunan LK pada KPPN, Kanwil DJPb memberikan penilaian terhadap Kualitas LK dimaksud berdasarkan Nota Dinas Direktur APK Nomor ND-11/PB.6/2021 tanggal 6 Januari 2021 hal Kriteria Penilaian Laporan Keuangan Tingkat UAKBUN-D KPPN dan Laporan Keuangan Tingkat UAKKBUN Kanwil Ditjen Perbendaharaan berdasarkan empat kriteria, yaitu: (1) akurasi data (70%); (2) ketepatan waktu (2%); kelengkapan (3%); dan (4) Tingkat Partisipasi (25%). Penilaian LK unaudited berkontribusi sebesar 70% dan audited sebesar 30%. Hasil penilaian tersebut dituangkan dalam Keputusan Kepala Kanwil DJPb
	Cara ukur / formula	Capaian IKU = INDEKS (a + b) / 2 a : Persentase jumlah satker yang tidak terdapat selisih TKTM Aset dan Persediaan pada periode pelaporan semesteran. Nilai capaian semester I diperoleh dari data LK Audited 2022 dan nilai capaian semester II diperoleh dari data LK Semester I 2023 Nilai a meliputi data Semester I dan II, sehingga nilai a = (Semester I dan Semester II)/2 Indeks 1 = 0 -70% Indeks 2 = 71%-80% Indeks 3 = 81%-90% Indeks 4 = 91%-100% b : Hasil penilaian kualitas LKBUN KPPN yang dilakukan oleh Kanwil DJPb Indeks 1 = <90 Indeks 2 = 90-93 Indeks 3 = 94-96 Indeks 4 = 97-100
	Target tahun 2023	Target IKU tahun 2023 adalah sebesar 3 dari skala 4 sebagaimana ditetapkan dalam kontrak kinerja Kemenkeu-*Three* KPPN Sanggau tahun 2023. Satuan pengukuran ini berbeda dari tahun sebelumnya yang memakai satuan pengukuran NILAI. Sedangkan di tahun 2023 memakai satuan pengukuran INDEKS.
	Realisasi tahun 2023	Hasil penilaian Indeks kualitas LK Kuasa BUN KPPN tahun 2023 yang dilakukan oleh Kanwil DJPb yaitu sebesar 4 dari skala 4.
	Perhitungan / penjelasan perolehan	Nilai diperoleh dari hasil penilaian Kanwil DJPb sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat Nomor KEP-178/WPB.17/2023.

Perbandingan antara target dan realisasi tahun 2023

TABEL 3.6
Capaian IKU Nilai LK Kuasa BUN KPPN yang berkualitas Tahun 2023

Target/ Realisasi	Trw I	Trw II	Smt I	Trw III	s.d. Trw III	Trw IV	Tahunan	Pol /KP
Target	-	-	-	-	-	3	3	Maximize / *Take Last Known Value*
Realisasi	-	-	-	-	-	4	4	
Indeks Capaian	-	-	-	-	-	120	120	

Sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.6, nilai realisasi tahunan IKU (yang diperoleh pada triwulan IV tahun 2023) sebesar 4 (empat) tersebut melampaui target IKU sebesar 3 (tiga) dengan indeks capaian 120%.

Perbandingan antara capaian kinerja tahun 2023 dengan beberapa tahun terakhir

Sehubungan dengan Indeks LK Kuasa BUN KPPN yang berkualitas adalah merupakan IKI baru di tahun 2023 maka data perkembangan hanya dapat disajikan pada tahun 2023 yang ditunjukkan pada Tabel 3.7 dan Grafik 3.2.

TABEL 3.7
Target Indeks LK Kuasa BUN KPPN yang berkualitas Tahun 2023

Deskripsi	2018	2019	2020	2021	2023
Target					3
Realisasi					4
Nilai					**120.00%**

GRAFIK 3.3
Perkembangan Indeks LK Kuasa BUN KPPN yang berkualitas Tahun 2023

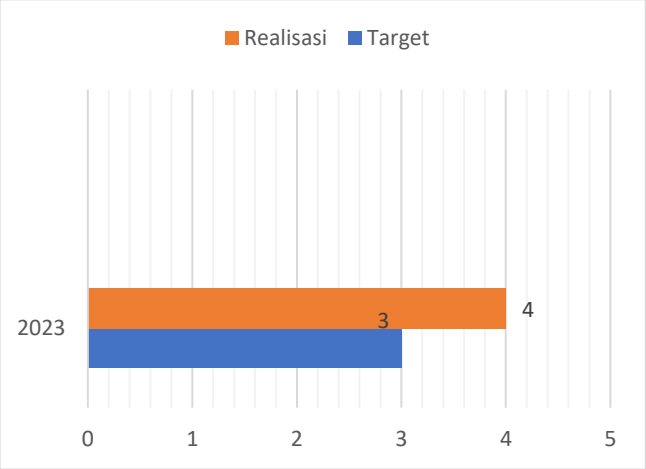

Sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.7 dan Grafik 3.3, Indeks LK Kuasa BUN KPPN Sanggau tahun 2023 mendapatkan capaian yang sangat baik. Dari target 3 (tiga) dari skala 4, telah dicapai indeks sebesar 4 (empat) dari skala 4.

Isu, permasalahan, tantangan, dan tindakan, serta analisis pelaksanaan rencana aksi dan mitigasi risiko

LK Kuasa BUN tingkat Daerah tersebut secara periodik disampaikan kepada Kanwil DJPb, Dit. PKN (selaku UAPBUN-AP) dan Dit. APK Ditjen Perbendaharaan.

Untuk mewujudkan kualitas penyusunan LK pada KPPN, Kanwil DJPb memberikan penilaian terhadap Kualitas LK dimaksud berdasarkan Nota Dinas Direktur APK Nomor ND-11/PB.6/2021 tanggal 6 Januari 2021 hal Kriteria Penilaian Laporan Keuangan Tingkat UAKBUN-D KPPN dan Laporan Keuangan Tingkat UAKKBUN Kanwil Ditjen Perbendaharaan berdasarkan empat kriteria, yaitu:

1. akurasi data (70%)
2. ketepatan waktu (2%);

		3. kelengkapan (3%); dan 4. Tingkat Partisipasi (25%). Penilaian LK *unaudited* berkontribusi sebesar 70% dan audited sebesar 30%. Hasil penilaian tersebut dituangkan dalam Keputusan Kepala Kanwil DJPb. Adapun tindakan yang telah dilaksanakan antara lain: 1. Seksi VeraKI selalu koordinasi ke Kanwil DJPb ataupun Dit. APK DJPb 2. Secara reguler memberikan informasi atau pengingat terkait batas-batas waktu pelaksanaan rekonsiliasi satuan kerja 3. Melakukan monitoring dan menginformasikan ke satker permasalahan laporan keuangan yang harus segera diselesaikan dan melakukan pendampingan dalam penyusunan laporan keuangan K/L melalui grup *whatsapp* "Satu Info KPPN Sanggau" 4. Memberikan pengingat kepada satker agar selalu tepat waktu dalam pelaksanaan rekonsiliasi serta memastikan sudah memperoleh status "SHR sudah terbit" pada MONSAKTI 5. Sosialisasi/bimtek ke satker terkait Migrasi SAKTI dan Update Aplikasi dalam penyusunan LK Audited 6. Pendampingan penyelesaian *to do list* dan rekonsiliasi 7. Telah membuat himbauan terkait pengesahan hibah langsung bentuk barang/jasa/surat berharga agar segera disahkan ke KPPN
	Analisis penyebab	1. Proses penyusunan LK BUN secara manual menimbulkan potensi terjadinya kesalahan, sehingga memerlukan ketelitian pegawai. 2. Implementasi aplikasi SAKTI dalam penyusunan LK BUN pada tahun 2023 memerlukan pemahaman satker, khususnya terkait penyelesaian *to do list* dan TDK 3. Jumlah satker yang cukup banyak (68 Satker) dibandingkan dengan jumlah pegawai yang melayani hanya satu orang staf berpotensi menimbulkan permasalahan dalam verifikasi terhadap akurasi data
	Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya	Efisiensi pelaksanaan anggaran KPPN Sanggau untuk tahun 2023 sudah baik, terbukti dengan capaian efisiensi sebesar 20 dari batas nilai antara -20 sampai dengan 20 dan nilai efisiensi sebesar 100.
	Capaian inisiatif strategis untuk mendukung pencapaian IKU	Telah dilaksanakan *One on One Meeting* dengan satker untuk menyelesaikan permasalahan sebagai berikut: 1. Transaksi dalam konfirmasi. 2. Saldo tidak normal. 3. LPJ Bendahara.
	Rencana aksi masa depan	1. Pelaksanaan pendampingan rekonsiliasi dan penyelesaian *to do list* pada periode *unaudited* dan *audited* 2. Sosialisasi penyelesaian Monitoring dan Tindak Lanjut Kualitas Data (PER-8/PB/2023) 3. Penyampaian data pagu minus kepada satker untuk mendapat tindak lanjut dengan melakukan revisi DIPA. 4. Penyampaian permintaan kepada Satker untuk melakukan pengesahan hibah sesuai dengan jadwal.

2.	Sasaran Strategis
	Dukungan Manajemen yang Efektif

DJPb memberikan dukungan manajemen yang efektif dalam upaya mensukseskan dan mewujudkan program, output, atau outcome. Dukungan manajemen dilakukan dalam bentuk kegiatan-kegiatan pendukung pelaksanaan fungsi DJPb dan Kementerian Keuangan yang dilaksanakan oleh unit terkait. Tugas dan fungsi Ditjen Perbendaharaan diantaranya meliputi pelaksanaan anggaran, pengelolaan kas negara, dan penyusunan laporan keuangan pemerintah. Pengolahan dan analisis data dan informasi dapat menghasilkan rekomendasi berkualitas yang dapat menjadi pilihan dalam pengambilan kebijakan keuangan negara. Data dan infomasi yang diolah dan dianalisis tidak hanya data pusat tetapi juga pada tingkat regional sebagai upaya mewujudkan pembangunan nasional melalui pembangunan di daerah

TABEL 3.8
Capaian IKU pada Sasaran Strategis Dukungan Manajemen yang Efektif

SS 2: Dukungan Manajemen yang Efektif

Kode	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Nilai
2a-N	Indeks kepuasan satker terhadap layanan KPPN	4.66	4.93	105.69%

Uraian mengenai IKU tersebut adalah sebagaimana berikut:

2a-N	Indeks kepuasan satker terhadap layanan KPPN

Indeks kepuasan satker terhadap layanan adalah rata-rata tingkat kepuasan satker terhadap seluruh produk layanan perbendaharaan dari KPPN yang mereka gunakan dan manfaatkan, meliputi proses Pencairan Dana, layanan bimbingan dan konsultasi, konfirmasi surat setoran, dan penyelesaian rekonsiliasi realisasi anggaran.

Cara ukur / formula

Indeks kepuasan satker diukur melalui survei oleh masing-masing KPPN dengan metode sampling kepada responden terpilih dari seluruh mitra kerja yang dilayani oleh masing-masing unit eselon IV KPPN.

Indeks Pengukuran menggunakan skala 1-5 sebagai berikut:

5 = Sangat Puas

4 = Puas

3 = Cukup Puas

2 = Kurang Puas

1 = Tidak Puas

Target tahun 2023

Target IKU tersebut untuk tahun 2023 adalah sebesar 4.66 sebagaimana ditetapkan dalam kontrak kinerja Kemenkeu-*Three* KPPN Sanggau tahun 2023. Target tersebut meningkat dari target dalam kontrak kinerja tahun sebelumnya yaitu sebesar 4.65.

Realisasi tahun 2023

Hasil survei kepuasan satker menunjukkan bahwa KPPN Sanggau memiliki indeks kepuasan sebesar 4.93.

Perhitungan / penjelasan perolehan

Hasil perhitungan survei kepuasan satker secara daring sesuai dengan Surat Nomor S-450/KPN.1703/2023 tanggal 1 November 2023. Survei dilaksanakan mulai tanggal 1 s.d. 6 November 2023.

Perbandingan antara target dan realisasi tahun 2023

TABEL 3.9
Capaian IKU Indeks kepuasan satker terhadap layanan KPPN Tahun 2023

Target/ Realisasi	Trw I	Trw II	Smt I	Trw III	s.d. Trw III	Trw IV	Tahunan	Pol /KP
Target	-	4.66	4.66	-	4.66	4.66	4.66	

Realisasi	-	4.94	4.94	-	4.94	4.91	4.93	Maximize / *Average*
Indeks Capaian	-	106%	106%	-	106%	105%	105.69%	

Sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.9, nilai realisasi tahunan IKU (yang diperoleh pada triwulan II tahun 2023) sebesar 4,94 tersebut melampaui target IKU sebesar 4.66 dengan indeks capaian sebesar 106.00%. Sedangkan pada Triwulan IV tahun 2023 nilai realisasi sebesar 4.91 dari target sebesar 4.66 dengan indeks capaian sebesar 105.00%, sehingga rata-rata indeks tahunan IKU Kepuasan Satker terhadap Layanan KPPN Tahun 2023 sebesar 4.93 dari target 4.66 dengan indeks capaian sebesar 105.69%

Perbandingan antara capaian kinerja tahun 2023 dengan beberapa tahun terakhir

Perkembangan Indeks kepuasan satker terhadap layanan KPPN dari tahun 2018 s.d 2023 ditunjukkan pada Tabel 3.10 dan Grafik 3.4.

TABEL 3.10
Perkembangan Indeks kepuasan satker terhadap layanan KPPN Tahun 2018 – 2023

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Indeks Target	4.52	4.53	4.55	4.64	4.65	4.66
Indeks Realisasi	4.61	4.77	4.71	4.87	4.94	4.93
Nilai	101.99%	105.29%	103.51%	104.95%	106.24%	105.69%

GRAFIK 3.4
Perkembangan Indeks kepuasan satker terhadap layanan KPPN Tahun 2018 - 2023

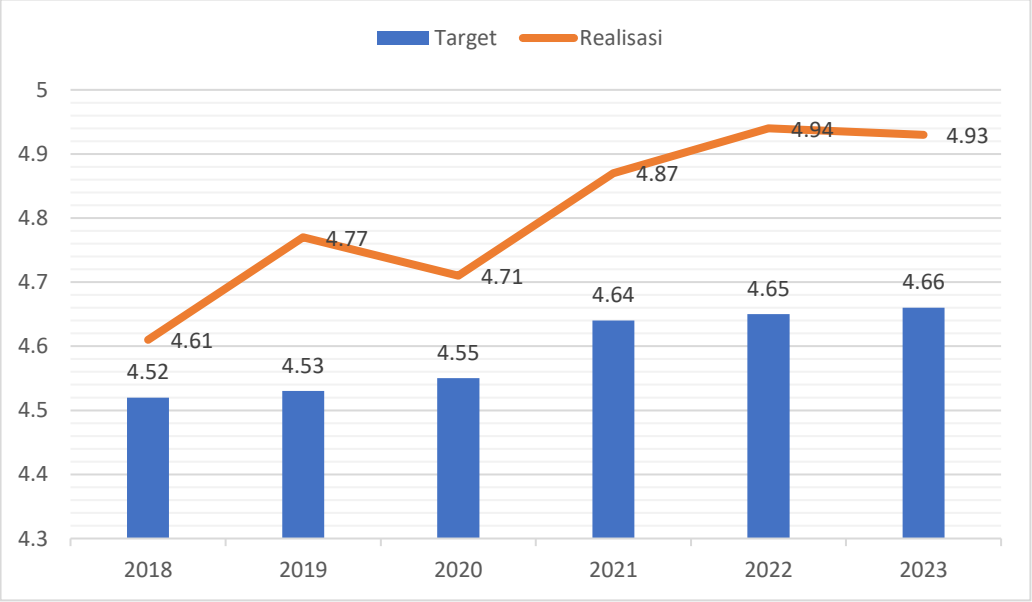

Sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.10 dan Grafik 3.4, Indeks kepuasan satker terhadap layanan KPPN terus meningkat dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2019, kemudian menurun pada tahun 2020, dan kembali meningkat hingga tahun 2022. Namun pada tahun 2023 capaian mengalami sedikit penurunan 0.01 point sebesar 4.93. Pencapaian nilai tertinggi sejak 5 tahun terakhir yaitu pada tahun 2022 dengan capaian 4.94. Diprediksi, penurunan tingkat kepuasan satker terhadap layanan KPPN pada tahun 2023 adalah sebagai dampak dari gangguan implementasi

		SAKTI (maintenance SAKTI) dan kendala aplikasi serta kebijakan baru (Piloting LPJ menggunakan SAKTI, Penerapan TTE, Input Data TKDN dan lain-lain).
	Isu, permasalahan, tantangan, dan tindakan, serta analisis pelaksanaan rencana aksi dan mitigasi risiko	Survei kepuasan satker terhadap layanan KPPN diukur melalui Layanan Pencairan Dana dan Layanan Bimbingan dan Konsultasi dari Seksi PDMS; Layanan Konfirmasi Penerimaan dari Seksi Bank; Layanan Layanan Rekonsiliasi Laporan Keuangan dari Seksi VeraKI, dan Layanan Penyediaan Sarana dan Prasarana dari Subbagian Umum. Permasalahan yang terjadi saat pelaksanaan survei kepuasan satker terhadap layanan KPPN diantaranya adalah: 1. Layanan non tatap muka serta transisi layanan dari luring ke full daring melalui SAKTI mengurangi interaksi sosial langsung dan mengurangi *intimacy* antara pegawai dan petugas satker. 2. Proses adaptasi stakeholder terhadap proses bisnis menggunakan Aplikasi SAKTI dan MonSAKTI menyebabkan satker mengalami kendala. 3. Kendala kebijakan baru yang belum siap secara sistem, seperti kendala proses TTE pada aplikasi SAKTI pada bulan September 2023 sehingga menyebabkan beberapa satker tidak bisa mengajukan SPM ke KPPN. Adapun tindakan yang telah dilaksanakan antara lain: *1. One on One Meeting* (daring/tatap muka) kepada satuan kerja yang membutuhkan pendampingan serta KPPN aktif memberikan pendampingan kepada operator baru 2. Mempedomani kembali (*refreshment*) KEP-57/PB/2023 tentang Standar Pelayanan di Lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan *3. One on One Meeting* terhadap satker yang membutuhkan pendampingan terhadap layanan KPPN 4. Mengikuti *capacity building / service excellent* yang dilaksanakan KPPN Sanggau 5. Pembuatan inovasi seperti RIAM-LPJ, Samer untuk meningkatkan pelayanan di KPPN Sanggau 6. Pelaksanaan *Coaching dan conseling* 7. Penyampaian informasi *maintenance* aplikasi kepada satuan kerja
	Analisis penyebab	1. Perubahan layanan secara online memerlukan penyesuaian untuk memenuhi kepuasan satker 2. Ruang layanan belum secara optimal dapat dimanfaatkan oleh satker karena layanan lebih banyak menggunakan non tatap muka
	Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya	Efisiensi pelaksanaan anggaran KPPN Sanggau untuk tahun 2023 sudah baik, terbukti dengan capaian efisiensi sebesar 20 dari batas nilai antara -20 sampai dengan 20 dan nilai efisiensi sebesar 100.
	Rencana aksi masa depan	1. Mengikuti *capacity building / Service Excellent* di Triwulan I yang diselenggarakan KPPN Sanggau 2. Pelaksanaan *Coaching dan conseling* seksi Veraki Triwulan I 3. Peningkatan kapasitas pegawai dengan *self learning* sesuai dengan penyusunan rencana *Individual Development Program* untuk mendukung peran sebagai *Financial Advisor* 4. Pelaksanaan *Refreshment* PER-8/PB/2023 dan Asistensi pelaporan keuangan

5. Peningkatan *intimacy* dengan satuan kerja melalui kegiatan pemberian apresiasi kepada satuan kerja berkinerja baik dalam kegiatan sosialisasi awal tahun

3. Sasaran Strategis

Komunikasi, edukasi, dan standardisasi yang berkesinambungan

Komunikasi dan edukasi merupakan upaya untuk meningkatkan pemahaman stakeholders atas peraturan dan kebijakan di bidang perbendaharaan untuk memperkuat implementasi peraturan dan kebijakan dalam rangka mendorong tercapainya tujuan organisasi. Standardisasi bertujuan untuk mewujudkan profesionalisme Sumber Daya Manusia (SDM) pengelola perbendaharaan melalui peningkatan kompetensi pengelola perbendaharaan berdasarkan kualifikasi kompetensi yang dipersyaratkan dalam rangka mendukung terwujudnya pengelolaan APBN yang semakin berkualitas di seluruh Kementerian/Lembaga sehingga dapat menghasilkan output dan outcome yang maksimal sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Standardisasi pengelola perbendaharaan dimaksud dilaksanakan melalui program pengembangan kapasitas, uji kompetensi, sertifikasi kompetensi, dan pengembangan profesi jabatan fungsional di bidang perbendaharaan. Dalam rangka memenuhi tuntutan perkembangan tata kelola keuangan yang bersifat dinamis, dibutuhkan strategi komunikasi, edukasi, dan standardisasi yang tidak tambal sulam serta berorientasi pada usaha membuat satker mampu menguasai secara menyeluruh aspek filosofi sampai dengan aspek teknis pengelolaan perbendaharaan

TABEL 3.11
Capaian IKU pada Sasaran Strategis Komunikasi, edukasi, dan standardisasi yang berkesinambungan

SS 3: Komunikasi, edukasi, dan standardisasi yang berkesinambungan

Kode	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Nilai
3a-N	Persentase tingkat implementasi standardisasi kompetensi pejabat perbendaharaan	93.00%	93.30%	100.32%
3b-N	Tingkat efektivitas edukasi di bidang pengelolaan perbendaharaan	89.00%	96.20%	108.09%

Uraian mengenai IKU tersebut adalah sebagaimana berikut:

3a-N **Persentase tingkat implementasi standardisasi kompetensi pejabat perbendaharaan**

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh pengguna anggaran/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara. Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh pengguna anggaran/KPA untuk melakukan pengujian atas permintaan pembayaran dan menerbitkan perintah pembayaran. Bendahara Penerimaan adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang Pendapatan Negara dalam rangka pelaksanaan APBN pada kantor/Satuan Kerja Kementerian Negara/Lembaga Pemerintah Nonkementerian. Bendahara Pengeluaran adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan Belanja Negara dalam pelaksanaan APBN pada kantor / Satker Kementerian Negara/Lembaga. Bendahara Pengeluaran Pembantu adalah orang yang ditunjuk untuk membantu Bendahara Pengeluaran untuk melaksanakan pembayaran kepada yang berhak guna kelancaran pelaksanaan kegiatan tertentu. PPK/PPSPM/Bendahara Tersertifikasi adalah PPK/PPSPM/Bendahara termasuk calon PPK/PPSPM/Bendahara yang lulus penilaian kompetensi bagi PPK/PPSPM dan/atau sertifikasi bagi Bendahara melalui mekanisme konversi, uji kompetensi atau refreshment. Penilaian kompetensi bagi PPK/PPSPM adalah rangkaian proses penilaian secara objektif untuk menilai pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dilakukan secara sistematis dan objektif melalui ujian atau pengakuan atas kepemilikan sertifikat pelatihan/ keahlian sesuai PMK Nomor 211/PMK.05/2019

		tentang Tata Cara Penilaian Kompetensi bagi PPK dan PPSPM pada Satuan Kerja Pengelola APBN Sertifikasi Bendahara adalah proses penilaian karakter, kompetensi, dan kemampuan atas keahlian dan keterampilan untuk menjadi Bendahara yang dilakukan secara sistematis dan objektif melalui Ujian Sertifikasi. Tingkat implementasi diukur berdasarkan tahapan pelaksanaan penilaian kompetensi PPK/PPSPM dan sertifikasi Bendahara pada Satuan Kerja wilayah pembayaran masing-masing KPPN, yang meliputi: - Akselerasi verifikasi usulan peserta penilaian kompetensi PPK/PPSPM dan Sertifikasi Bendahara. - Akselerasi penyelenggaraan refreshment oleh Unit Pelaksana Penilaian Kompetensi PPK/PPSPM. - Pemenuhan Sertifikat BNT bagi Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu
	Cara ukur / formula	(Persentase akselerasi verifikasi usulan x bobot) + (persentase akselerasi refreshment x bobot) + (persentase pemenuhan BNT x bobot)
	Target tahun 2023	Target IKU tersebut untuk tahun 2023 adalah sebesar 93% sebagaimana ditetapkan dalam Kontrak Kinerja Kemenkeu-*Three* KPPN Sanggau Tahun 2023. IKU ini merupakan IKU baru yang tidak memiliki data historis
	Realisasi tahun 2023	Persentase tingkat implementasi standardisasi kompetensi pejabat perbendaharaan tahun 2023 yaitu sebesar 95.62 %.
	Perhitungan / penjelasan perolehan	Berdasarkan monitoring aplikasi Simaspaten tingkat implementasi standarisasi kompetensi pejabat perbendaharaan telah didapat tingkat implementasi sebesar 93,3% dengan perhitungan sebagai berikut: - Akselerasi verifikasi usulan peserta penilaian kompetensi PPK/PPSPM dan Sertifikasi Bendahara sebesar capaian 1 dengan nilai 40%. - Akselerasi penyelenggaraan refreshment oleh Unit Pelaksana Penilaian Kompetensi PPK/PPSPM sebesar capaian 0,78 dengan nilai 23,33%. - Pemenuhan Sertifikat BNT bagi Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu sebesar 1 dengan nilai 30%
	Perbandingan antara target dan realisasi tahun 2023	**TABEL 3.12** Capaian IKU Persentase tingkat implementasi standardisasi kompetensi pejabat perbendaharaan Tahun 2023

Target/ Realisasi	Trw I	Trw II	Smt I	Trw III	s.d. Trw III	Trw IV	Tahunan	Pol /KP
Target		93%	93%		93%	93%	93%	Maximize / *Average*
Realisasi		97.9%	97.9%		97.9%	93.30%	93.30%	
Indeks Capaian		105	105		105		100.32%	

Sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.12, nilai realisasi tahunan IKU sebesar 93.30% tersebut melampaui target IKU sebesar 93% dengan indeks capaian 100.32%.

	Isu, permasalahan, tantangan, dan tindakan, serta analisis pelaksanaan rencana aksi dan mitigasi risiko	Komunikasi dan edukasi dalam rangka meningkatkan kompetensi stakeholders atas peraturan dan kebijakan di bidang perbendaharaan untuk memperkuat implementasi peraturan dan kebijakan sehingga tercapai kualifikasi kompetensi yang dipersyaratkan pada para pengelola perbendaharaan yang dilaksanakan melalui aplikasi Simaspaten. Kualifikasi kompetensi para pengelola perbendaharaan dimaksud dilaksanakan melalui program pengembangan kapasitas, uji kompetensi, dan sertifikasi kompetensi yang dilaksanakan pada

		aplikasi Simaspaten melalui koordinasi kantor pusat DSP kepada KPPN sebagai pembina satuan kerja di daerah Adapun langkah-langkah yang telah dilaksanakan antara lain: 1. Melaksanakan sosialisasi/Bimtek Sertifikasi Pengelola Perbendaharaan. 2. Segera memproses dan melakukan verifikasi atas usulan calon peserta yang memiliki status ”Siap Verifikasi Unit Pelaksana” dan ”Pengajuan Ulang ke Unit Pelaksana 3. Mendorong user Admin Satker untuk segera memproses dan melakukan verifikasi atas usulan calon peserta yang memiliki status ”Siap Verifikasi Admin Satker” dan ”Pengajuan Ulang ke Admin Satker 4. Mendorong user Peserta yang memiliki status ”Cek Kelengkapan” dan ”Perlu Perbaikan Data” untuk segera melengkapi berkas persyaratan dan mengajukan berkas tersebut melalui aplikasi Simaspaten 5. Menyelenggarakan diklat Penyegaran (Refreshment) PPK, Penyegaran (Refreshment) PPSPM, dan Tagihan bersama dengan Kanwil DJPb Provinsi Kalbar
	Analisis penyebab	Partisipasi satker mengikuti penilaian kompetensi bagi pejabat perbendaharaan masih rendah
	Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya	Efisiensi pelaksanaan anggaran KPPN Sanggau untuk tahun 2023 sudah baik, terbukti dengan capaian efisiensi sebesar 20 dari batas nilai antara -20 sampai dengan 20 dan nilai efisiensi sebesar 100.
	Capaian inisiatif strategis untuk mendukung pencapaian IKU	Telah dilaksanakan *High Level Meeting* Pejabat Perbendaharaan pada Satuan Kerja Lingkup KPPN Sanggau sesuai dengan Undangan Nomor UND-38/KPN.1703/2023 tanggal 14 Agustus 2023.
	Rencana aksi masa depan	- Melakukan sosialisasi kepada satuan kerja mengenai kewajiban sertifikasi pejabat pengelola perbendaharaan. - Segera memproses dan melakukan verifikasi atas usulan calon peserta yang memiliki status ”Siap Verifikasi Unit Pelaksana” dan ”Pengajuan Ulang ke Unit Pelaksana”. - Mendorong user Admin Satker untuk segera memproses dan melakukan verifikasi atas usulan calon peserta yang memiliki status ”Siap Verifikasi Admin Satker” dan ”Pengajuan Ulang ke Admin Satker”. - Mendorong user Peserta yang memiliki status ”Cek Kelengkapan” dan ”Perlu Perbaikan Data” untuk segera melengkapi berkas persyaratan dan mengajukan berkas tersebut melalui aplikasi Simaspaten
3b-N	**Tingkat efektivitas edukasi di bidang pengelolaan perbendahaaan**	Salah satu Tugas Pokok Pembina Teknis Perbendaharaan Negara Terampil sesuai dengan PermenPANRB 51/2018 adalah melaksanakan kegiatan pembinaan/bimbingan teknis di bidang perbendaharaan kepada customer. Tingkat pemahaman customer merupakan tingkat daya tangkap peserta (customer) terhadap segala materi yang diberikan pada pelatihan teknis (bimtek atau yang dipersamakan dengan itu). Tolok ukur hasil pelatihan teknis didasarkan pada peningkatan pemahaman peserta atas materi yang diberikan dalam pelatihan untuk satu periode. Ruang lingkup pelatihan teknis meliputi semua kegiatan pembinaan yang diselenggarakan oleh KPPN. Kegiatan bimtek/sosialisasi diukur dengan post test dan kuesioner. Dalam hal tidak terdapat kegiatan bimtek/sosialisasi dalam satu semester, maka capaiannya adalah N/A. total nilai efektivitas edukasi dan komunikasi dibobot sebagai berikut: hasil post test 60% sedangkan hasil kuesioner 40%

	Cara ukur / formula	Indeks Tingkat Efektifitas Edukasi di bidang pengelolaan perbendaharaan ((60% hasil post test + 40% hasil kuesioner)) 0 < x ≤ 20 = tidak efektif 20 < x ≤ 40 = kurang efektif 40 < x ≤ 60 = cukup efektif 60 < x ≤ 80 = efektif 80 < x ≤ 100 = sangat efektif
	Target tahun 2023	Target IKU tersebut untuk tahun 2023 adalah sebesar 89% sebagaimana ditetapkan dalam Kontrak Kinerja Kemenkeu-*Three* KPPN Sanggau Tahun 2023. Target tersebut meningkat dari tahun 2022 sebesar 88.5%
	Realisasi tahun 2023	Indeks efektivitas edukasi di bidang pengelolaan perbendaharaan tahun 2023 yaitu sebesar 95.48%.
	Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya	Efisiensi pelaksanaan anggaran KPPN Sanggau untuk tahun 2023 sudah baik, terbukti dengan capaian efisiensi sebesar 20 dari batas nilai antara -20 sampai dengan 20 dan nilai efisiensi sebesar 100.
	Perhitungan / penjelasan perolehan	Indeks Tingkat Efektifitas Edukasi di bidang pengelolaan perbendaharaan tahun 2023 sebesar 95.48% berdasarkan hasil perhitungan post test dan hasil kuesioner pada saat pelaksanaan sosialisasi Implementasi Aplikasi SAKTI
	Perbandingan antara target dan realisasi tahun 2023	**TABEL 3.13** Capaian IKU Tingkat efektifitas edukasi di bidang pengelolaan perbendaharaan Tahun 2023 Target/ Realisasi | Trw I | Trw II | Smt I | Trw III | s.d. Trw III | Trw IV | Tahunan | Pol /KP Target | - | 89 | 89 | - | 89 | 89 | 89 | Maximize / *Average* Realisasi | - | 96.1 | 96.1 | - | 96.1 | 96.20 | 96.20 Indeks Capaian | - | 105% | 105% | - | 105% | | 108.09% Sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.13, nilai realisasi tahunan IKU sebesar 95.48 tersebut melampaui target IKU sebesar 89.00 dengan indeks capaian 108.09%.
	Perbandingan antara capaian kinerja tahun 2023 dengan beberapa tahun terakhir	Perkembangan Indeks efektifitas edukasi dan komunikasi dari tahun 2018 s.d 2023 ditunjukkan pada Tabel 3.14. dan Grafik 3.5. **TABEL 3.14** Perkembangan Indeks Tingkat Efektifitas Edukasi di Bidang Pengelolaan PerbendaharaanTahun 2018-2023 Opini | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 Target | 85 | 86 | 87 | 87,5 | 88,5 | 89 Realisasi | 86,68 | 88,46 | 94,50 | 93,64 | 97,28 | 96.20 Nilai | **100,80%** | **102,86%** | **108,62%** | **107,02%** | **109,92%** | **108.09%**

GRAFIK 3.5
Perkembangan Indeks Tingkat Efektifitas Edukasi di Bidang Pengelolaan PerbendaharaanTahun 2018-2023

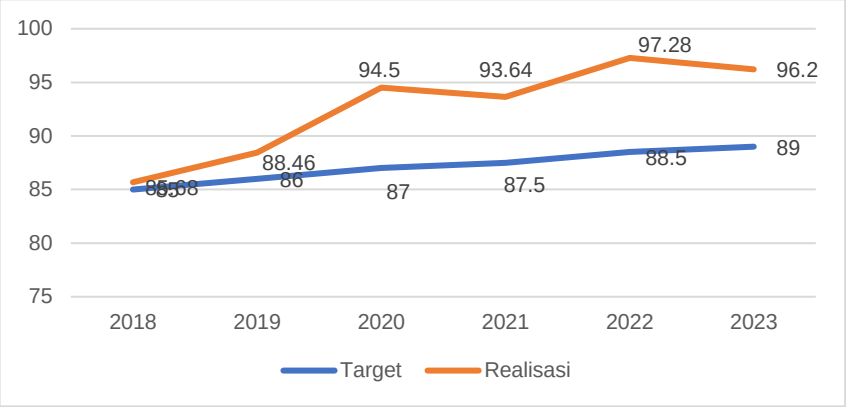

Sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.14 dan Grafik 3.5, Indeks tingkat Efektifitas Edukasi di Bidang Pengelolaan Perbendaharaan Tahun 2023 meningkat sampai dengan tahun 2020 yakni sebesar 93.64 dan menurun pada tahun 2021 dengan capaian 93.64. Pada tahun 2022 kembali mengalami peningkatan sebesar 97.28, namun pada tahun 2023 mengalami penurunan Kembali sebesar 1.8 poin atau sebesar 95.48. Pencapaian tertinggi sejak 5 tahun terakhir yaitu pada tahun 2022 sebesar 97.28.

	Isu, permasalahan, tantangan, dan tindakan, serta analisis pelaksanaan rencana aksi dan mitigasi risiko	Kompetensi pengelola keuangan satuan kerja menjadi sangat penting di dalam mendukung pelaksanaan pengelolaan keuangan negara. Pada saat ini, sebagian besar satuan kerja belum memiliki pejabat fungsional pengelolaan keuangan JF PK APBN dan JF APK APBN. Implikasinya kualitas pengelolaan keuangan negara belum optimal. Adapun tindakan yang telah dilakukan antara lain: 1. Menyampaikan sosialisasi/pendampingan kepada satker mengenai bidang pengelolaan perbendaharaan 2. melakukan monitoring dan mendorong satker untuk memiliki pejabat fungsional pengelolaan keuangan JF PK APBN dan JF APK APBN
	Analisis penyebab	Kesadaran SDM pada satuan kerja untuk meningkatkan kompetensi termasuk berperan sebagai pejabat fungsional APK APBN dan PK APBN masih rendah (dari 67 satker terdapat 12 satker yang mempunyai JF).
	Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya	Efisiensi pelaksanaan anggaran KPPN Sanggau untuk tahun 2023 sudah baik, terbukti dengan capaian efisiensi sebesar 20 dari batas nilai antara -20 sampai dengan 20 dan nilai efisiensi sebesar 100.
	Rencana aksi masa depan	1. Selalu mendorong satuan kerja untuk meningkatkan kompetensi pengelola keuangan baik melalui jabatan fungsional maupun kegiatan bimbingan teknis, one on one meeting, dan lain-lain. 2. Membuat konten edukasi terkait pengelolaan perbendaharaan (podcast/medsos)

4.	**Sasaran Strategis**	Pengelolaan pengeluaran negara yang *prudent,* efektif dan efisien diwujudkan dengan menjaga pengeluaran negara yang dilakukan Kementerian Negara/Lembaga dengan penuh kehati-hatian, agar setiap Rupiah yang keluar dari kas negara dapat dipertanggungjawabkan serta memberi *multiplier effect* terhadap seluruh perekonomian Indonesia. Tata cara pengelolaan pengeluaran negara secara efektif dan efisien dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan serta memperhatikan prioritas dan tujuan nasional.
	Pengelolaan Pengeluaran Negara yang Prudent, Efektif dan Efisien	
	TABEL 3.15 Capaian IKU pada Sasaran Strategis Pengelolaan Pengeluaran Negara yang Prudent, Efektif dan Efisien	**SS 4: Pengelolaan Pengeluaran Negara yang Prudent, Efektif dan Efesien**

Kode	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Nilai
4a-CP	Persentase akurasi perencanaan kas	80%	98.53%	120%
4b-N	Tingkat Kualitas Penyelesaian SP2D	3.00	4.72	120%

Uraian mengenai IKU tersebut adalah sebagaimana berikut:

4a-CP	**Persentase akurasi perencanaan kas**	Perencanaan Kas (Renkas) KPPN yang diperoleh dari RPD harian tingkat Satker serta pemutakhirannya yang disampaikan kepada Kepala KPPN oleh KPA secara otomatis melalui aplikasi SAKTI menggunakan fitur *Scheduled Payment Date*. Perencanaan Kas KPPN dinyatakan akurat apabila deviasi tagihan atas RPD Harian satker berada dalam batas kewajaran sebagaimana ditentukan dalam target IKU. Deviasi yang diperhitungkan adalah deviasi unit tagihan dan deviasi nilai tagihan yang masing-masing mempunyai bobot yang ditentukan. Pemberian dispensasi RPD, baik nilai maupun waktu, tetap diperhitungkan dalam formulasi akurasi RPD Harian dengan menggunakan rasio pemberian dispensasi terhadap total RPD Harian pada suatu periode. Persentase RPD Harian dengan *Scheduled Payment Date* yang akurat adalah selisih antara akurasi maksimal (100%) dengan rata - rata tingkat deviasi seluruh tagihan pada periode tertentu dengan memperhitungkan tingkat dispensasi sebagai faktor pengurang.
	Cara ukur / formula	(((100% - ((Rata - Rata Deviasi Unit RPD harian KPPN per periode*0,3) + ((Rata - Rata Deviasi Nilai RPD harian KPPN per periode*0,7))) - (Rasio Dispensasi RPD harian KPPN per periode*0,01)) Keterangan: 1. Data perhitungan deviasi hanya menggunakan data tagihan yang memiliki Scheduled Payment Date 2. RPD manual yang disampaikan oleh Satker akses langsung SPAN dikecualikan dari perhitungan. 3. Perhitungan deviasi diperoleh dari Aplikasi MONSAKTI. 4. Pengukuran capaian di triwulan I hanya berdasarkan hasil capaian deviasi pada bulan Maret 2023.
	Target tahun 2023	Target IKU tersebut untuk tahun 2023 adalah sebesar 80.00% sebagaimana ditetapkan dalam Kontrak Kinerja Kemenkeu-*Three* KPPN Sanggau Tahun 2023. IKU ini merupakan IKU baru tidak memilliki data historis.
	Realisasi tahun 2023	Persentase akurasi perencanaan kas tahun 2023 yaitu sebesar 98.53%. Persentase tersebut melampaui target sebesar 80.00%.

	Perhitungan / penjelasan perolehan	Data diperoleh dari Aplikasi Mon SAKTI.
	Perbandingan antara target dan realisasi tahun 2023	**TABEL 3.16** Capaian IKU Persentase akurasi perencanaan kas Tahun 2023

Target/ Realisasi	Trw I	Trw II	Smt I	Trw III	s.d. Trw III	Trw IV	Tahunan	Pol /KP
Target	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	Maximize / *Average*
Realisasi	98.36%	98.46%	98.46%	98.45%	98.45%	98.85%	98.53%	
Indeks Capaian	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%	

Sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.16, nilai realisasi tahunan IKU sebesar 98.53% tersebut melampaui target IKU sebesar 80% dengan indeks capaian 120%.

Perbandingan antara realisasi dan capaian kinerja tahun 2023 dengan capaian kinerja hingga 5 (lima) tahun terakhir

Persentase akurasi perencanaan kas tahun 2023 ditunjukkan pada Tabel 3.17 dan Grafik 3.6.

TABEL 3.17
Perkembangan Persentase akurasi perencanaan kas Tahun 2023

Deskripsi	2023
Target	80%
Realisasi	98.53%
Nilai	**120%**

GRAFIK 3.6
Persentase akurasi perencanaan kas Tahun 2023

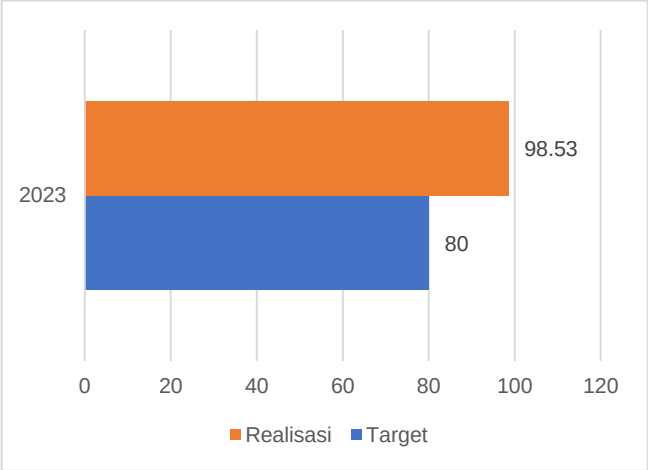

Sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.17 dan Grafik 3.6, Persentase akurasi perencanaan kas mencapai persentase maksimal dengan capaian 120%.

Isu, permasalahan, tantangan, dan tindakan, serta analisis pelaksanaan rencana aksi dan mitigasi risiko

Sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor SE-25/PB/2020 tanggal 16 Maret 2020, pencairan dana dilakukan sesuai dengan RPD yang telah disampaikan oleh satker kepada KPPN. RPD wajib disampaikan kepada KPPN atas SPM dengan nilai lebih besar dari Rp5 Miliyar. Selain itu berdasarkan nota dinas Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor ND-1/PB/PB.3/2023 Rencana Penarikan Dana Harian dilaksanakan dengan mekanisme *schedule payment date* pada aplikasi SAKTI.

Capaian IKI persentase akurasi perencanaan kas berdasarkan nota dinas.

		Berdasarkan ND Direktur PKN No. ND-300/PB.03/2023 tanggal 23 Februari 2023 realisasi Triwulan I 2023 adalah N.A. sedangkan untuk perhitungan capaian pada triwulan II sebesar 98,5% sesuai perhitungan manual IKU. Implementasi *Scheduled Payment Date* berdasarkan sistem pada aplikasi SAKTI masih ada satker yang belum paham bahwa jatuh tempo untuk SPM tertentu adalah 2 hari kerja setelah SPM disetujui. Implikasi apabila tidak dipenuhi maka terdapat deviasi pada transaksi diakhir bulan Adapun tindakan yang telah dilaksanakan antara lain: 1. Menyampaikan *broadcast* melalui media komunikasi yang cepat kepada satker pada setiap awal minggu terakhir bulan mengenai batas akhir penyampaian SPM agar realisasi terhitung pada bulan terkait. 2. Menyampaikan informasi kepada satker adanya perubahan kebijakan terkait mekanisme *schedule payment date* pada aplikasi SAKTI
	Analisis penyebab	Pemahaman beberapa pengelola keuangan satuan kerja masih kurang terkait dengan pencairan dana yang terbentuk secara otomatis melalui aplikasi SAKTI dan mengajukan dispensasi RPD.
	Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya	Efisiensi pelaksanaan anggaran KPPN Sanggau untuk tahun 2023 sudah baik, terbukti dengan capaian efisiensi sebesar 20 dari batas nilai antara -20 sampai dengan 20 dan nilai efisiensi sebesar 100.
	Rencana aksi masa depan	1. Mengingatkan satker agar segera mengirimkan SPM yang sudah mendekati tanggal jatuh tempo tagihan agar segera diterbitkan oleh KPPN menjadi SP2D 2. Menghimbau kepada satker untuk segera melakukan perbaikan atau penghapusan SPM untuk SPM yang dilakukan penolakan pada aplikasi SAKTI
4b-N	Tingkat Kualitas Penyelesaian SP2D	**Komponen A:** SPM Satker yang diproses menjadi SP2D merupakan mekanisme pengujian oleh KPPN yang bersifat formal dan substantif terhadap Surat Perintah Membayar (SPM) yang diajukan oleh Satuan Kerja untuk diterbitkan menjadi SP2D. Penyelesaian SP2D dinyatakan tepat waktu bila memenuhi janji layanan sebagaimana surat Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor S-7283/PB.1/2018. SPM satker yang diproses menjadi SP2D secara tepat waktu diukur berdasarkan jumlah penyelesaian SPM Satker yang diproses oleh Seksi Pencairan Dana untuk selanjutnya diterbitkan SP2D atau approval oleh Seksi Bank SPM yang diproses menjadi SP2D diselesaikan dalam waktu 1 (satu) jam, dengan prasyarat kondisi sebagai berikut: a. Jenis SPM yang masuk adalah UP/GUP/TUP/PTUP dan LS Non Gaji b. ADK SPM masuk ke SPAN pada pukul 08.00 sampai dengan pukul 12.00 waktu setempat. c. Tidak di saat load pekerjaan KPPN sedang tinggi, sebagai contoh pada akhir tahun anggaran, pada saat pengajuan gaji 13, dan pada saat pengajuan pembayaran THR. d. Tidak termasuk SPM dengan penerima >100 e. Data supplier, Kontrak, dan/atau RPD sudah masuk dalam SPM f. Tidak dalam keadaan *force majeur.* **Komponen B:** 1. Efektivitas penyaluran dana SP2D yang akurat KPPN diukur berdasarkan penyaluran dana yang akurat dan kecepatan penyelesaian retur SP2D yang diterbitkan KPPN.

2. Efektivitas penyaluran dana SP2D yang akurat diukur berdasarkan penyaluran dana SP2D yang akurat.
3. Efektivitas penyaluran dana SP2D yang akurat adalah penyaluran dana SP2D kepada para penerima yang tidak di-retur oleh Bank Operasional dan dihitung berdasarkan jumlah penerima pada SP2D yang tidak diretur oleh Bank/Pos Operasional dibandingkan dengan jumlah penerima SP2D yang diterbitkan oleh KPPN (termasuk data penerima pada SP2D Perbaikan retur)

Komponen C:

Efektifitas kecepatan penyelesaian retur SP2D diukur berdasarkan penyaluran dana yang akurat dan kecepatan penyelesaian retur SP2D yang diterbitkan KPPN. Efektivitas kecepatan penyelesaian retur SP2D diukur berdasarkan kecepatan penyelesaian retur SP2D. Retur SP2D adalah penolakan/pengembalian pemindahbukuan dan/transfer pencairan dana APBN dari Bank penerima kepada Bank Operasional karena nama, alamat, nomor rekening, dan/atau nama bank yang dituju tidak sesuai dengan data rekening Bank penerima atau rekening penerima tidak aktif. Kecepatan Penyelesaian Retur yang dilakukan oleh seluruh KPPN di Indonesia untuk meningkatkan pengelolaan pengeluaran APBN dalam rangka meningkatkan pelayanan dengan tepat waktu, tepat jumlah, serta tepat sasaran kepada satuan kerja/stakeholder.

Cara ukur / formula

$$\frac{\text{Capaian Komponen A + Capaian Komponen B + Capaian Komponen C}}{3}$$

Komponen A : Penyelesaian SP2D tepat waktu

$$\frac{\text{∑ SP2D sesuai kriteria yang diterbitkan tepat waktu oleh KPPN}}{\text{∑ SP2D yang seharusnya sesuai kriteria yang diterbitkan oleh KPPN}} \times 100\%$$

Komponen B : Efektivitas Penyaluran Dana SP2D yang akurat

$$\frac{\text{∑ penerima pada SP2D yang diterbitkan - ∑ penerima pada SP2D yang diretur oleh BO}}{\text{∑ penerima pada SP2D yang diterbitkan}} \times 100\%$$

Komponen C : Efektivitas Kecepatan Penyelesaian Retur SP2D

$$\frac{\text{\{[n SP2D-P I1 * 1]+[n SP2D-P I2 * 2]+[n SP2D-P I3 * 3]+[n SP2D-P I4 * 4]+[n SP2D-P I5 * 5]\}}}{\text{'∑n SP2D-P}} \times 100\%$$

Target tahun 2023

Target IKU tersebut untuk tahun 2023 adalah sebesar 3.00, sebagaimana ditetapkan dalam Kontrak Kinerja Kemenkeu-*Three* KPPN Sanggau Tahun 2023. IKU tersebut merupakan IKU baru yang tidak mempunyai data historis.

Realisasi tahun 2023

Realisasi Tingkat kualitas penyelesaian SP2D tahun 2023 yaitu sebesar 4.72. Persentase tersebut telah melampaui target sebesar 3.00.

Perhitungan / penjelasan perolehan

Data diperoleh dari Aplikasi OM SPAN.

Perbandingan antara target dan realisasi tahun 2023

TABEL 3.18
Capaian IKU Tingkat Kualitas penyelesaian SP2D Tahun 2023

Target/ Realisasi	Trw I	Trw II	Smt I	Trw III	s.d. Trw III	Trw IV	Tahunan	Pol /KP
Target	3	3	3	3	3	3	3	Maximize / *Average*
Realisasi	4.52	4.67	4.59	4.67	4.62	5	4.72	

Indeks Capaian							120	

Sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.18, nilai realisasi tahunan IKU sebesar 4.72 tersebut melampaui target IKU sebesar 3 dengan indeks capaian 120%.

Perbandingan antara capaian kinerja tahun 2023 dengan beberapa tahun terakhir

Tingkat kualitas penyelesaian SP2D Tahun 2023 ditunjukkan pada Tabel 3.19 dan Grafik 3.7.

TABEL 3.19
Perkembangan Tingkat Kualitas penyelesaian SP2D Tahun 2023

Deskripsi	2023
Target	3
Realisasi	4.72
Nilai	**120%**

GRAFIK 3.7
Tingkat Kualitas penyelesaian SP2D Tahun 2023

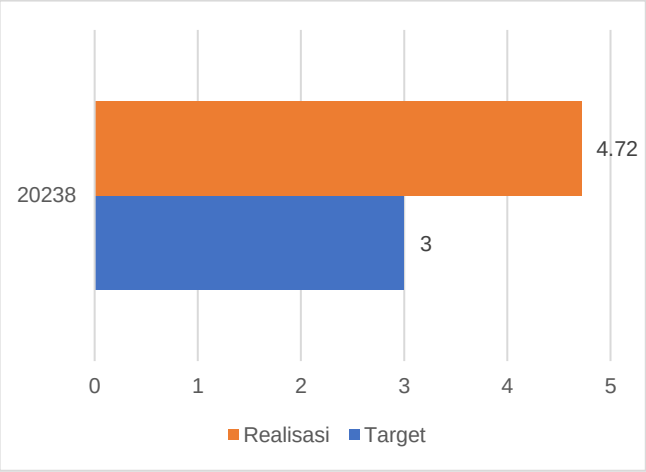

Sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.19 dan Grafik 3.7, Tingkat Kualitas penyelesaian SP2D mencapai realisasi sebesar 4.72 dari target yang sudah ditetapkan sebesar 3.00. IKU inia dalah IKU baru yang tidak mempunyai data historis sehingga perkembangan capaian dari tahun – tahun sebelumnya belum dapat disajikan.

Isu, permasalahan, tantangan, dan tindakan, serta analisis pelaksanaan rencana aksi dan mitigasi risiko

Isu Utama:

1. Pada triwulan IV, layanan yang melebihi satu jam SP2D tidak diperhitungkan dalam formula capaian IKI
2. Pemenuhan janji layanan satu jam mengalami kendala karena Aplikasi SPAN sering lambat/log out saat proses PPR dan terformat saat setuju PPR
3. Implementasi program zero retur sering terkendala karena rekening yang digunakan penerima tidak aktif/terblokir/salah
4. Penolakan SPM disebabkan lampiran SPM belum di TTE sertifikasi, nama pemilik rekening beda dengan data supplier, uraian SPM tidak sesuai dengan jenis belanja, dll.

		Implikasi: 1. Keterlambatan penyaluran dana yg mengakibatkan menurunnya kepercayaan 2. Proses penyelesaian PPR menjadi lebih lama karena harus mengulang dari proses MO Seksi Bank. 3. Akurasi data supplier yang digunakan menentukan apakah SP2D tersebut tuntas atau retur. Adapun tindakan yang telah dilaksanakan antara lain: 1. Menjaga komunikasi dan koordinasi yang baik antara Seksi PDMS dan Seksi Bank, sehingga setelah proses persetujuan SPM pada Kasi PDMS agar dapat dilakukan PPR sesegera mungkin. 2. Meningkatkan prinsip kehati-hatian oleh Validator pada saat mengunggah SPM dan melihat kesiapan dari user SPAN pada Seksi PDMS dan Bank sebelum melakukan proses validasi di SPAN. 3. Membuat checklist waktu pemrosesan untuk setiap SPM dari petugas validator sampai dengan Kepala Seksi Bank yang dibubuhkan pada lembar konversi ADK SPM yang berfungsi sebagai alat kontrol penyelesaian SP2D 1 Jam. 4. Pemrosesan SPM secara bertahap di setiap periode.
	Analisis penyebab	1. Tingkat pemahaman satker yang kurang dalam pengajuan SPM. 2. Satker kurang teliti dalam melakukan perekaman supplier. 3. Terjadinya *maintenance* dan/atau gangguan pada aplikasi Sakti maupun SPAN.
	Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya	Efisiensi pelaksanaan anggaran KPPN Sanggau untuk tahun 2023 sudah baik, terbukti dengan capaian efisiensi sebesar 20 dari batas nilai antara -20 sampai dengan 20 dan nilai efisiensi sebesar 100.
	Rencana aksi masa depan	1. Peningkatan kehati-hatian oleh Validator pada saat mengunggah ADK SPM agar melihat kesiapan dari user SPAN pada Seksi PDMS dan Seksi Bank. 2. Meningkatkan Koordinasi antara Seksi PDMS dan Seksi Bank. 3. Pegawai yang terlibat dalam proses penerbitan SP2D (Seksi PDMS dan Seksi Bank) harus selalu menjaga komunikasi yang baik agar tidak terlambat dalam memproses SPM menjadi SP2D. 4. Penyelesaian pemrosesan SPM dilakukan secara bertahap di setiap periode yang disepakati oleh Seksi PDMS dan Seksi Bank
5.	**Sasaran Strategis** **Pelaksanaan anggaran yang optimal**	Pelaksanaan anggaran yang efektif dan efisien adalah Kemampuan BUN untuk mengawal pelaksanaan kebijakan pelaksanaan anggaran berjalan secara efektif dan efisien dengan memastikan kegiatan pelaksanaan anggaran pada BA Kementerian Negara/Lembaga maupun BA BUN berjalan sesuai dengan ketentuan/kebijakan Pelaksanaan Anggaran.

TABEL 3.20
Capaian IKU pada Sasaran Strategis Pelaksanaan anggaran yang Optimal

SS 5: Pelaksanaan anggaran yang optimal

Kode	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Nilai
5a-CP	Nilai kinerja penyaluran Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa	90.00	99.53	110.59
5b-N	Indeks Implementasi DIgipay	3.10	3.50	112.90

Uraian mengenai IKU tersebut adalah sebagaimana berikut:

5a-CP — **Nilai kinerja penyaluran Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa**

Dalam rangka memastikan pelaksanaan anggaran penyaluran DAK fisik, DAK Nonfisik, dan Dana Desa berjalan dengan efisien dan efektif, diperlukan suatu alat penilaian kualitas/kinerja seluruh stakeholder dalam pelaksanaan anggaran penyaluran DAK Fisik, DAK Nonfisik, dan Dana Desa yang menjadi kewenangan Ditjen Perbendaharaan.

Nilai Kualitas Kinerja penyaluran Dana Transfer ke Daerah pada KPPN diukur dengan menggunakan beberapa variabel sebagai berikut :

1. Ketepatan waktu penyampaian dokumen persyaratan oleh pemda dhi. syarat penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa. (SYARAT)
2. Tingkat akurasi penyusunan proyeksi penyaluran dana Transfer Ke Daerah oleh KPPN. (PROYEKSI)
3. Ketepatan waktu penyelesaian SPP dan SPM penyaluran dana Transfer ke Daerah hingga menjadi SP2D oleh KPPN. (TAGIHAN)
4. Ketepatan waktu penyampaian laporan pemantauan dan evaluasi penyaluran DAK dan Dana Desa. (MONEV)
5. Kelengkapan dan Ketepatan waktu penyampaian LK tingkat UAKPA BUN TKD. (LK-UAKPA)
6. Nilai Penyaluran dana transfer ke daerah dan ketepatan waktu perekaman capaian rincian output Transfer Ke Daerah yang telah memperhitungkan nilai output. (REAL)

Cara ukur / formula

NKP TKDD = [0,10 (SYARAT) + (0,15 (PROYEKSI) + 0,25 (TAGIHAN) + 0,10 (MONEV) + 0,20 (LK-UAKPA) + 0,20 (REAL)] x 100

Target tahun 2023

Target IKU tersebut untuk tahun 2023 adalah sebesar 90 sebagaimana ditetapkan dalam Kontrak Kinerja Kemenkeu-*Three* KPPN Sanggau Tahun 2023.

Realisasi tahun 2023

Nilai Kinerja penyaluran Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun 2023 yaitu sebesar 99.53.

Perhitungan / penjelasan perolehan

Nilai diperoleh dari hasil penilaian Direktorat Pelaksanaan Anggaran, Ditjen Perbendaharaan sesuai dengan Nota Dinas Direktur Pelaksanaan Anggaran Nomor ND-25/PB.2/2024 tanggal 5 Januari 2024.

Perbandingan antara target dan realisasi tahun 2023

TABEL 3.21
Capaian IKU Nilai kinerja Penyaluran Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun 2023

Target/ Realisasi	Trw I	Trw II	Smt I	Trw III	s.d. Trw III	Trw IV	Tahunan	Pol /KP
Target	90	90	90	90	90	90	90	Maximize / *Average*
Realisasi	99.13	99.77	99.45	99.67	99.77	99.54	99.53	
Indeks Capaian	110,14 %	110,85%	110,50%	110,74%	110,85%	110,6%	110,59%	

Sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.21, nilai realisasi tahunan IKU sebesar 99.53 tersebut melampaui target IKU sebesar 90 dengan nilai indeks capaian 110,59%.

Perbandingan antara capaian kinerja tahun 2023 dengan beberapa tahun terakhir

Perkembangan Nilai kinerja penyaluran Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa dari tahun 2018 s.d 2023 ditunjukkan pada Tabel 3.22 dan Grafik 3.8.

TABEL 3.22

Perkembangan Nilai kinerja penyaluran Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun 2018—2023

Opini	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Target	70	75	80	90	90	90
Realisasi	90,42	97,16	98,69	99,33	99,34	99.53
Nilai	**120%**	**120%**	**120%**	**110,37%**	**110,37%**	**110.59%**

GRAFIK 3.8

Perkembangan Nilai kinerja penyaluran Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun 2018—2023

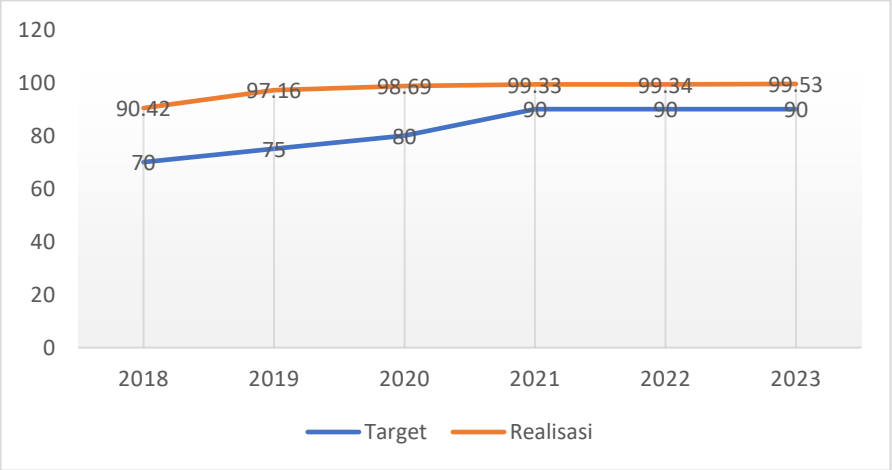

Sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.22 dan Grafik 3.8, Nilai kinerja penyaluran Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pencapaian tertinggi sejak 6 tahun terakhir yaitu pada tahun 2023 sebesar 99.53.

Isu, permasalahan, tantangan, dan tindakan, serta analisis pelaksanaan rencana aksi dan mitigasi risiko

1. Nilai kinerja penyaluran Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa diukur oleh 5 variable, yaitu Ketepatan waktu penyampaian laporan Monev DAK dan Dana Desa; Ketepatan waktu penyampaian dokumen persyaratan oleh Pemda; Tingkat akurasi penyusunan proyeksi penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa; Ketepatan waktu penyelesaian SPP dan SPM; dan Ketepatan waktu penyampaian LK tingkat UAKPA.
2. OPD maupun Desa lambat dalam memenuhi persyaratan penyaluran yang mengakibatkan proses verifikasi oleh BPKAD/DPMD terhambat.

Adapun tindakan yang telah dilaksanakan antara lain:

1. Koordinasi tingkat Pimpinan antara Kepala KPPN dengan Bupati, Kepala Dinas, Kepala Badan, Inspektur Wilayah (Kab. Sanggau, KAb. Landak, dan Kab. Sekadau)
2. Membuka ruang diskusi/bertanya/konsultasi melalui WAG maupun chat/telepon
3. Menyampaikan pemberitahuan update informasi terkait TKD (Penyaluran dan batas-batas waktu).
4. Menyelenggarakan FGD DAK Fisik dan Dana Desa level operator maupun pimpinan OPD.

		5. Menghimbau Pemerintah Daerah untuk mengajukan persyaratan berdasarkan kelengkapan dokumen yang telah diterima dan tidak harus menunggu semuanya lengkap untuk diajukan bersamaan. 6. Berkoordinasi dengan Seksi Bank dan Seksi PDMS apabila penyampaian SPP dan SPM mendekati jam akhir proses penyelesaian SPM. 7. Berkoordinasi dengan kantor pusat terkait jadwal penyusunan LK TKDD. 8. Mempedomani peraturan dan petunjuk teknis terkait penyusunan LK BUN TKDD khususnya menunggu arahan dari kantor pusat terkait jadwal penyusunan LK TKDD.
	Analisis penyebab	1. Adanya permasalahan internal desa, sehingga realisasi dana desa tidak mencapai target minimal sebagai syarat penyaluran Tahap III. 2. Dinas mengupload dokumen pada aplikasi OMSPAN mendekati batas waktu, sehingga proses reviu APIP tidak dapat dilakukan, sehingga diputuskan oleh Pemda untuk tidak dilanjutkan proses. 3. Gangguan/melambatnya Aplikasi OMSPAN TKD di hari terakhir tahun anggaran 4. Penyampaian LK TKDD terlambat atau terdapat kesalahan minor karena proses yang manual. Berdasarkan hasil analisis internal KPPN nilai kualitas penyampaian LK dipengaruhi oleh subjektivitas penilai di Direktorat Pelaksanaan Anggaran. 5. Laporan monev TKDD terlambat dikerjakan karena terdapat rutinitas dan *deadline* lainnya. Untuk mendapatkan nilai maksimal ketepatan waktu penyampaian monev harus dikirimkan 4-5 HK sebelum batas waktu.
	Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya	Efisiensi pelaksanaan anggaran KPPN Sanggau untuk tahun 2023 sudah baik, terbukti dengan capaian efisiensi sebesar 20 dari batas nilai antara -20 sampai dengan 20 dan nilai efisiensi sebesar 100.
	Capaian inisiatif strategis untuk mendukung pencapaian IKU	Telah dilaksanakan FGD Penyaluran Transfer Dana ke Daerah dan Dana Desa dengan tiga kabupaten, yaitu Kabupaten Sanggau, Kabupaten Sekadau dan Kabupaten Landak.
	Rencana aksi masa depan	1. Menyelenggarakan FGD DAK Fisik dan Dana Desa 2 kali, secara tematik/spesifik permasalahan yang muncul. 2. Monitoring penyaluran dan syarat melalui OMSPAN. 3. Menyampaikan batas-batas penyampaian syarat melalui WAG. 4. Menyusun Renkas/RPD secara akurat. 5. Melakukan pemeriksaan LK dan Laporan Monev dengan lebih teliti dan lebih awal guna verifikasi keakurasian data serta memenuhi target waktu yang telah ditetapkan. 6. Koordinasi internal Tim Pengelola TKDD KPPN Sanggau agar SPM terbit sesuai rencana 7. Pembuatan Laporan Monev Triwulan IV.

5b-N	**Indeks Kualitas Implementasi digipay**	Implementasi Digipay diukur dari progres capaian implementasi Digipay Satu dalam rangka penggunaan Uang Persediaan yang bersumber dari Rupiah Murni dan/atau PNBP. Pelaksanaan Digipay diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-7/PB/2022 dan aturan/kebijakan teknis yang diterbitkan Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktorat Pengelolaan Kas Negara, antara lain Surat Direktur PKN Nomor ND-1209/PB.3/2021 tanggal 30 Juli 2021, ND-221/PB.3/2022 tanggal 10 Februari 2022 dan ND-315/PB.3/2023 tanggal 27 Februari 2023. Capaian implementasi Digipay diukur dalam 3 parameter yaitu capaian jumlah satker, jumlah vendor, dan jumlah transaksi.
	Cara ukur / formula	**Indeks Implementasi Digipay =** (Indeks Capaian Komponen Satker x 30%) + (Indeks Capaian Komponen Vendor x 10%) + (Indeks Capaian Komponen Transaksi x 60%) Indeks Capaian Komponen (Satker/Vendor/Transaksi): a. Indeks 4 (Sangat baik) jika capaian komponen (Satker/Vendor/Transaksi) >=70% b. Indeks 3 (Baik) jika capaian komponen (Satker/Vendor/Transaksi) 50 >= x < 70 c. Indeks 2 (Cukup) jika capaian komponen (Satker/Vendor/Transaksi) 30 >= x < 50 d. Indeks 1 (Kurang) jika capaian komponen (Satker/Vendor/Transaksi) < 30
	Target tahun 2023	Target IKU ini pada tahun 2023 adalah sebesar 3.10 sebagaimana ditetapkan dalam Kontrak Kinerja Kemenkeu-*Three* KPPN Sanggau Tahun 2023.
	Realisasi tahun 2023	Indeks Kualitas Implementasi Digipay tahun 2023 yaitu 3.50
	Perhitungan / penjelasan perolehan	Sumber data berasal dari Data capaian satker, vendor, dan transaksi pada Dashboard Aplikasi Digipay
	Perbandingan antara target dan realisasi tahun 2023	**TABEL 3.23** Capaian IKU Indeks Kualitas Implementasi Digipay Tahun 2023

Target/ Realisasi	Trw I	Trw II	Smt I	Trw III	s.d. Trw III	Trw IV	Tahunan	Pol /KP
Target	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	Maximize / *Average*
Realisasi	2.2	4	3.1	3.9	3.36	3.9	3.5	
Indeks Capaian	71%	129%	100%	126%	93%	126%	112.90%	

Sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.23, nilai realisasi tahunan IKU sebesar 3.5 tersebut melampaui target IKU sebesar 3.1 dengan indeks capaian 112.90%.

	Perbandingan antara capaian kinerja tahun 2023 dengan beberapa tahun terakhir	Perkembangan capaian IKU Indeks Kualitas Implementasi Digipay dari tahun 2022 s.d. 2023 ditunjukan pada Tabel 3.24 dan Grafik 3.9

TABEL 3.24

Perkembangan IKU Indeks Kualitas Implementasi Digipay Tahun 2022 - 2023

Uraian	2022	2023
Target	3	3.1
Realisasi	3.8	3.5
Nilai	**120%**	**112.90%**

GRAFIK 3.9
Perkembangan IKU Indeks Kualitas Implementasi Digipay Tahun 2022 - 2023

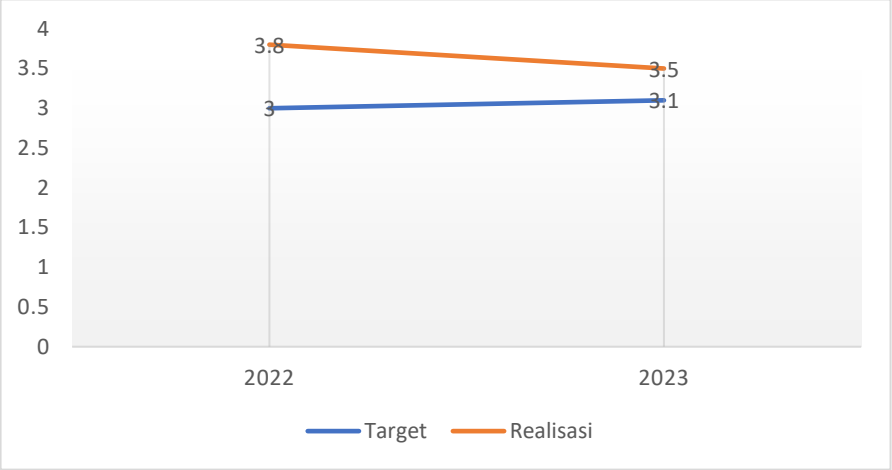

Sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.24 dan Grafik 3.9, capaian indeks kualitas implementasi digipay tahun 2023 sebesar 112.90% mengalami penurunan sebanyak 7.1% dibanding capaian pada tahun 2022 yang sebesar 120%.

Isu, permasalahan, tantangan, dan tindakan, serta analisis pelaksanaan rencana aksi dan mitigasi risiko

KPPN Sanggau sebagai Kuasa BUN turut mendukung percepatan ekonomi digital melalui implementasi *platform* Digipay dalam pengadaan barang/jasa pada satuan kerja. Kinerja implementasi Digipay diukur melalui 3 parameter yaitu capaian jumlah satker, jumlah vendor, dan jumlah transaksi yang dilakukan melalui *Platform* Digipay. Langkah-langkah yang telah dilaksanakan meliputi:

1. Pada semester I 2023:
   a. Menyelenggarakan *one on one meeting* terkait penggunaan *platform* Digipay dengan beberapa satuan kerja yang mengelola dana Uang Persediaan.
   b. Melakukan koordinasi dengan KPA Polres Sanggau, Polres Landak, dan Polres Sekadau.
   c. Menyelenggarakan kegiatan SAMER yang merupakan inovasi KPPN Sanggau untuk mengajak seluruh satker pengelola Uang Persediaan untuk menggunakan platform Digipay dengan kegiatan berupa pendampingan secara langsung kepada satker. Satker yang menjadi sasaran pendampingan meliputi Kanim Sanggau, Kantah Sanggau, PN Sanggau, MTsN 3 Sanggau, BPS Landak, Polres Landak, Kantah Sekadau, Kemenag Sanggau);
   d. Menyelenggarakan kegiatan SAMER untuk merekrut vendor. Kegiatan yang dilakukan adalah dengan mendatangi langsung vendor untuk dilakukan aktivasi, dimana sebelumnya telah dilakukan sosialisasi. Kegiatan ini berhasil merekrut 6 vendor dari 9 vendor yang direncanakan;
   e. Menyelenggarakan sosialisasi tahap awal Implementasi Digipay Satu, sosialisasi penggunaan CMS/KKP kepada seluruh satker;
   f. Mengikuti kegiatan *joint program* UMKM Kemenkeu Satu dan sosialisasi transaksi digipay pada wilayah entikong;
2. Pada semester II 2023:
   a. Menyelenggarakan kegiatan SAMER berupa pendampingan transaksi Digipay dengan mendatangi satker Kanim Sanggau, BPS Sanggau, Kemenag Sekadau, BPS Sekadau, PN Landak, KPU Landak, Rutan Landak;

		b. Membuat berbagai media edukasi Digital Payment melalui JEKPOD yang diupload pada media sosial *youtube* KPPN Sanggau, penyampaian booklet/video panduan penggunaan CMS melalui surat; c. Melakukan reviu implementasi penggunaan CMS lingkup Kabupaten Landak; d. Menyelenggarakan kegiatan monev implementasi Digipay pada satker KKP Entikong, KPP BC Entikong, RRI Entikong, Kejari Sekadau, Kemenag Sekadau, BPS Sekadau, BPS Sanggau, BPS Landak, Kantah Landak, dan Polres Sekadau. e. Sosialisasi dan asistensi dalam perekaman dan aktivasi user marketplace satker dan vendor. f. Melakukan perekrutan vendor g. Menyelenggarakan kegiatan *one on one meeting* dalam rangka mendorong satker segera mempersiapkan/mengajukan tools pembayaran untuk melakukan transaksi belanja uang persediaan melalui Digipay
	Analisis penyebab	1. Ekosistem Digital Ekonomi pada pengadaan barang/jasa pemerintah di wilayah kerja KPPN Sanggau belum terbentuk secara lengkap. Terutama jumlah vendor yang tergabung dalam *platform* Digipay masih terbatas 2. Pemahaman pengelola keuangan pada Satuan Kerja masih minim dan belum termotivasi untuk berbelanja melalui Digipay . 3. Penyedia Barang/Jasa (Vendor) lebih memilih bertransaksi menggunakan *cash* dan memandang penggunaan *platform* Digipay tidak memberikan manfaat yang signifikan terhadap penjualan mengingat sebagian besar pembeli sudah berbelanja dengan pembayaran *cash*. 4. Terbatasnya potensi konsumen yang akan berbelanja menggunakan DIgipay membuat vendor enggan untuk bergabung. 5. Beberapa vendor yang menjadi lengganan satuan kerja, tidak didukung dengan pepralatan elektronik seperti laptop dan computer. 6. Keterbatasan waktu dan SDM dalam memberikan edukasi serta pendampingan untuk penggunaan platform Digipay yang berdampak pada lambatnya tingkat pemahaman masyarakat (satker/vendor).
	Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya	Efisiensi pelaksanaan anggaran KPPN Sanggau untuk tahun 2023 sudah baik, terbukti dengan capaian efisiensi sebesar 20 dari batas nilai antara -20 sampai dengan 20 dan nilai efisiensi sebesar 100.
	Capaian inisiatif strategis untuk mendukung pencapaian IKU	1. Telah dilakukan pendampingan dan bimbingan teknis penggunaan Digipay pada Satuan Kerja Lingkup KPPN Sanggau. 2. Melakukan inventarisasi penggunaan CMS pada Satuan Kerja Lingkup KPPN Sanggau sebagai langkah awal dalam penggunaan Digipay. 3. Koordinasi Percepatan Implementasi Digipay dan KKP dengan Bank Mandiri, Bank BRI dan satuan kerja lingkup KPPN Sanggau.
	Rencana aksi masa depan	1. Melakukan edukasi kepada satker agar dapat menjadikan mekanisme pengadaan barang/jasa melalui *platform Digipay* sebagai sarana belanja yang dananya bersumber dari Uang Persediaan.

2. Melakukan sosialisasi dan pendampingan kepada vendor agar dapat memahami dan terbiasa menggunakan platform *Digipay* untuk melayani satuan kerja pemerintah.
3. Memberikan apresiasi kepada satuan kerja dan vendor yang telah bergabung dan memiliki transaksi dalam platform Digipay.

6. Sasaran Strategis

Pertanggungjawaban Keuangan Negara yang Transparan dan Akuntabel

Akuntabilitas dan transparansi pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara diwujudkan dengan penyusunan laporan keuangan oleh Pemerintah Pusat. Penyusunan laporan keuangan Pemerintah harus disusun secara profesional dan modern. Kualitas laporan keuangan Pemerintah dapat diidentifikasi dari ketepatan waktu penyelesaian LKPP, penyelesaian rekomendasi BPK, serta opini audit yang baik dari BPK.

TABEL 3.25
Capaian IKU pada Sasaran Strategis Pertanggungjawaban Keuangan Negara yang Transparan dan Akuntabel

SS 6: Pertanggungjawaban Keuangan Negara yang Transparan dan Akuntabel

Kode	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Nilai
6a-CP	Indeks Kualitas Pelaksanaan Rekonsiliasi tingkat UAKPA	3,25	4	120%
6b-N	Indeks Kualitas Laporan Pertanggungjawaban Bendahara K/L	3	4	120%

Uraian mengenai IKU tersebut adalah sebagaimana berikut:

6a-CP Indeks Kualitas Pelaksanaan Rekonsiliasi tingkat UAKPA

Kepatuhan satker dalam melakukan rekonsiliasi dan menjaga kualitas data laporan keuangan, diukur melalui aplikasi MonSAKTI, meliputi kelengkapan data dan penyelesaian transaksi serta rekonsiliasi ekternal UAKPA.

Realisasi IKU dihitung berdasarkan:

Kelengkapan Data dan Penyelesaian Transaksi

Pada Aplikasi MonSAKTI terdapat fitur *to do list* yang menampilkan data dan transaksi terkait pelaporan keuangan yang harus diselesaikan satker setiap periode rekonsiliasi, terdiri dari:

1. Persediaan/Aset belum didetilkan
2. RK Persediaan/Aset belum RM
3. Persediaan/Aset belum validasi approve Capaian kelengkapan data dan penyelesaian transaksi diperoleh dari jumlah satker yang terbebas dari validasi *todolist* sebagaimana dimaksud.

Rekonsiliasi Ekternal:

1. Ketepatan waktu rekonsiliasi
   Perbandingan jumlah Satker yang melakukan rekonsiliasi laporan keuangan secara tepat waktu dengan jumlah satker yang wajib melakukan rekonsiliasi laporan keuangan (dihitung berdasar jumlah satker yang mendapatkan SHR tidak kena sanksi pada periode rekonsiliasi berkenaan)
2. Keandalan rekonsiliasi
   Perbandingan jumlah satker yang melakukan rekonsiliasi laporan keuangan secara andal, dengan jumlah satker yang wajib melakukan rekonsiliasi laporan keuangan Keandalan data dihitung berdasarkan jumlah satker yang tidak memiliki TDK (Transaksi Dalam Konfirmasi) belanja bruto dan TDK Kas di Bendahara Pengeluaran (ambang batas suspen 0%) sesuai dengan SHR (Surat Hasil Rekonsiliasi) yang diterbitkan

Pengisian realisasi IKU disesuaikan dengan siklus dan karakteristik laporan keuangan yang bersifat historical report. Cakupan data setiap triwulan adalah sebagai berikut:

Tw 1 2022 = Des 2022 - Feb 2023

Tw 2 2022 = Mar - Mei 2023

		Tw 3 2022 = Jun - Agt 2023 Tw 4 2022 = Sep - Nov 2023
	Cara ukur / formula	Capaian IKU = (Indeks Kelengkapan Data dan Penyelesaian Transaksi*50%) + (Indeks Pelaksanaan Rekonsiliasi Eksternal*50%)
	Target tahun 2023	Target IKU ini pada tahun 2023 adalah sebesar 3.25 sebagaimana ditetapkan dalam Kontrak Kinerja Kemenkeu-*Three* KPPN Sanggau Tahun 2023.
	Realisasi tahun 2023	Pada tahun 2023 indeks yang dicapai sempurna yaitu 4.
	Perhitungan / penjelasan perolehan	Data diperoleh dari Monitoring Rekonsiliasi pada Aplikasi SAKTI. (MonSAKTI)
	Perbandingan antara target dan realisasi tahun 2023	**TABEL 3.26** Capaian IKU Indeks Kualitas Pelaksanaan Rekonsiliasi Tingkat UAKPA Tahun 2023 Sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.26, nilai realisasi tahunan IKU mencapai indeks 4 tersebut melampaui target IKU sebesar 3,25% dengan indeks capaian 120%.

Target/ Realisasi	Trw I	Trw II	Smt I	Trw III	s.d. Trw III	Trw IV	Tahunan	Pol /KP
Target	3,25	3,25	3,25	3,25	3,25	3,25	3,25	Maximize / *Average*
Realisasi	4	4	4	4	4	4	4	
Indeks Capaian	120	120	120	120	120	120	120	

	Perbandingan antara target dan realisasi tahun 2023	Capaian tersebut belum memiliki data historis karena merupakan IKU baru.
	Isu, permasalahan, tantangan, dan tindakan, serta analisis pelaksanaan rencana aksi dan mitigasi risiko	Penerapan Surat Hasil Rekon (SHR) terbit dengan tiga syarat yaitu, bebas to do list, bebas TDK serta tutup buku menjadi tantangan utama rekonsiliasi. Ketentuan terkait rekonsiliasi yang sebelumnya hanya terdapat syarat bebas TDK, semakin meningkat kualitasnya dengan tambahan dua syarat lainnya. Hal ini berimbas pada partisipasi satker dalam penyelesaian to do list serta kepatuhan dalam melakukan tutup buku secara tepat waktu. **Formula Capaian IKU:** (Indeks Kelengkapan Data dan Penyelesaian Transaksi*50%) + (Indeks Pelaksanaan Rekonsiliasi Eksternal*50%) Capaian pada Triwulan IV sudah mendapat realisasi 4 dengan target 3,25 dengan rincian: • Kelengkapan data dan penyelesaian transaksi sudah di atas target. Indeks capaian 4 (persentase kelengkapan data bebas to do list di antara 81%-100%) • Keandalan rekonsiliasi eksternal sudah maksimal dimana semua satker terbit SHR tepat waktu. Indeks capaian 4 (100% satker terbit SHR) Adapun tindakan yang telah dilaksanakan antara lain: 1. Menyampaikan pemberitahuan kepada satker tentang jadwal open periode dan close periode rekonsiliasi 2. Berkomunikasi dan melakukan pendampingan agar rekonsiliasi sudah selesai sebelum batas close periode 3. Sosialisasi/bimtek ke satker terkait Migrasi SAKTI dan Update aplikasi dalam penyusunan LK Audited 4. Telah dilakukan Pendampingan penyelesaian TO DO list di periode Audited

		5. Telah dilaksanakan Sosialisasi Perdirjen nomor PER-8/PB/2023 pada satuan kerja
	Analisis penyebab	1. Sebagian besar satuan kerja melakukan rekonsiliasi di penghujung batas waktu karena keterbatasan pegawai di satker atau kendala internal lainnya di satker. Hal ini menyebabkan terjadi penumpukan pekerjaan pada akhir batas rekonsiliasi. 2. Masih sedikit satuan kerja yang melakukan rekonsiliasi mandiri sehingga maksud dari menu *To Do list* pada MONSAKTI baru ditindaklanjuti ketika masuk periode rekon 3. Satker melakukan proses tutup buku mendekati deadline dikarenakan menjaga transaksi lain yang belum direkam, hal ini menyebabkan kerentanan terhadap penerbitan SHR secara tepat waktu
	Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya	Efisiensi pelaksanaan anggaran KPPN Sanggau untuk tahun 2023 sudah baik, terbukti dengan capaian efisiensi sebesar 20 dari batas nilai antara -20 sampai dengan 20 dan nilai efisiensi sebesar 100.
	Capaian inisiatif strategis untuk mendukung pencapaian IKU	1. KPPN Sanggau telah menyampaikan surat pemberitahuan terkait pelaksanaan rekonsiliasi eksternal dan Penyusunan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023 2. Pelaksanaan Kegiatan Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan Semester I Tahun Anggaran 2023 menggunakan Aplikasi SAKTI
	Rencana aksi masa depan	1. Menyampaikan pemberitahuan kepada satker tentang jadwal *open periode* dan *close periode* rekonsiliasi 2. Asistensi dan pendampingan agar rekonsiliasi sudah selesai sebelum batas *close periode*. 3. Sosialisasi rekonsiliasi dan refreshment terkait Monitoring dan Kualitas Data LK sesuai PER-8/PB/2023 untuk wilayah Sanggau dan Sekadau. 4. Memberikan reward atau apresiasi kepada satker yang melakukan rekonsiliasi paling awal
6b-N	**Indeks Kualitas Laporan Pertanggungjawaban Bendahara K/L**	Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Bendahara merupakan bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara oleh Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola APBN yang menggunakan aplikasi pengelolaan rekening yang dikembangkan oleh Kementerian Keuangan c.q. DJPb. Berdasar Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-3303/PB/2018, pengelolaan rekening tersebut menggunakan aplikasi SPRINT (Sistem Pengelolaan Rekening Terintegrasi) sejak 2018. Sebagaimana ketentuan Pasal 42 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.05/2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.05/2016 tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola APBN, penyampaian LPJ bendahara beserta lampirannya kepada KPPN dilaksanakan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setelah bulan yang bersangkutan berakhir. LPJ Bendahara dinyatakan andal jika LPJ tersebut telah diverifikasi dan dinyatakan benar oleh Kuasa BUN KPPN sesuai indikator verifikasi LPJ yang telah ditetapkan. Pengisian realisasi IKU disesuaikan dengan siklus dan karakteristik penyusunan LPJ Bendahara yang bersifat historical report. Artinya, untuk data realisasi IKU triwulan I tahun 2023 merupakan rata-rata data bulan Desember 2022, bulan Januari dan Februari tahun 2023, begitupun seterusnya

Cara ukur / formula

$$\frac{\sum \text{LPJ Bendahara yang andal dan tepat waktu}}{\sum \text{LPJ Bendahara yang seharusnya disampaikan ke KPPN}} \times 100\ \%$$

Target tahun 2023

Target IKU tersebut untuk tahun 2023 adalah indeks 3 sebagaimana ditetapkan dalam Kontrak Kinerja Kemenkeu-*Three* KPPN Sanggau Tahun 2023. Target tersebut sama dengan tahun 2022 sebesar 98.5% (indeks 3).

Realisasi tahun 2023

Indeks Kualitas Laporan Pertanggungjawaban Bendahara K/L tahun 2023 yaitu sebesar 4.

Perhitungan / penjelasan perolehan

Data diperoleh dari Daftar LPJ Bendahara Penerimaan dan Pengeluaran Aplikasi SAKTI yaitu seluruh Bendahara Satker menyampaikan LPJ yang andal secara tepat waktu.

Perbandingan antara target dan realisasi tahun 2023

TABEL 3.27
Capaian IKU Indeks Kualitas Laporan Pertanggungjawaban Bendahara K/L tahun 2023

Target/ Realisasi	Trw I	Trw II	Smt I	Trw III	s.d. Trw III	Trw IV	Tahunan	Pol /KP
Target	3	3	3	3	3	3	3	Maximize / *Average*
Realisasi	4	4	4	4	4	4	4	
Indeks Capaian	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%	

Sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.27, realisasi tahunan IKU pada tahun 2023 mencapai indeks 4, capaian tersebut melampaui target IKU sebesar 3 dengan indeks capaian 120%.

Perbandingan antara capaian kinerja tahun 2023 dengan beberapa tahun terakhir

Perkembangan Indeks Kualitas Laporan Pertanggungjawaban Bendahara K/L dari tahun 2022 s.d. 2023 ditunjukkan pada Tabel 3.28 dan Grafik 3.10.

TABEL 3.28
Perkembangan Indeks Kualitas Laporan Pertanggungjawaban Bendahara K/L dari tahun 2022 - 2023

Opini	2022	2023
Target	3	3
Realisasi	4	4
Nilai	**120%**	**120%**

GRAFIK 3.10
Perkembangan Indeks Kualitas Laporan Pertanggungjawaban Bendahara K/L dari tahun 2022 - 2023

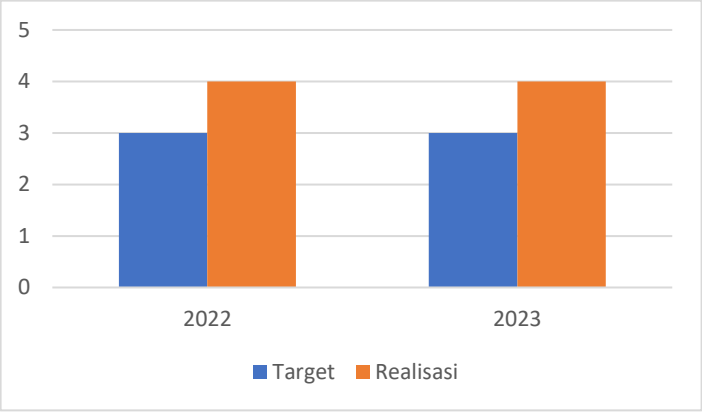

Sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.28 dan Grafik 3.10, capaian Indeks Kualitas Laporan Pertanggungjawaban Bendahara K/L dari tahun 2022 sampai 2023 tidak mengalami kenaikan maupun penurunan.

	Isu, permasalahan, tantangan, dan tindakan, serta analisis pelaksanaan rencana aksi dan mitigasi risiko	Capaian sudah maksimal dengan realisasi 4 dengan target 3, dimana LPJ disampaikan tepat waktu. Beberapa isu dalam pencapaian antara lain: 1. Proses LPJ hingga tahun 2023 masih sama dengan tahun-tahun sebelumnya. Akan tetapi saat ini sudah lebih baik dengan piloting LPJ melalui SAKTI. 2. Isu lainnya adalah masih seringnya satker menyampaikan LPJ di akhir-akhir batas waktu (tanggal 10 bulan berikutnya). 3. Satker masih sering lupa menyertakan nota konfirmasi dan rekening koran 4. Terdapat kendala aplikasi SAKTI dengan adanya piloting sehingga piloting LPJ SAKTI belum dapat diterapkan pada semua satker. Capaian triwulan IV adalah indeks 4 (100% LPJ diterima secara andal dan tepat waktu) Total LPJ bendahara pengeluaran = 65 LPJ/Bulan Total LPJ bendahara penerimaan = 22 LPJ/Bulan Adapun Langkah-langkah yang telah dilaksanakan antara lain: 1. Setiap awal bulan menyampaikan himbauan melalui WA group agar segera meng-upload ADK LPJ di Aplikasi SPRINT/SAKTI 2. Memberitahukan kepada satker apabila terdapat kendala dalam proses penyusunan LPJ dapat menghubungi KPPN untuk diberikan asistensi/pendampingan. 3. Mengingatkan satker melalui surat terkait batas waktu penyampaian LPJ 4. Menyampaikan pengingat kepada satker terkait batas akhir penyampaian LPJ Bendahara 5. Memberikan asistensi kepada satuan kerja apabila terdapat kendala dalam proses penyusunan LPJ 6. Pembuatan inovasi RIAM-LPJ (Rekonsiliasi dan Analisis Mandiri LPJ) untuk memudahkan satker dalam mencari tutorial pembuatan LPJ serta sebagai bank data peraturan terkait LPJ 7. Sebagai persiapan implementasi Validasi LPJ Bendahara melalui SAKTI, telah dilaksanakan Sosialisasi LPJ dengan konsep baru pada satker KPPN Sanggau
	Analisis penyebab	1. Tingkat kepedulian satuan kerja dalam menyampaikan LPJ masih kurang sehingga beberapa satuan kerja mengirimkan ADK LPJ pada aplikasi SPRINT / SAKTI di akhir batas waktu yang ditetapkan, yang berpotensi mengakibatkan keterlambatan apabila terdapat data yang tidak sesuai dan tidak dapat diselesaikan pada hari itu. 2. Terdapat pergantian operator aplikasi SAKTI pada satker tanpa ada *sharing knowledge* dari pendahulunya. 3. Penerapan piloting LPJ SAKTI menyebabkan satker masih sering mengalami kendala. 4. Terdapat beberapa bendahara pengeluaran satker yang masih dalam proses Bendahara Negara Tersertifikasi (BNT)
	Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya	Efisiensi pelaksanaan anggaran KPPN Sanggau untuk tahun 2023 sudah baik, terbukti dengan capaian efisiensi sebesar 20 dari batas nilai antara -20 sampai dengan 20 dan nilai efisiensi sebesar 100.
	Capaian inisiatif strategis untuk mendukung pencapaian IKU	Telah dilaksanakan *One on One Meeting* dengan satker untuk menyelesaikan permasalahan sebagai berikut: 1. Transaksi dalam konfirmasi.

		2. Saldo tidak normal. 3. LPJ Bendahara.
	Rencana aksi masa depan	1. Menyampaikan pengingat kepada satker terkait batas akhir penyampaian LPJ Bendahara, baik secara personal maupun *broadcast* grup (Satu Info KPPN Sanggau) 2. Memberikan asistensi kepada satuan kerja apabila terdapat kendala dalam proses penyusunan LPJ 3. Sebagai refreshment dan persiapan implementasi Validasi LPJ Bendahara melalui SAKTI secara penuh, akan dilaksanakan Sosialisasi LPJ dengan konsep baru kepada satuan kerja
7.	**Sasaran Strategis**	Pemerintahan di masa depan akan dipengaruhi oleh tiga aspek, yaitu: work (proses bisnis), workforce (SDM), dan workplace (tempat bekerja). Dimana ketiga aspek tersebut akan sangat erat kaitannya dengan pemanfaatan teknologi sebagai enabler. Untuk itu, diperlukan penguatan ketiga sumber daya tersebut secara terintegrasi melalui penguatan Budaya Kerja Kemenkeu Satu. Kemenkeu Satu merupakan bentuk kolaborasi dari berbagai unsur dalam Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Setiap entitas dalam Kemenkeu memiliki tugas dan fungsinya masing-masing, namun dapat berkolaborasi dan bekerja bersama untuk akhirnya tumbuh dan berkembang bersama (kolaboratif)
	Penguatan Tata Kelola dan Budaya Kerjasama Kemenkeu Satu dalam Ekosistem Kolaboratif	
	TABEL 3.29 Capaian IKU pada Sasaran Strategis Organisasi dan SDM yang optimal dan berkinerja tinggi	**SS 7: Penguatan Tata Kelola dan Budaya Kerjasama Kemenkeu Satu dalam Ekosistem Kolaboratif** **Kode** | **Indikator Kinerja** | **Target** | **Realisasi** | **Nilai** 7a-CP | Tingkat implementasi penajaman tugas *Treasury* dan *Financial Advisory* | 80% | 100% | 120% Uraian mengenai IKU tersebut adalah sebagaimana berikut:
7a-CP	Tingkat implementasi penajaman tugas *Treasury* dan *Financial Advisory*	Instansi vertikal DJPb telah mengalami pengembangan tugas dan fungsi, terutama sebagai *Treasurer, Regional Chief Economist* dan *Financial Advisor*, sehingga Ditjen Perbendaharaan dapat terlibat lebih dalam pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di daerah. Untuk itu, telah diimplementasikan *Shadow Organization* sebagai bentuk penajaman tugas dan fungsi di Unit Kerja Kantor Vertikal DJPb. IKU ini diukur berdasarkan efektivitas implementasi *Shadow Organization* yang di-*breakdown* atas: 1. Keorganisasian 2. Proses bisnis dan/atau kegiatan 3. Pengembangan kapasitas SDM, dan 4. Output. IKU ini merupakan wujud sinergi dan kolaborasi dalam percepatan penajaman tugas agar organisasi DJPb makin baik dalam menghadapi serta mengantisipasi perkembangan perekonomian regional, nasional, dan global. IKU ini bersifat *direct cascading* dari Dirjen Perbendaharaan ke Sekretaris DJPb dan *indirect cascading* dari Dirjen Perbendaharaan ke seluruh Kepala Kanwil DJPb dan seluruh Kepala KPPN. IKU ini juga bersifat *direct cascading* dari Kepala KPPN ke seluruh Pejabat Pengawas di lingkup KPPN. *Direct cascading* tersebut sebagai wujud Kemenkeu Satu - DJPb Satu - KPPN Satu dengan tujuan agar terjadi percepatan penajaman tugas DJPb. *Direct cascading* tersebut merupakan tanggung renteng/kolektif tanpa pengurangan nilai sebagaimana diatur pada KMK-300/2022 tentang Manajemen Kinerja di lingkungan Kemenkeu.

	Cara ukur / formula	Capaian IKU per triwulan = (Capaian Komponen I x bobot) + (Capaian Komponen II x bobot) + (Capaian Komponen III x bobot) + (Capaian Komponen IV x bobot) Capaian IKU ini diukur dari 4 komponen, yaitu Organisasi, Kegiatan, SDM, dan Output, dengan trajectory dan bobot sebagai berikut: TABEL 3.30 Daftar Komponen dalam capaian IKU Tingkat implementasi penajaan tugas *Treasury* dan *Financial Advisory*

Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
Organisasi 25%	0%	0%	0%
Kegiatan 25%	Kegiatan 25%	Kegiatan 25%	Kegiatan 50%
SDM 25%	SDM 50%	SDM 50%	0%
Output 25%	Output 25%	Output 25%	Output 50%

	Target tahun 2023	Target IKU di tahun 2023 adalah sebesar 80% sebagaimana ditetapkan dalam Kontrak Kinerja Kemenkeu-*Three* KPPN Sanggau Tahun 2023.
	Realisasi tahun 2023	Realisasi Tingkat implementasi penajaman tugas *Treasury* dan *Financial Advisory* tahun 2023 yaitu sebesar 100%.
	Perhitungan / penjelasan perolehan	Nilai diperoleh dari hasil penilaian Bagian Organisasi dan Tata Laksana, Sekretariat Direktorat Jenderal, Ditjen Perbendaharaan dan didasarkan pada perhitungan capaian setiap komponennya.
	Perbandingan antara target dan realisasi tahun 2023	IKU tingkat implementasi penajaman tugas *Treasury* dan *Financial Advisory* merupakan IKU baru dan belum mempunyai data historis tahun – tahun sebelumnya.
	Perbandingan antara realisasi dan capaian kinerja tahun 2023 dengan capaian kinerja hingga 5 (lima) tahun terakhir	IKU tingkat implementasi penajaman tugas *Treasury* dan *Financial Advisory* merupakan IKU baru dan belum mempunyai data historis tahun – tahun sebelumnya
	Isu, permasalahan, tantangan, dan tindakan, serta analisis pelaksanaan rencana aksi dan mitigasi risiko	Pelaksanaan implementasi penajaman tugas *Treasury* dan *Financial Advisory* yang dikuatkan dalam Pelaksanaan *Shadow Organization* pada KPPN sesuai dengan Perdirjen Perbendaharaan Nomor Per-3/PB/2023 tentang Pembentukan *Shadow Organization* pada KPPN dengan target pada Triwulan IV sebesar 80%, menjadi sebuah tantangan baru. Penetapan SO pada awal tahun 2023 memerlukan kesiapan SDM yang memiliki kompetensi yang memadai. Pada saat ini SDM pada KPPN masih berfokus pada tugas dan fungsi terkait dengan penyaluran dana APBN baik kepada K/L pusat maupun transfer ke daerah (fungsi *treasury*), sehingga penugasan terkait dengan *Financial Advisor* memerlukan kesiapan yang lebih matang di berbagai aspek. Peningkatan kualitas koordinasi dengan *stakeholder* baik kantor vertikal maupun pemerintah daerah, dan kompetensi SDM serta pola kerja yang kolaboratif menjadi perhatian utama untuk mendukung tercapainya tugas tersebut Langkah – Langkah yang sudah dilakukan adalah : 1. Membuat SK *Shadow Organization,* Tim Monitoring dalam rangka *piloting Quality Assurance FA* pada Belanja Pemerintah Pusat

		2. Melakukan sosialisasi dan internalisasi kepada pegawai KPPN terkait implementasi *Shadow Organization* 3. Menggunakan istilah-istilah SO untuk membiasakan para pegawai dalam memahami tusi terkait SO 4. Membuat kertas kerja untuk memudahkan monitoring dan perhitungan realisasi IKI implementasi tugas *Treasury* dan *Financial Advisory* 5. Melaksanakan kegiatan yang wajib dilakukan selama tahun 2023 dari empat komponen indikator pelaksanaan TREFA 6. Membuat lokasi *sharepoint* untuk mengkompilasi bukti dukung dari setiap seksi dan subbagian umum 7. Melakukan sinkronisasi jenis kegiatan antara pelaksanaan kegiatan pada SO dan standardisasi pelaksanaan tugas dan fungsi KPPN 8. Membuat inovasi monitoring dan agenda KPPN Sanggau (MANDAU) untuk memonitor pelaksanaan kegiatan dan penyampaian laporan 9. Membuat kelengkapan/simbol-simbol terkait dengan pelaksanaan SO yang dapat diakses secara visual oleh para pegawai maupun *stakeholder* 10. Pembentukan forum *Financial Advisor Fun Club* (FAFC)
	Analisis penyebab	1. Tugas Baru sebagai *Financial Advisor* perlu kesiapan kompetensi dan kapasitas SDM di bidang *data analytic,* pemahaman terkait pengelolaan keuangan daerah, pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan permasalahan kesejahteraan masyarakat. 2. Pada saat ini implementasi penajaman tugas *Treasury* dan *Financial Advisory* telah disediakan *Standard Operating Procedure* (*SOP*) dan Pedoman Implementasi *Financial Advisor* untuk Belanja Pemerintah Pusat dan *Special Mission*. Masih diperlukan petunjuk teknis terkait dengan implementasi *Financial Advisor* untuk Belanja Pemerintah Daerah
	Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya	Efisiensi pelaksanaan anggaran KPPN Sanggau untuk tahun 2023 sudah baik, terbukti dengan capaian efisiensi sebesar 20 dari batas nilai antara -20 sampai dengan 20 dan nilai efisiensi sebesar 100.
	Rencana aksi masa depan	1. Melakukan penguatan secara terus menerus kepada pegawai terkait dengan tusi *Treasury* dan *Financial Advisory* 2. Melakukan sosialisasi *Treasury* dan *Financial Advisory* melalui kegiatan-kegiatan yang beririsan dengan pelaksanaan pengelolaan keuangan pada K/L dan Pemda 3. Menugaskan para pegawai untuk mempelajari pelaksanaan KEP-57/PB/2023 terkait Standar Pelayanan di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan 4. Menyelenggarakan penguatan komitmen dan internalisasi mingguan implementasi Trefa 5. Melakukan penguatan kompetensi pegawai terkait dengan pengelolaan keuangan daerah dengan mitra Pemda 6. Menyusun kajian tematik sederhana terkait dengan perekonomian daerah
8.	**Sasaran Strategis**	Organisasi yang optimal adalah organisasi yang mampu mewadahi dan memfasilitasi kegiatan-kegiatan dalam rangka mencapai tujuan. Dengan demikian organisasi beserta proses bisnis di dalamnya akan bersifat dinamis dan fleksibel sesuai dengan tuntutan kebutuhan dan dinamika transformasi kelembagaan Kementerian Keuangan. SDM yang optimal adalah SDM yang memiliki
	Organisasi dan SDM yang	

	unggul dan adaptif	kepemimpinan yang tepat, mengetahui apa yang akan dilakukan untuk semua informasi yang diterima dan kompetensi yang dibutuhkan untuk keberhasilan organisasi serta melakukan pekerjaan dengan penuh semangat, efektif, efisien dan produktif, sesuai dengan proses kerja yang benar agar mencapai hasil kerja yang optimal.

TABEL 3.31
Capaian IKU pada Sasaran Strategis Organisasi dan SDM yang unggul dan adaptif

SS 8: Organisasi dan SDM yang unggul dan adaptif

Kode	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Nilai
8a-N	Tingkat kualitas pengelolaan kinerja berbasis *Strategy Focused Organization*	85.00	88.61	104.25%
8b-N	Tingkat implementasi *Learning Organization*	85.00	91.06	107.13%
8c-N	Nilai hasil evaluasi pelaksanaan tugas kepatuhan internal	86.00	95.04	110.51%

Uraian mengenai IKU tersebut adalah sebagaimana berikut:

8a-N	Tingkat kualitas pengelolaan kinerja berbasis *Strategy Focused Organization*	Dalam rangka mendorong komitmen pimpinan dan seluruh pegawai terhadap pelaksanaan pengelolaan kinerja di masing-masing unit lingkup DJPb, telah disampaikan matriks langkah-langkah peningkatan kualitas pengelolaan kinerja. Langkah-langkah peningkatan kualitas pengelolaan kinerja dimaksud merupakan panduan bagi unit kerja lingkup DJPb untuk melaksanakan action plan yang implementatif berdasarkan prinsip-prinsip Strategy Focused Organization (SFO). Sebagai bentuk apresiasi terhadap upaya-upaya peningkatan kualitas pengelolaan kinerja di lingkungan DJPb, Kantor Pusat DJPb melaksanakan penilaian terhadap pelaksanaan pengelolaan kinerja di unit masing-masing. Penilaian dimaksud dilaksanakan berdasarkan parameter sebagai berikut: a. Nilai kuantitatif pemenuhan unsur-unsur peningkatan kualitas pengelolaan kinerja periode sampai dengan triwulan III 2023. b. Nilai NKO Unit periode tahunan 2023.
	Cara ukur / formula	Hasil penilaian kualitas pengelolaan kinerja oleh Kantor Pusat DJPb
	Target tahun 2023	Target IKU pada tahun 2023 adalah sebesar 85.00 sebagaimana ditetapkan dalam Kontrak Kinerja Kemenkeu-*Three* KPPN Sanggau Tahun 2023. Target tersebut meningkat sedikit dari target dalam kontrak kinerja tahun sebelumnya yaitu 84.50.
	Realisasi tahun 2023	Nilai tingkat kualitas pengelolaan kinerja berbasis Strategy Focused Organization tahun 2023 yaitu sebesar 88.61.
	Perhitungan / penjelasan perolehan	Nilai diperoleh dari hasil penilaian Sekretaris Ditjen Perbendaharaan Direktorat Jenderal Perbendaharaan sesuai dengan Nota Dinas Sekretaris Ditjen Perbendaharaan Nomor ND-187/PB.1/2024 tanggal 15 Januari 2024.
	Perbandingan antara target dan realisasi tahun 2023	

TABEL 3.32
Capaian IKU Nilai tingkat kualitas pengelolaan kinerja berbasis *Strategy Focused Organization* Tahun 2023

Target/ Realisasi	Trw I	Trw II	Smt I	Trw III	s.d. Trw III	Trw IV	Tahunan	Pol /KP
Target	-	-	-	-	-	85.00	85.00	Maximize / *Take Last Known Value*
Realisasi	-	-	-	-	-	88.61	88.61	
Indeks Capaian	-	-	-	-	-	104.24%	104.24%	

Sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.32, nilai realisasi tahunan IKU (yang diperoleh pada triwulan IV tahun 2023) sebesar 88.61 tersebut melampaui target IKU sebesar 85.00 dengan indeks capaian 104.24%.

Perbandingan antara realisasi dan capaian kinerja tahun 2023 dengan capaian kinerja hingga 5 (lima) tahun terakhir

Perkembangan Nilai tingkat kualitas pengelolaan kinerja berbasis *Strategy Focused Organization* dari tahun 2018 s.d 2023 ditunjukkan pada Tabel 3.33 dan Grafik 3.11.

TABEL 3.33
Perkembangan Nilai kualitas pengelolaan kinerja berbasis *Strategy Focused Organization* Tahun 2018—2023

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Target	81	83	83	84	84,5	85
Realisasi	81,04	85,89	84,12	89,21	92,66	88.61
Nilai	**100,5%**	**103,48%**	**101,35%**	**106,20%**	**109,65%**	**104.25%**

GRAFIK 3.11
Perkembangan Nilai tingkat kualitas pengelolaan kinerja berbasis *Strategy Focused Organization* Tahun 2018—2023

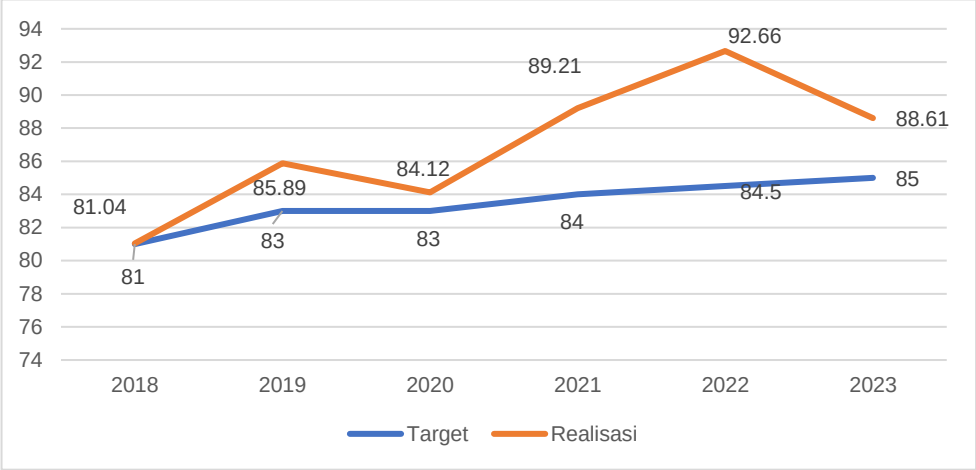

Sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.33 dan Grafik 3.11, Nilai tingkat kualitas pengelolaan kinerja berbasis *Strategy Focused Organization* mengalami peningkatan dan penurunan setiap tahunnya. Pencapaian tertinggi sejak 6 tahun terakhir yaitu pada tahun 2022 sebesar 92,66.

Isu, permasalahan, tantangan, dan tindakan, serta analisis pelaksanaan rencana aksi dan mitigasi risiko

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2022 tentang Manajemen Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan, bahwa seluruh Unit Eselon I termasuk DJPb perlu mendorong peningkatan implementasi pengelolaan kinerja di unit masing masing secara berkelanjutan. Tindak lanjut hal tersebut DJPb mengimplementasikan Langkah-Langkah Peningkatan Kualitas Pengelolaan Kinerja (LLPKPK) atau *Strategy Focused Organization* (*SFO*). Implementasi *SFO* diperlukan perencanaan dan administrasi yang dikelola dengan baik. Target tahun 2023 mengalami peningkatan 0,5 dibanding tahun 2022.

Di tahun 2023 ini terdapat pengembangan pada aplikasi INTENSE, kemudian untuk pengumpulan dokumen pendukung SFO diwajibkan dikumpulkan di Kemenkeu *sharepoint* yang semula dikumpulkan di *google drive*.

Adapaun langkah-langkah yang telah dilaksanakan antara lain:

1. Menyusun dan melakukan monitoring rencana kegiatan *SFO* pada monitoring agenda KPPN Sanggau (MANDAU)

		2. Melengkapi seluruh dokumen dari kegiatan pada matriks SFO yang telah dilaksanakan hingga triwulan IV 3. Menyusun bukti dukung laporan SFO setiap selesai melaksanakan kegiatan 4. Memenuhi/melaksanakan Nota Dinas Sekretaris Ditjen Perbendaharaan Nomor ND-1034/PB.1/2023 hal Langkah-Langkah Peningkatan Kualitas Pengelolaan Kinerja di Lingkungan DJPb Tahun 2023 5. Mengikuti Rapat Koordinasi Pengelolaan Kinerja sesuai Nota Dinas Nomor ND-416/WPB.17/2023 pada tanggal 22 s.d. 24 Mei 2023 di Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat 6. Melakukan input progress SFO di aplikasi INTENSE 7. Membuat kemenkeu *sharepoint* untuk mengkompilasi dokumen pendukung SFO
	Analisis penyebab	1. Penyusunan Laporan SFO membutuhkan dukungan dokumen administrasi dari setiap kegiatan yang beragam 2. Implementasi analisis STEP, SWOT dan TOWS yang belum dipahami dengan baik oleh seluruh pegawai 3. Tingkat kendali yang rendah terhadap penilaian dari *stakeholder* eksternal atas kinerja layanan organisasi
	Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya	Efisiensi pelaksanaan anggaran KPPN Sanggau untuk tahun 2023 sudah baik, terbukti dengan capaian efisiensi sebesar 20 dari batas nilai antara -20 sampai dengan 20 dan nilai efisiensi sebesar 100.
	Rencana aksi masa depan	1. Menertibkan pengiriman laporan SFO sesuai dengan jadwal. 2. Melakukan update kegiatan atau laporan SFO pada monitoring agenda KPPN Sanggau (MANDAU) 3. Meningkatkan komunikasi antara pengelola kinerja, kepala subbagian umum dan kepala kantor dalam implementasi kegiatan SFO 4. Melakukan sinkronisasi kegiatan SFO dengan Strategi Penguatan Peran KPPN serta implementasi *Shadow Organization* 5. Melakukan koordinasi jadwal kegiatan SFO dengan seksi lain agar kegiatan yang dilaksanakan lebih efektif dan efisien 6. Melengkapi dokumen pendukung SFO sesuai dengan Review Kanwil 7. Meningkatkan kompetensi pegawai untuk memberikan kualitas layanan yang lebih baik dalam bentuk *refreshment, capacity building* dan *service excellent*
8b-N	Tingkat Implementasi *Learning Organization*	Tingkat Implementasi learning organization merupakan nilai yang merepresentasikan tingkat implementasi unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan sebagai learning organization. Learning organization (organisasi pembelajar) adalah organisasi yang secara terus menerus dan terencana memfasilitasi anggotanya agar mampu terus menerus berkembang dan mentransformasi diri baik secara kolektif maupun individual dalam usaha mencapai hasil yang lebih baik dan sesuai dengan kebutuhan yang dirasakan bersama antara organisasi dan individu di dalamnya (KEP-140/PP/2017). Aktivitas implementasi LO diukur melalui 8 (delapan) subkomponen, sebagai berikut: a. Pendokumentasian dan pengorganisasian:

		Mengukur partisipasi unit kerja dalam pendokumentasian pengetahuan terkait pengelolaan keuangan negara yang diwujudkan dalam penyusunan aset intelektual dan publikasinya dalam Pusat Pengetahuan pada Kemenkeu Learning Center 2. b. Analisisi kebutuhan pembelajaran: Mengukur partisipasi unit kerja dalam menganalisis kebutuhan pembelajaran pegawai berdasarkan kinerja yang dilaksanakan oleh masing-masing individu melalui Dialog Kinerja Individu (DKI). c. Desain pembelajaran: Mengukur partisipasi unit kerja dalam menentukan jenis dan model pembelajaran yang dibutuhkan pegawai dalam 1 (satu) tahun melalui penyusunan Individual Development Plan (IDP) Sesuai ketentuan pada KMK 350/KMK/011/2022. d. Evaluasi pembelajaran: Mengukur partisipasi unit kerja dalam mendorong penyelesaian penugasan pembelajaran oleh pegawai dan partisipasi dalam pelaksanaan evaluasi pascapembelajaran yang diselenggarakan oleh BPPK. e. Pembelajaran terstruktur: Mengukur akurasi pengiriman peserta pelatihan oleh unit kerja dalam program pembelajaran yang diselenggarakan oleh BPPK. f. Belajar dari pengalaman kerja: Mengukur tingkat akomodasi unit kerja bagi pegawai untuk melaksanakan pembelajaran melalui praktik langsung dalam pekerjaan. g. Kinerja organisasi: Mengukur dampak pembelajaran yang dilaksanakan pegawai terhadap perbaikan kinerja organisasi, melalui penciptaan inovasi di unit kerja. h. Pimpinan sebagai pengajar: Mengukur keterlibatan pimpinan dalam proses pembelajaran di unit kerja melalui perannya sebagai pengajar (sumber belajar) dalam berbagai kegiatan. Nilai Capaian IKU diperoleh dari hasil verifikasi atas dokumen bukti pendukung atas aktivitas LO yang dijabarkan pada Komponen dan Subkomponen penyusun IKU LO DJPb Tahun 2023 di atas. Dokumen bukti diunggah pada Aplikasi Training Modul Learning Organization. Selanjutnya, dokumen tersebut akan diverifikasi oleh Tim Implementasi LO Pusat pada Bagian SDM Sekretariat DJPb.
	Cara ukur / formula	Nilai tingkat implementasi *Learning Organization*
	Target tahun 2023	IKU ini merupakan IKU baru di tahun 2023 dan mempunyai Target sebesar 85 sebagaimana ditetapkan dalam Kontrak Kinerja Kemenkeu-*Three* KPPN Sanggau Tahun 2023.
	Realisasi tahun 2023	Nilai tingkat implementasi *Learning Organization* tahun 2023 yaitu sebesar 91.06
	Perhitungan / penjelasan perolehan	Nilai diperoleh dari hasil penilaian Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan sesuai dengan Nota Dinas Nomor ND-106/PB.1/2024 tanggal 9 Januari 2023.

	Perbandingan antara target dan realisasi tahun 2023	**TABEL 3.34** Capaian IKU Nilai tingkat implementasi *Learning Organization* Tahun 2023 Sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.34, nilai realisasi tahunan IKU sebesar 91.06 tersebut melampaui target IKU sebesar 85 dengan indeks capaian 107.13%.
	Perbandingan antara capaian kinerja tahun 2023 dengan beberapa tahun terakhir	IKU ini merupakan IKU baru yang belum mempunyai data historis tahun-tahun sebelumnya.
	Isu, permasalahan, tantangan, dan tindakan, serta analisis pelaksanaan rencana aksi dan mitigasi risiko	Implementasi *Learning Organization* yang terdiri dari 8 komponen baru diterapkan menjadi bagian dari Indikator Kinerja Utama mulai tahun 2023, dimana implementasi LO ini diterapkan secara gradual dalam kurun waktu satu tahun. Dalam implementasinya membutuhkan koordinasi yang lebih intensif pada seluruh seksi maupun pegawai agar capaian *Learning Organization* lebih maksimal. Adapun Langkah-langkah yang telah dilaksanakan antara lain: 1. Melakukan koordinasi pada pihak terkait dalam hal pengumpulan dokumen pendukung LO pada seluruh Subbag Umum dan Kepala Seksi 2. Setiap ada nota dinas wajib mencantumkan pemateri 3. Melakukan identifikasi dokumen untuk dilakukan pengumpulan dan pemilahan dokumen sumber sesuai dengan kategori komponen LO agar dalam penyusunan dokumen LO dapat berjalan dengan baik dan lancar. 4. Melakukan identifikasi dokumen untuk dilakukan pengumpulan dan pemilahan dokumen sumber sesuai dengan kategori komponen LO agar dalam penyusunan dokumen LO dapat berjalan dengan baik dan lancar 5. Membuat podcast dengan tema Implementasi Penggunaan Digipay dan Pelaksanaan pembayaran APBN akhir tahun dengan mekanisme RPATA untuk memperkaya aset intelektual 6. Mengusulkan pegawai KPPN Sanggau untuk mengikuti diklat pemberdayaan UMKM, Sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa, Analisis Kredit UMKM, Kurasi UMKM, Pelatihan Pembina Jabatan Fungsional Bidang Perbendaharaan ke kanwil dan Kantor Pusat DJPb
	Analisis penyebab	1. Merupakan IKU baru sehingga membutuhkan waktu dalam memahami dan mengimplementasikannya 2. Tingkat pemahaman dalam implementasi LO sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 283/KMK.011/2021 masih belum seragam pada semua pegawai 3. Belum adanya SDM yang memiliki kompetensi dalam pembuatan video animasi / video pembelajaran sesuai standar AI pada Pusat Pengetahuan KLC2
	Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya	Efisiensi pelaksanaan anggaran KPPN Sanggau untuk tahun 2023 sudah baik, terbukti dengan capaian efisiensi sebesar 20 dari batas nilai antara -20 sampai dengan 20 dan nilai efisiensi sebesar 100.

Target/ Realisasi	Trw I	Trw II	Smt I	Trw III	s.d. Trw III	Trw IV	Tahunan	Pol /KP
Target	-	-	-	-	-	85	85	Maximize / *Take Last Known Value*
Realisasi	-	-	-	-	-	91.06	91.06	
Indeks Capaian	-	-	-	-	-	107.13%	107.13%	

	Rencana aksi masa depan	1. Membuat Aset Intelektual berupa Podcast dengan tema langkah - langkah strategis pelaksanaan anggaran tahun 2024 2. Mengusulkan pegawai untuk mengikuti berbagai diklat yang diselenggarakan oleh Kantor Pusat DJPb maupun BPPK 3. Melakukan input IDP dan DKI secara serentak untuk seluruh pegawai sesuai dengan waktu yang ditentukan 4. Melakukan kegiatan CnC bagi pejabat pengawas dan pelaksana sesuai dengan jadwal dan kebutuhan
8c-N	Nilai hasil evaluasi pelaksanaan tugas kepatuhan internal	Nilai hasil evaluasi merupakan hasil penilaian terhadap pelaksanaan tugas kepatuhan internal yang diimplementasikan pada unit kerja di lingkungan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara. Penilaian tersebut dilakukan oleh Kantor Wilayah DJPb c.q. Bidang SKKI. Penilaian dilaksanakan dengan berpedoman pada Kepdirjen Perbendaharaan No. KEP-239/PB/2020 tentang Pedoman Penilaian Pelaksanakan Tugas Kepatuhan Internal di Lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Unsur-unsur penilaian pelaksanaan tugas kepatuhan internal pada Kanwil DJPb, terdiri atas: 1. Penerapan manajemen risiko (bobot: 35%) 2. Pelaksanaan pemantauan pengendalian intern, kode etik/disiplin pegawai, dan pengendalian gratifikasi (bobot: 55%) 3. Pengelolaan pengaduan dan rekomendasi Laporan Hasil Audit (LHA) Aparat Pengawas Fungsional (bobot: 10%)
	Cara ukur / formula	Hasil penilaian pelaksanaan tugas KI dari Kantor Wilayah DJPb
	Target tahun 2023	Target IKU tersebut untuk tahun 2023 adalah sebesar 86 sebagaimana ditetapkan dalam Kontrak Kinerja Kemenkeu-*Three* KPPN Sanggau Tahun 2023. Target tersebut meningkat dari target dalam kontrak kinerja tahun sebelumnya yaitu 85.
	Realisasi tahun 2023	Nilai hasil evaluasi pelaksanaan tugas kepatuhan internal tahun 2023 yaitu sebesar 95.04
	Perhitungan / penjelasan perolehan	Nilai diperoleh dari hasil penilaian Kantor Wilayah DJPb Provinsi Kalimantan Barat.
	Perbandingan antara target dan realisasi tahun 2023	**TABEL 3.35** Capaian IKU Nilai hasil evaluasi pelaksanaan tugas kepatuhan internal Tahun 2023

Target/ Realisasi	Trw I	Trw II	Smt I	Trw III	s.d. Trw III	Trw IV	Tahunan	Pol /KP
Target	-	-	-	-	-	86	86	Maximize / *Take Last Known Value*
Realisasi	-	-	-	-	-	95.04	95.04	
Indeks Capaian	-	-	-	-	-	110.51%	110.51%	

Sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.35, nilai realisasi tahunan IKU (yang diperoleh pada triwulan IV tahun 2023) sebesar 95.04 tersebut melampaui target IKU sebesar 86 dengan indeks capaian 110.51%.

	Perbandingan antara capaian kinerja tahun 2023 dengan beberapa tahun terakhir	Perkembangan nilai hasil evaluasi pelaksanaan tugas kepatuhan internal dari tahun 2019 s.d 2023 ditunjukkan pada Tabel 3.36 dan Grafik 3.12. **TABEL 3.36** Perkembangan Nilai hasil evaluasi pelaksanaan tugas kepatuhan internal Tahun 2019—2023

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
Target	75	80	83	85	86
0Realisasi	92,45	92,83	92,91	94,6	95.04
Nilai	**120%**	**116,04%**	**111,94%**	**111,29%**	**110.51%**

GRAFIK 3.12
Perkembangan Nilai hasil evaluasi pelaksanaan tugas kepatuhan internal Tahun 2019—2023

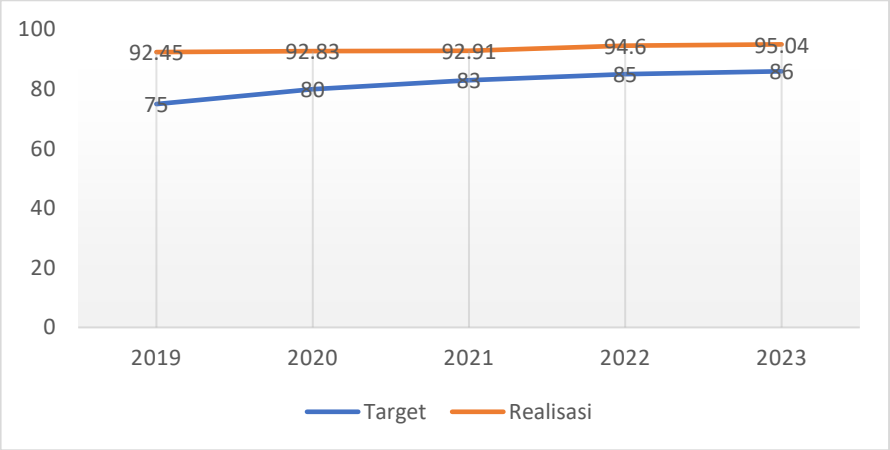

Sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.36 dan Grafik 3.12, Nilai hasil evaluasi pelaksanaan tugas kepatuhan internal terus meningkat setiap tahunnya. Pencapaian tertinggi sejak 5 tahun terakhir yaitu pada tahun 2023 sebesar 95.04.

Isu, permasalahan, tantangan, dan tindakan, serta analisis pelaksanaan rencana aksi dan mitigasi risiko

1. Pelaksanaan tugas pelaksanaan internal merupakan gabungan dari seluruh kegiatan yang dilakukan seksi Kepatuhan Internal dalam satu tahun antara lain Laporan Monev KI, Laporan Pengendalian Internal, Laporan Kode Etik, Laporan Mitigasi Risiko yang harus dilaksanakan dan dilaporkan setiap bulan atau triwulanan.
2. Terdapat penempatan pegawai baru pada Seksi Veraki yang masih *fresh graduate* dan belum memiliki pengalaman kerja di bidang kepatuhan internal (CPNS).
3. Kurangnya pemahaman pegawai terkait tugas-tugas kepatuhan internal yang seringkali membuat terlambat dalam menyampaikan laporan.
4. Banyaknya laporan yang harus disusun memerlukan kecepatan dan kecermatan

Adapun tindakan yang telah dilaksanakan antara lain:

1. Membuat reminder untuk mengingatkan tugas-tugas yang harus diselesaikan setiap bulan
2. Melakukan konsultasi dan konfirmasi dengan UKI W secara rutin untuk memastikan tugas dan laporan kepatuhan internal telah dipenuhi semuanya
3. Mempelajari hasil analisis penilaian dari Bidang SKKI terkait Hasil Evaluasi Pelaksanaan Tugas Kepatuhan Internal tahun sebelumnya
4. Memperbaiki format piagam dan peta risiko yang masih kurang sesuai
5. Memastikan selalu ada temuan dalam pelaporan LHPPU
6. Membuat media komunikasi yang masif terkait pelaksanaan manajemen risiko di depan pintu layanan

		7. Membuat inovasi BONTI sebagai *dashbord* mitigasi risiko
	Analisis penyebab	1. Terdapat potensi laporan yang kurang / tidak disampaikan ke Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat sehingga mengurangi nilai karena banyaknya laporan yang harus disusun 2. Pejabat dan pegawai baru di seksi Veraki sehingga belum memahami terkait aplikasi PRO-UKI, Incrima dan pelaporan lainnya
	Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya	Efisiensi pelaksanaan anggaran KPPN Sanggau untuk tahun 2023 sudah baik, terbukti dengan capaian efisiensi sebesar 20 dari batas nilai antara -20 sampai dengan 20 dan nilai efisiensi sebesar 100.
	Rencana aksi masa depan	1. Pelaksanaan rapat UPR Triwulan IV 2. Pelaksanaan pelaporan rutin pengendalian internal 3. Penyusunan Piagam Risiko Tahun 2024 4. Penggunaan aplikasi ProUKI dan Incrima sebagai sarana pelaporan 5. Analisis dan evaluasi hasil penilaian tugas kepatuhan internal periode 2023 sebagai sarana perbaikan
9.	**Sasaran Strategis**	Pengelolaan keuangan meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring anggaran selama satu tahun anggaran yang selanjutnya dipertanggungjawabkan kepada para stakeholder. Kualitas pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran, tercermin dari opini yang diberikan oleh BPK. Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA) harus dikelola secara efektif dan efisien, sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan (akuntabel) dalam rangka mencapai output yang diharapkan. Pengelolaan BMN meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian. Optimalisasi pengelolaan BMN merupakan proses kerja dalam manajemen aset yang bertujuan untuk mengoptimalkan potensi fisik, lokasi, nilai, jumlah/volume, legal dan ekonomis yang dimiliki aset tersebut.
	Penguatan pengelolaan keuangan dan BMN yang andal	

TABEL 3.37
Capaian IKU pada Sasaran Strategis Pengelolaan keuangan dan BMN yang efisien, efektif dan akuntabel

SS 9: Penguatan Pengelolaan Keuangan dan BMN yang andal

Kode	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Nilai
9a-CP	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran KPPN	95.5 %	99.12%	103.79%
9b-N	Nilai kualitas LK tingkat UAKPA dan UAKPB	84.00	86.85	103.39%
9c-N	Persentase kualitas pengelolaan BMN dan Pengadaan	100%	120%	120%

Uraian mengenai IKU tersebut adalah sebagai berikut:

9a-CP	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran KPPN	Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), harus dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan anggaran menggunakan

prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA. Perhitungan IKU "Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran" Kementerian Keuangan mengacu pada Surat Edaran Nomor 8/MK.1/2020 tanggal 23 Maret 2020 tentang Tata Cara Penghitungan Indikator Kinerja Utama Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran di Lingkungan Kemenkeu. Ruang lingkup perhitungan IKU "Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran" mencakup aspek kualitas serta aspek tata kelola dan administratif yang ada pada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan. Aspek kualitas didapat atas capaian pada evaluasi kinerja anggaran pada SMART DJA. Aspek tata kelola dan administratif didapat atas capaian kualitas pelaksanaan anggaran pada Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran.

Cara ukur / formula

Perhitungan realisasi IKU =

Capaian IKU PKPA Triwulan I = Capaian IKPA Januari s.d. Maret

Capaian IKU PKPA Triwulan II = Capaian IKPA Januari s.d. Juni

Capaian IKU PKPA Triwulan III = Capaian IKPA Januari s.d. September

Capaian IKU PKPA Triwulan IV = 50% Capaian IKPA Januari s.d. Desember + 50% Capaian SMART

Target tahun 2023

Target IKU tersebut untuk tahun 2023 adalah sebesar 95.5% sebagaimana ditetapkan dalam Kontrak Kinerja Kemenkeu-*Three* KPPN Sanggau Tahun 2023. Target tersebut sama dengan target dalam kontrak kinerja tahun sebelumnya yaitu sebesar 95.5% dan lebih besar dari target yang ditetapkan dalam Renstra Ditjen Perbendaharaan tahun 2020-2024 yaitu sebesar 95%.

Realisasi tahun 2023

Persentase kualitas pelaksanaan anggaran KPPN tahun 2023 yaitu sebesar 99.12%.

Perhitungan / penjelasan perolehan

Nilai diperoleh dari 50% Capaian IKPA Januari s.d. Desember 2023 sebesar 98.47 dan 50% Capaian SMART sebesar 99.77.

Perbandingan antara target dan realisasi tahun 2023

TABEL 3.37
Capaian IKU Persentase kualitas pelaksanaan anggaran KPPN Tahun 2023

Target/ Realisasi	Trw I	Trw II	Smt I	Trw III	s.d. Trw III	Trw IV	Tahunan	Pol /KP
Target	95.5%	95.5%	95.5%	95.5%	95.5%	95.5%	95.5%	Maximize / *Take Last Known Value*
Realisasi	100%	95.89%	95.89%	97.96%	97.96%	98.47%	99.12%	
Indeks Capaian	104.7%	100.4%	100.4%	102.5%	102.5%	103.11%	103.79%	

Sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.37, nilai realisasi tahunan IKU (yang diperoleh pada triwulan IV tahun 2023) sebesar 99.12% tersebut melampaui target IKU sebesar 95.5% dengan indeks capaian 103.11%.

Perbandingan antara capaian kinerja tahun 2023 dengan beberapa tahun terakhir

Perkembangan Persentase kualitas pelaksanaan anggaran KPPN dari tahun 2018 s.d 2023 ditunjukkan pada Tabel 3.38 dan Grafik 3.13.

TABEL 3.38
Perkembangan Persentase kualitas pelaksanaan anggaran KPPN Tahun 2018—2023

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Target	95%	95%	95%	95.5%	95.5%	95.5%

Realisasi	98,25%	93,22%	95.55%	97,39%	99.68%	99.12%
Nilai	**103,42%**	**98,13%**	**100.58%**	**101,98%**	**104.37%**	**103.79%**

GRAFIK 3.13
Perkembangan Persentase kualitas pelaksanaan anggaran KPPN Tahun 2018—2023

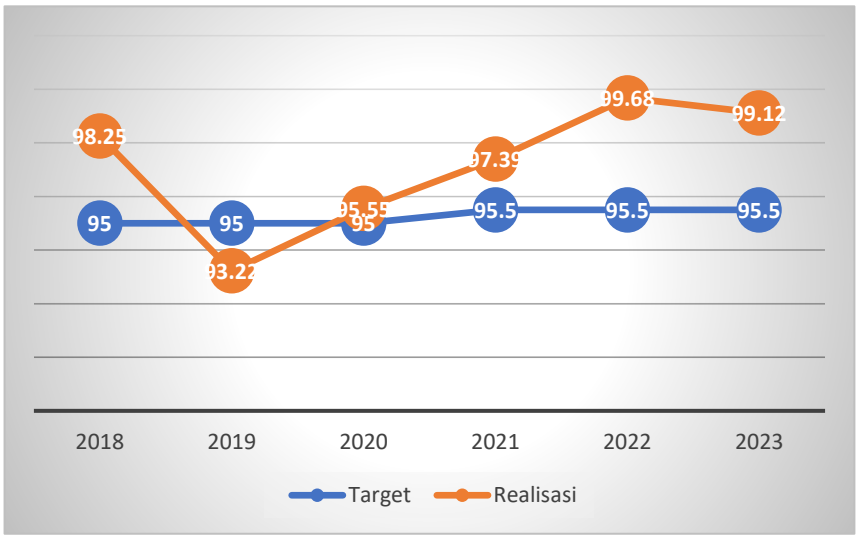

Sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.38 dan Grafik 3.13, Persentase kualitas pelaksanaan anggaran KPPN menurun dan tidak mencapai target pada tahun 2019 kemudian dapat terus meningkat kembali sampai dengan tahun 2022. Pada tahun 2023 ini capaian menurun sekitar 0.56 point dibandingkan tahun 2022 yang mempunyai capaian 99.68. Pencapaian nilai tertinggi sejak 6 tahun terakhir yaitu pada tahun 2022 dengan capaian 99.68%.

Isu, permasalahan, tantangan, dan tindakan, serta analisis pelaksanaan rencana aksi dan mitigasi risiko

Perhitungan IKPA berdasarkan Perdirjen Perbendaharaan nomor PER-5/PB/2022 dengan mengukur 8 Indikator dengan pembobotan: Revisi DIPA (10%), Deviasi Halaman III DIPA (10%), Belanja Kontraktual (10%), Penyerapan Anggaran (20%), Penyelesaian Tagihan (10%), Pengelolaan UP dan TUP (10%), Dispensasi SPM (5%), dan Capaian Output (25%). Capaian triwulan I s.d. III menggunakan nilai IKPA sedangkan capaian triwulan IV terdiri dari nilai IKPA (50%) dan nilai SMART (50%). Efek negatif yang ditimbulkan apabila target tidak tercapai adalah kualitas belanja dan kinerja pelaksanaan anggaran tidak kredibel. Sebagai tambahan informasi bahwa tahun 2023 KPPN Sanggau telah mendapat alokasi Belanja Modal dalam rangka renovasi gedung kantor, pengadaan sound system dan AC.

Adapun tindakan yang telah dilaksanakan antara lain:

1. Melakukan identifikasi dan melaksanakan kegiatan yang dapat direalisasikan tanpa ada ketentuan harus dilakukan pada pertengahan maupun akhir tahun
2. Melakukan penyesuaian kembali rencana kegiatan dan rencana penarikan dana setiap bulannya
3. Percepatan Realisasi Belanja Barang
4. Percepatan penyelesaian tagihan dan *revolving* UP
5. Monitoring Rencana Kegiatan
6. Mempersiapkan administrasi pengadaan belanja modal
7. Input data Capaian Output tepat waktu

		8. Aktif berkoordinasi dengan para kepala seksi dalam penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan pada program teknis 9. Berkoordinasi dan konsultasi dengan Kanwil DJPb Prov Kalbar terkait pelaksanaan anggaran tahun 2023
	Analisis Penyebab	1. Terdapat kebijakan baru terkait implementasi *branding InTress* pada bangunan gedung maupun ruang pelayanan, hal ini menyebabkan adanya penyesuaian atas metode penunjukan penyedia barang dan jasa untuk keperluan renovasi gedung kantor yang semula hanya penggantian atap menjadi penggantian atap dan pembuatan *building name* ÏnTress yang memerlukan proses pelelangan sederhana. dampak dari perubahan tersebut adalah mundurnya jadwal pelaksanaan kegiatan. 2. Sinkronisasi penyusunan rencana penyerapan anggaran dengan rencana kegiatan masing masing PIC kegiatan pada seluruh seksi /subbag pada KPPN 3. Porsi persentase per jenis belanja sudah ditetapkan dalam formula IKPA sehingga memerlukan penyesuaian kegiatan yang harus direalisasikan per jenis belanja 4. Terdapat kebijakan baru terkait TKDN dalam pengadaan barang dan jasa serta kendala dalam pemilihan penyedia barang dan jasa 5. Terdapat pergantian pengelola keuangan untuk Bendahara Pengeluaran dan Staf Pengelola Keuangan pada bulan November 2023 6. Kurang Optimalnya nilai IKPA pada Triwulan II dan Triwulan III, disebabkan oleh adanya penurunan pada indikator Penyerapan anggaran dan Deviasi Halaman III DIPA; 7. Terjadi *Force Majeure* berupa kerusakan lantai pada ruang *Front Office* yang diakibatkan oleh cuaca panas yang tinggi, sehingga berdampak pada kesulitan pelaksanaan kegiatan yang telah disusun pada Rencana kegiatan dan anggaran Triwulan II. Hal ini menyebabkan turunnya nilai Deviasi Halaman III DIPA; 8. Terdapat alokasi belanja modal dalam DIPA Tahun Anggaran 2023 yang realisasinya perlu dipersiapkan secara matang baik dari sisi administrasi maupun pelaksanaan kegiatan, sehingga berdampak pada ketidaktercapaian target penyerapan anggaran pada TW II dan TW III. 9. Namun ketertinggalan nilai penyerapan anggaran pada TW II dan TW III, telah dimaksimalkan pada TW IV.
	Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya	Efisiensi pelaksanaan anggaran KPPN Sanggau untuk tahun 2023 sudah baik, terbukti dengan capaian efisiensi sebesar 20 dari batas nilai antara -20 sampai dengan 20 dan nilai efisiensi sebesar 100.
	Rencana aksi masa depan	1. Percepatan pengadaan barang dan jasa sesuai dengan kebutuhan operasional kantor. 2. Berkoordinasi dengan kantor pusat, kanwil dan Dinas PU setempat terkait rencana pemeliharaan gedung kantor 3. Percepatan Realisasi Belanja Barang khususnya pemeliharaan gedung dan bangunan/ pemeliharaan peralatan dan mesin 4. Setiap awal triwulan melakukan penyusunan dan Reviu Rencana Kegiatan dan RPD serta melakukan Monitoring pelaksanaannya setiap bulan 5. Percepatan penyelesaian tagihan dan *revolving* UP 6. Input data Capaian Output tepat waktu

		7. Monitoring rencana pelaksanaan kegiatan dan realisasi anggaran secara periodik 8. Monitoring IKPA secara berkala dan melakukan penyesuaian kegiatan yang mengalami kendala dalam pelaksanaan
9b-N	Nilai kualitas LK tingkat UAKPA dan UAKPB	Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga, satuan kerja Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara selaku unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) dan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB) lingkup Kanwil DJPb wajib menyampaikan Laporan Keuangan tingkat UAKPA dan UAKPB kepada Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah (UAPPA-W) dan Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Wilayah (UAPPB-W) DJPb. IKU ini digunakan untuk meningkatkan kualitas Laporan Keuangan tingkat UAKPA dan UAKPB lingkup Kanwil DJPb dengan dilakukan penilaian laporan Keuangan tingkat UAKPA dan UAKPB yang meliputi kriteria: a) Ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan b) keakuratan data laporan keuangan c) kepatuhan pelaksanaan anggaran d) Penyajian Laporan Keuangan e) Partisipasi dan f) Laporan BMN.
	Cara ukur / formula	Total nilai berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh UAPPA-W dan UAPPB-W terhadap Laporan Keuangan tingkat UAKPA dan UAKPB
	Target tahun 2023	Target IKU tersebut untuk tahun 2023 adalah sebesar 84 sebagaimana ditetapkan dalam Kontrak Kinerja Kemenkeu-*Three* KPPN Sanggau tahun 2023. Target tersebut meningkat dari target kontrak kinerja tahun sebelumnya sebesar 83.
	Realisasi tahun 2023	Nilai kualitas LK tingkat UAKPA dan UAKPB tahun 2023 yaitu sebesar 86.85.
	Perhitungan / penjelasan perolehan	Nilai diperoleh dari hasil penilaian Kanwil DJPb sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah DJPb Provinsi Kalimantan Barat Nomor KEP-176/WPB.17/2023
	Perbandingan antara target dan realisasi tahun 2023	**TABEL 3.39** Capaian IKU Nilai kualitas LK tingkat UAKPA dan UAKPB Tahun 2023

Target/ Realisasi	Trw I	Trw II	Smt I	Trw III	s.d. Trw III	Trw IV	Tahunan	Pol /KP
Target	-	-	-	-	-	84	84	Maximize / *Take Last Known Value*
Realisasi	-	-	-	-	-	86.85	86.85	
Indeks Capaian	-	-	-	-	-	103.39%	103.39%	

Sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.39, nilai realisasi tahunan IKU (yang diperoleh pada triwulan IV tahun 2022) sebesar 86.85 tersebut melampaui target IKU sebesar 84 dengan indeks capaian 103.39%.

Perbandingan antara capaian kinerja tahun 2023 dengan beberapa tahun terakhir

Perkembangan Nilai kualitas LK tingkat UAKPA dan UAKPB dari tahun 2020 s.d 2023 ditunjukkan pada Tabel 3.40 dan Grafik 3.14

TABEL 3.40
Perkembangan Nilai kualitas LK tingkat UAKPA dan UAKPB Tahun 2020—2023

Uraian	2020	2021	2022	2023
Target	81	82	83	84
Realisasi	84,50	86	91,34	86.85
Nilai	**104,32%**	**104,88%**	**110,05%**	**103.39%**

GRAFIK 3.14
Perkembangan Nilai kualitas LK tingkat UAKPA dan UAKPB Tahun 2018—2022

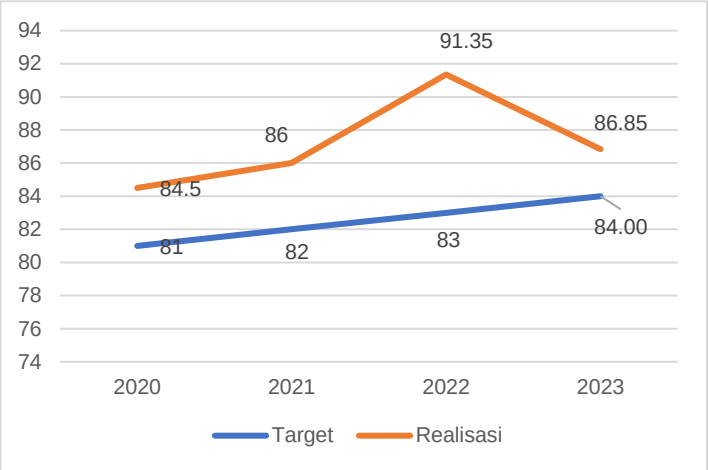

Sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.40 dan Grafik 3.14, Nilai kualitas LK tingkat UAKPA dan UAKPB meningkat dan mencapai nilai tertinggi pada tahun 2022 dengan capaian 91.35, namun pada tahun 2023 nilai kualitas LK tingkat UAKPA dan UAKPB sebesar 86.85 mengalami penurunan sebanyak 4.50 point dibanding realisasi tahun 2022.

Isu, permasalahan, tantangan, dan tindakan, serta analisis pelaksanaan rencana aksi dan mitigasi risiko

Kriteria penilaian kualitas Laporan Keuangan tingkat UAKPA dan UAKPB lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan meliputi

1. Ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan
2. keakuratan data laporan keuangan
3. kepatuhan pelaksanaan anggaran
4. Penyajian Laporan Keuangan
5. Partisipasi
6. Laporan BMN

Pada periode penilaian tahun 2023, kriteria partisipasi masih rendah sehingga masih memungkinkan untuk ditingkatkan. Capaian IKU Nilai Kualitas LK Tingkat UAKPA dan UAKPB berdasarkan nota dinas Kanwil.

Adapun tindakan yang telah dilaksanakan antara lain:

1. Melakukan monitoring transaksi keuangan dan BMN pada MONSAKTI
2. Koordinasi dengan KPPN selaku Kuasa BUN
3. Penyusunan laporan lebih awal
4. Redesain Laporan Keuangan dan BMN

		5. Koordinasi dengan Unit Akuntansi dan Barang Tingkat Wilayah 6. Meningkatkan keaktifan pengelola UAKPA dan UAKPB
	Analisis Penyebab	1. Penyajian laporan perlu ditingkatkan 2. Estetika penulisan perlu perbaikan 3. Media yang dibutuhkan dalam pembuatan laporan mengalami kendala 4. Jadwal penyampaian laporan yang tidak konsisten
	Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya	Efisiensi pelaksanaan anggaran KPPN Sanggau untuk tahun 2023 sudah baik, terbukti dengan capaian efisiensi sebesar 20 dari batas nilai antara -20 sampai dengan 20 dan nilai efisiensi sebesar 100.
	Rencana aksi masa depan	1. Melakukan monitoring transaksi keuangan dan BMN pada MONSAKTI 2. Penyusunan laporan lebih awal 3. Mengikuti Diklat atau *e-learning* yang berkaitan dengan penyusunan LK dan laporan BMN 4. Segera menyelesaikan To Do List pada MONSAKTI setiap akhir periode pelaporan
9c-N	Persentase kualitas pengelolaan BMN dan Pengadaan	Kualitas pengelolaan BMN dan Pengadaan di tahun 2023 berfokus pada proses pengajuan sertipikasi, pemanfaatan aplikasi BMN dan pemanfaatan aplikasi pengadaan. IKU diukur dari 3 komponen yakni: 1. Proses Pengajuan Sertipikasi Dalam rangka pengamanan BMN berupa tanah di Kementerian Keuangan, maka seluruh BMN berupa tanah yang dikuasai Kementerian Keuangan harus disertifikatkan atas nama pemerintah Republik Indonesia c.q. Kementerian Keuangan. Komponen ini bertujuan untuk memastikan BMN berupa tanah di Kementerian Keuangan yang belum bersertipikat telah diajukan ke Kantor Pertanahan untuk disertifikatkan atas nama Pemerintah Republik Indonesia c.q. Kementerian Keuangan. 2. Pemanfaatan Aplikasi BMN Mengukur penggunaan aplikasi BMN (e-sewa BMN) oleh Satuan Kerja di lingkungan Kementerian Keuangan. 3. Pemanfaatan Sistem Pengadaan Persentase dukungan ITKP yang dijadikan IKU Mandatory di tahun 2023 berfokus pada pemanfaatan sistem aplikasi pengadaan yang terdiri : a. SiRUP Pemanfaatan SiRUP diukur menggunakan indikator Persentase Pemanfaatan SiRUP. Indikator ini diukur dari Total Anggaran Belanjan Barang dan Belanja Modal tahun 2024 yang diumumkan di SiRUP dibandingkan dengan total anggaran dan belanja modal tahun anggaran 2024 yang menjadi target b. e-Tendering Pemanfaatan e-Tendering diukur menggunakan indikator Persentase Pemanfaatan e-Tendering. Indikator ini diukur dari dari nilai pagu E-Tendering (Jumlah nilai pagu paket di SPSE) pada aplikasi SPSE dibagi dengan data nilai pagu E-Tendering (Jumlah nilai pagu paket di RUP) pada aplikasi SiRUP c. e-Purchasing Pemanfaatan e-Purchasing diukur menggunakan indikator Persentase Pemanfaatan e-Purchasing. Indikator ini diukur dari Jumlah Paket e-Purchasing Selesai dibagi Jumlah Paket

e-Purchasing Aktif x 100%. Paket e-Purchasing dinyatakan selesai jika dicatatkan minimal hingga tahapan serah terima. Paket aktif adalah paket E-Purchasing yang memiliki status negosiasi, PPK/Penyedia setuju, kirim, dan selesai.

d. Non e-Tendering dan Non e-Purchasing

Pemanfaatan Non e-tendering dan non e-Purchasing diukur menggunakan indikator Persentase Pemanfaatan Non e-tendering dan non e-purchasing. Indikator ini diukur dari Persentase dari data Non E-Tendering dan Non E-Purchasing (Jumlah nilai pagu paket di SPSE) pada aplikasi SPSE dibagi dengan data Non E-Tendering & Non E-Purchasing (Jumlah nilai pagu paket di RUP) pada aplikasi SiRUP.

e. e-Kontrak

Pemanfaatan e-Kontrak diukur menggunakan indikator Persentase Pemanfaatan e-Kontrak. Indikator ini diukur dari Persentase dari data jumlah paket selesai yang dicatatkan rincian kontrak pada fitur E-kontrak di aplikasi SPSE dibagi data jumlah seluruh paket yang telah selesai metode pemilihannya pada aplikasi SPSE. Dengan adanya indikator tersebut diharapkan ITKP target minimal baik di tahun 2024 dapat tercapai

Cara ukur / formula

Realisasi IKU = (Realisasi 1 + Realisasi 2 + Realisasi 3) / 3

Realisasi 1 = Proses Pengajuan Sertifikasi

Realisasi 2 = Pemanfaatan Aplikasi BMN

Realisasi 3 = Pemanfaatan Sistem Pengadaan

Target tahun 2023

Target IKU tersebut untuk tahun 2023 adalah sebesar 100% sebagaimana ditetapkan dalam Kontrak Kinerja Kemenkeu-*Three* KPPN Sanggau Tahun 2023. Target IKU tersebut sama dengan target dalam kontrak kinerja tahun sebelumnya yaitu 100% dan sama dengan target yang ditetapkan dalam Renstra Ditjen Perbendaharaan tahun 2020-2024 yaitu sebesar 100%.

Realisasi tahun 2023

Persentase kualitas pengelolaan BMN dan Pengadaan tahun 2023 yaitu sebesar 120%.

Perhitungan / penjelasan perolehan

Nilai diperoleh dari hasil penilaian Sekretariat Direktorat Jenderal, Ditjen Perbendaharaan sesuai dengan Nota Dinas Sekretaris Direktorat Jenderal Nomor ND-118/PB.1/2024 tanggal 10 Januari 2024.

Perbandingan antara target dan realisasi tahun 2023

TABEL 3.41
Capaian IKU Persentase kualitas pengelolaan BMN dan Pengadaan Tahun 2023

Target/ Realisasi	Trw I	Trw II	Smt I	Trw III	s.d. Trw III	Trw IV	Tahunan	Pol /KP
Target	-	-	-	-	-	100%	100%	Maximize / *Take Last Known Value*
Realisasi	-	-	-	-	-	120%	120%	
Indeks Capaian	-	-	-	-	-	120%	120%	

Sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.41, nilai realisasi tahunan IKU (yang diperoleh pada triwulan IV tahun 2023) sebesar 120% tersebut melampaui target IKU sebesar 100% dengan indeks capaian 120%.

Perbandingan antara capaian kinerja tahun 2023 dengan beberapa tahun terakhir

Perkembangan persentase kualitas pengelolaan BMN dan Pengadaan tidak dapat disajikan karena merupakan IKU baru yang tidak memiliki data historis.

	Isu, permasalahan, tantangan, dan tindakan, serta analisis pelaksanaan rencana aksi dan mitigasi risiko	Kualitas pengelolaan BMN dan Pengadaan di tahun 2023 berfokus pada proses pengajuan sertifikasi, pemanfaatan aplikasi BMN dan pemanfaatan aplikasi pengadaan. pemanfaatan aplikasi pengadaan yang terdiri dari : 1. SiRUP 2. e-tendering 3. e-Purchasing 4. Non e-Tendering dan Non e-Purchasing 5. e-Kontrak Adapun langkah-langkah yang telah dilaksanakan antara lain: 1. Melengkapi data master aset SIMAN 2. Menyampaikan laporan wasdal dan RKBMN tepat waktu 3. Membuat RP4 dan melakukan update perubahan RP4 sesuai periodisasinya 4. Berkoordinasi dengan Subbag Aset dan Pengadaan Kantor Pusat dan Kantor Wilayah 5. Melakukan sensus BMN yang mempunyai KIB dan melakukan input pada SIMAN 6. Melakukan pendataan aset untuk dihapuskan 7. Berkoordinasi secara intensif dengan PPK dan Pejabat Pengadaan dalam penginputan pada Aplikasi terkait Pengadaan seperti SiRUP, SiMPEL, e-Tendering, e-Kontrak dll
	Analisis penyebab	1. SDM belum berpengalaman menggunakan aplikasi pengadaan 2. Tingkat kerumitan penggunaan aplikasi dan repetitif akibat banyaknya aplikasi dengan fungsi sama 3. Tingkat kendali pengguna aplikasi pengadaan yang tidak dalam kewenangan subbag umum (user PPK) sehingga tingkat keberhasilan penginputan pada aplikasi Pengadaan tergantung pada pihak lain (PPK)
	Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya	Efisiensi pelaksanaan anggaran KPPN Sanggau untuk tahun 2023 sudah baik, terbukti dengan capaian efisiensi sebesar 20 dari batas nilai antara -20 sampai dengan 20 dan nilai efisiensi sebesar 100.
	Rencana aksi masa depan	1. Melakukan tahapan penyelesaian pekerjaan sesuai dengan skala prioritas dan melakukan updating data BMN secara berkala 2. Melakukan manajemen aset secara menyeluruh dengan memanfaatkan aplikasi yang tersedia dan arahan dari pusat 3. Memanfaatkan berbagai portal pemerintah serta berbagai metode pembayaran untuk fleksibilitas pengadaan 4. Melakukan input nomor bukti pada aplikasi SIMPEL/SIRUP secara rutin
B. REALISASI ANGGARAN		Pada tahun anggaran 2023 realisasi anggaran belanja yang dapat dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Sanggau sebesar 98.16% atau sebesar **Rp 1.908.757.648,-** dari anggaran yang tersedia dalam DIPA 2023 sebesar **1.944.519.000**,- Dalam pelaksanaan anggaran tahun 2023 Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Sanggau mengelola beberapa output belanja yang terdiri dari: **1. Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan**

Dana yang tersedia pada output ini dipergunakan untuk menunjang pencapaian sasaran yang telah ditentukan yaitu rekomendasi atas kinerja investasi pemerintah.

Realisasi belanja yang telah digunakan untuk pencapaian sasaran pada output ini sebesar Rp2.800.000,- atau sebesar 68.43% dari dana yang tersedia sejumlah Rp4.092.000,-

2. Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara

Kegiatan komunikasi, Edukasi dan Standardisasi mempunyai beberapa output salah satu nya adalah Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara. Dana yang tersedia pada output ini dipergunakan untuk menunjang pencapaian sasaran yang telah ditentukan yaitu komunikasi dan edukasi implementasi Aplikasi

Realisasi belanja yang telah digunakan untuk pencapaian sasaran pada output ini sebesar Rp22.760.000,- atau sebesar 100.00% dari dana yang tersedia sejumlah Rp22.760.000,-

3. Pengelolaan Keuangan Negara

Kegiatan komunikasi, Edukasi dan Standardisasi mempunyai beberapa output salah satu nya adalah Pengelolaan Keuangan Negara. Dana yang tersedia pada output ini dipergunakan untuk menunjang pencapaian sasaran yang telah ditentukan yaitu edukasi dalam rangka penyusunan laporan keuangan tingkat Kuasa BUN.

Realisasi belanja yang telah digunakan untuk pencapaian sasaran pada output ini sebesar Rp21.048.000,- atau sebesar 100.00% dari dana yang tersedia sejumlah Rp21.048.000,-

4. Pengelolaan Pelaksanaan Anggaran dan Pembiayaan

Kegiatan komunikasi, Edukasi dan Standardisasi mempunyai beberapa output salah satu nya adalah Pengelolaan Pelaksanaan Anggaran dan Pembiayaan. Dana yang tersedia pada output ini diperguanakan untuk menunjang pencapaian sasaran yang telah ditentukan yaitu konsultasi pencairan dana

Realisasi belanja yang telah digunakan untuk pencapaian sasaran pada output ini sebesar 19.222.700,- atau sebesar 82.36% dari dana yang tersedia sejumlah Rp23.340.000,-

5. Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara

Kegiatan monev perbendaharaan, kekayaan negara dan Risiko mempunyai output :

a. Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara
b. Pengelolaan Pelaksanaan Anggaran dan Pembiayaan

Realisasi belanja yang telah digunakan untuk pelaksanaan sasaran pada output peningkatan kapasitas aparatur negara melalui monev pengembangan kompetensi KPA, PPK, PPSPM, Bendahara, dan Pengelola Perbendaharaan sebesar Rp5.756.061,- atau sebesar 99.52% dari dana yang tersedia sejumlah Rp5.784.000,-

6. Pengelolaan Pelaksanaan Anggaran dan Pembiayaan

Kegiatan monev perbendaharaan, kekayaan negara dan Risiko mempunyai output :

a. Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara
b. Pengelolaan Pelaksanaan Anggaran dan Pembiayaan

Realisasi belanja yang telah digunakan untuk pelaksanaan sasaran pada output Pengelolaan Pelaksanaan Anggaran dan Pembiayaan melalui: Monev Penerimaan dan Pengeluaran Kas dan

Reviu Belanja Pemerintah sebesar Rp57.433.744,- atau sebesar 90.83% dari dana yang tersedia sejumlah Rp8.184.000,-

7. Pengelolaan Pelaksanaan Anggaran dan Pembiayaan

Output ini mempunyai sasaran yang telah ditentukan:

a. Koordinasi dan Rekonsiliasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas

b. Surat Perintah Pencairan/Penarikan/Repayment/Pengesahan Dana

Kedua kegiatan tersebut diatas mempunyai realisasi sebesar Rp4.056.000,- atau sebesar 75.00% dari dana yang tersedia sebesar Rp5.408.000,-

8. Pengelolaan Keuangan Negara

Kegiatan Penyelenggaraan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Negara mempunyai output pengelolaan keuangan Negara dengan realisasi sebesar Rp1.152.000,- atau sebesar 76.80% dari dana yang tersedia sebesar Rp1.500.000,-

9. Layanan Dukungan Manajemen Internal

Dana yang tersedia pada output ini diperguanakan untuk menunjang pencapaian sasaran yang telah ditentukan yaitu:

a. Kerumahtanggaan

b. Dukungan Pimpinan dan Keprotokoleran

c. Layanan Perkantoran

Realisasi belanja yang telah digunakan untuk pelaksanaan sasaran pada output ini sebesar Rp1.058.256.822,- atau sebesar 99.19% dari dana yang tersedia sejumlah Rp1.066.875.000,-

10. Layanan Sarana dan Prasarana Internal

Dana yang tersedia pada output ini diperguanakan untuk menunjang pencapaian sasaran yang telah ditentukan yaitu:

a. Peralatan Fasilitas Perkantoran

b. Gedung/Bangunan

Realisasi belanja yang telah digunakan untuk pelaksanaan sasaran pada output ini sebesar Rp585.323.049,- atau sebesar 97.96% dari dana yang tersedia sejumlah Rp597.490.000,-

11. Komunikasi Publik

Dana yang tersedia pada output ini diperguanakan untuk menunjang pencapaian sasaran yang telah ditentukan yaitu:

a. Pembinaan / Edukasi Publik;

b. Kehumasan.

Realisasi belanja yang telah digunakan untuk pelaksanaan sasaran pada output ini sebesar Rp8.344.700,- atau sebesar 92.72% dari dana yang tersedia sejumlah Rp9.000.000,-

12. Layanan Dukungan Manajemen Internal

Dana yang tersedia pada output ini diperguanakan untuk menunjang pencapaian sasaran yang telah ditentukan yaitu Hasil Survei/Rekomendasi kepuasan pengguna layanan da layanan perkantoran.

Realisasi belanja yang telah digunakan untuk pelaksanaan sasaran pada output ini sebesar Rp163.293.000,- atau sebesar 97.23% dari dana yang tersedia sejumlah Rp167.952.000,-

13. Layanan Manajemen SDM Internal

Dana yang tersedia pada output ini dipergunakan untuk menunjang pencapaian sasaran yang telah ditentukan yaitu Pengembangan SDM.

Realisasi belanja yang telah digunakan untuk pelaksanaan sasaran pada output ini sebesar Rp4.148.600,- atau sebesar 98.08% dari dana yang tersedia sejumlah Rp4.230.000,-

Adapun perbandingan pagu dan realisasi belanja unit (per jenis belanja) beberapa tahun terakhir dapat disajikan dalam tabel dibawah ini:

2023				
Ket	Pegawai	Barang	Modal	Total
PAGU	166.452.000	1.180.577.000	597.490.000	1.944.519.000
REALISASI	162.723.000	1.160.711.599	585.322.982	1.908.757.581
PERSENTASE	97.76%	98.32%	97.96%	98.16%
SISA	3.729.000	19.865.401	12.167.018	35.761.419
2022				
Ket	Pegawai	Barang	Modal	Total
PAGU	167,924,000	1,200,631,000	69,167,000	1,437,722,000
REALISASI	166,277,000	1,192,587,313	68,992,000	1.427,856,616
PERSENTASE	99,02%	99,33%	99,75%	99.31%
SISA	1,647,000	8,043,687	175,000	9,865,384
2021				
Ket	Pegawai	Barang	Modal	Total
PAGU	172,296,000	1,033,561,000	48,300,000	1.254.157.000
REALISASI	171,466,000	1,029,947,287	48,214,894	1.249.628.181
PERSENTASE	99,52%	99,65%	99,82%	99.64%
SISA	830,000	3,613,713	85,106	4,528,819
2020				
Ket	Pegawai	Barang	Modal	Total
PAGU	179,040,000	1,138,702,000	575,775,000	1,893,517,000
REALISASI	178,163,000	1,103,016,672	575,775,000	1,856,954,672
PERSENTASE	99.51%	96.87%	100.00%	98.07%
SISA	877,000	35,685,328	-	36,562,328
2019				
Ket	Pegawai	Barang	Modal	Total
PAGU	188,162,000	1,338,382,000	7,270,000	1,533,814,000
REALISASI	187,988,000	1,334,556,147	7,270,000	1,529,814,147
PERSENTASE	99.91%	99.71%	100.00%	99.74%
SISA	174,000	3,825,853	-	3,999,853

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya (keuangan)	Efisiensi pelaksanaan anggaran KPPN Sanggau untuk tahun 2023 sudah baik, terbukti dengan capaian efisiensi sebesar 20 dari batas nilai antara -20 sampai dengan 20 dan nilai efisiensi sebesar 100.
C. KINERJA LAINNYA	Selain 9 (sembilan) Sasaran Strategis yang diterapkan, KPPN Sanggau juga menghasilkan kinerja-kinerja lain selama tahun 2023 yang tidak masuk dalam Kontrak Kinerja KPPN Sanggau, tetapi terkait dengan tugas dan fungsi KPPN Sanggau. Kinerja lain-lain tersebut adalah sebagai berikut: **1. Inovasi Manajemen/Pelayanan** **a. Inovasi MANDAU (Monitoring dan Agenda KPPN Sanggau)** Inovasi Monitoring Agenda KPPN Sanggau merupakan tools yang digunakan oleh seluruh pegawai KPPN Sanggau untuk memonitoring batas waktu penyelesaian laporan maupun kegiatan lainnya. Tools ini memuat seluruh agenda dan laporan pada masing-masing seksi dan subbagian yang disajikan dalam *google spreadsheet*. Dengan adanya inovasi MANDAU ini maka dapat meningkatkan pemantauan dan pengawasan internal dalam hal pemenuhan pelaksanaan kegiatan dan penyampaian laporan oleh KPPN baik yang bersifat rutin maupun insidentil. Data pada MANDAU akan diupdate pada setiap awal minggu dan harian untuk kegiatan yang insidentil, untuk setiap kegiatan maupun laporan yang telah selesai dilaksanakan akan diberi keterangan atau tanda bahwa kegiatan telah selesai dilaksanakan. MANDAU dilengkapi dengan informasi berupa : - Jenis Kegiatan/Laporan - Nama Kegiatan - Tanggal/Batas Waktu Pelaksanaan - Dokumen Pendukung - PIC - Status Kegiatan/Laporan - Keterangan MANDAU menjadi alat kontrol untuk memantau pelaksanaan kegiatan dan penyelesaian laporan yang sebelumnya terdapat beberapa kondisi penyampaian laporan dan pelaksanaan kegaitan tidak tepat waktu. Berdasarkan evaluasi yang telah dilakukan, MANDAU dinilai efisien dan efektif dalam memonitoring penyelesaian kegiatan dan laporan yang dilaksanakan oleh seluruh pegawai KPPN Sanggau. MANDAU dapat mengurangi risiko keterlambatan penyampaian laporan serta menjadi alat pengingat. MANDAU memberikan dampak positif kepada seluruh pegawai dalam melaksanakan kewajiban pelaporan karena dapat dipantau secara mandiri oleh pimpinan dan seluruh pegawai. 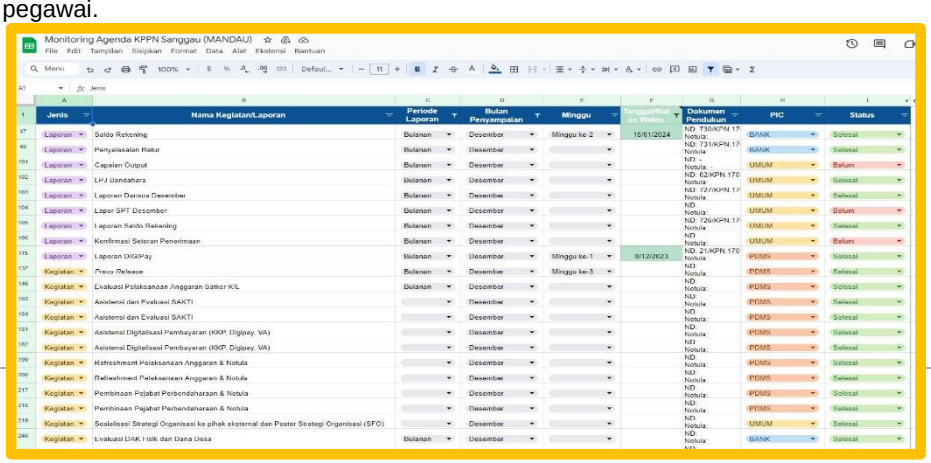

b. Inovasi SAMER

Digital Payment (Digipay) merupakan system aplikasi pembayaran digital yang menggunakan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) dan/atau CMS Virtual Account yang dikembangkan oleh Kementerian Keuangan bekerja sama dengan Bank HIMBARA. Ekosistemnya terbentuk dari Satuan Kerja pengelola Uang Persediaan (UP) APBN dan vendor/toko/warung/dll (UMKM) dengan berbasis rekening pada satu bank yang sama.

Manfaat penggunaan Digipay :

1) Bagi Satuan Kerja
   - Proses bisnis pengadaan dan pembayaran yang terintegrasi
   - Tersediannya banyak vendor dan barang/jasa dalam satu platform
   - Pertanggungjawaban dan pelaporan APBN yang lebih mudah
2) Bagi Pihak Ketiga/Vendor
   - Pembayaran yang lebih pasti
   - Peluang menjadi rekanan di banyak satuan kerja
   - Tersedianya fasilitas pembiayaan dari Bank

Dalam rangka untuk mendukung pengimplementasian Digipay Marketplace pada satuan kerja lingkup KPPN Sanggau, KPPN selaku perpanjangan tangan pemerintah dalam digitalisasi pembayaran belanja APBN membuat inovasi SAMER (Semua Masuk Digipay *Marketplace*). Inovasi SAMER dilakukan dalam bentuk kegiatan “blusukan” kje satuan kerja dan vendor/UMKM untuk dapat bergabung dalam penggunaan Digipay. Inovasi SAMER mempunyai tujuan:

1) Memperbanyak vendor/UMKM untuk bergabung dalam Digipay
2) Mengajak satuan kerja untuk dapat menggunakan Digipay dalam pengadaan barang/jasa sehingga dapat meminimalisasi penggunaan uang tunai dalam belanja Uang Persediaan pada Satuan Kerja
3) Memberikan bimbingan teknis aplikasi kepada vendor dan juga satuan kerja
4) Sebagai salah satu strategi dalam pemberdayaan UMKM

Pihak – Pihak yang terlibat dan dibutuhkan dalam mendukung inovasi ini adalah :

1) Satuan Kerja
2) Vendor/UMKM
3) KPPN Selaku BUN
4) Perbankan (HIMBARA)

c. Inovasi Si Dare (Cleansing Data Rekening)

Retur SP2D adalah penolakan/pengembalian atas pemindahbukuan dan/atau transfer pencairan APBN dari Bank Penerima kepada Bank Pengirim. Retur SP2D dapat terjadi karena kesalahan nama rekening, nomor rekening, atau rekening inaktif yang mengakibatkan kegagalan bank dalam mentransfer dana ke rekening penerima. Hal – hal yang menyebabkan Retur adalah rekening tutup/tidak aktif dan kesalahan nama/nomor rekening.

KPPN Sanggau mempunyai tugas menyalurkan dana APBN kepada yang berhak yakni Satuan Kerja, Pemerintah Daerah, maupun masyarakat. Penyaluran dana APBN kepada pihak yang berhak ada yang mengalami kegagalan. Hal ini disebabkan salah satu nya oleh kesalahan pencantuman nama/nomor rekening penerima, sehingga dana APBN yang disalurkan Kembali lagi pada Kas Negara.

Mekanisme penyelesaian retur dana desa dapat disampaikan sebagai berikut :

1) KPPN Sanggau menyampaikan surat pemberitahuan retur kepada KPA Penyalur, KPA Penyalur menyampaikan pemberitahuan retur ke Pemda (BPKAD/DPMPD) untuk melakukan perbaikan/konfirmasi rekening yang benar
2) Pemda (BPKAD/DPMPD) menyampaikan perbaikan konfirmasi rekening yang benar disertai bukti Buku rekening/rekening koran serta mengupdate data rekening di OMSPAN
3) KPA Penyalur membuat nota perbaikan ke KPPN

Dengan adanya retur, maka berdampak pada:

1) Terlambatnya penyaluran Dana Desa dari RKUN ke Rekening Desa
2) Terhambatnya pembiayaan pembangunan desa

Dalam rangka untuk mendukung pembangunan daerah dan mampercepat penyaluran dana desa, serta mendukung Gerakan zero retur, maka KPPN Sanggau selaku Penyalur DDOIDK membuat inovasi berupa **"Si Dare"** dalam bentuk SOP konfirmasi rekening desa. Tujuan dari inovasi ini adalah untuk meminimalisir retur penyaluran dana desa dan memastikan penyaluran dana desa tepat waktu dan tepat jumlah.

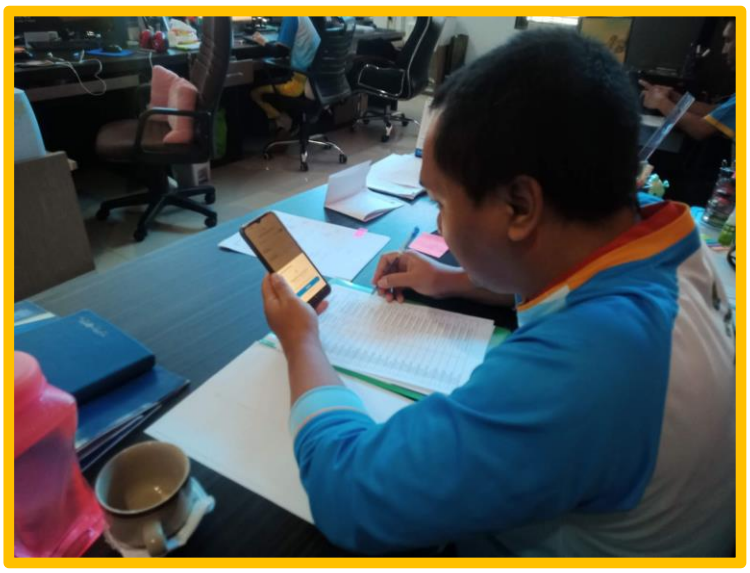

d. Inovasi RIAM LPJ

Laporan Pertanggungjawaban Bendahara (LPJ Bendahara) merupakan laporan yang dibuat oleh Bendahara Pengeluaran/Penerimaan atas uang/surat berharga yang dikelolanya sebagai pertanggungjawaban pengelolaan uang. Batas waktu penyampaian LPJ Bendahara satker ke KPPN adalah tanggal 10 bulan berikutnya atau jika pada tanggal 10 tersebut bertepatan dengan hari libur maka batasnya adalah pada hari kerja sebelumnya.

Dasar hukum penyusunan dan penyampaian LPJ Bendahara adalah Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Noor PER-2/PB/2014 tentang Petunjuk Teknis Penatausahaan, Pembukuan, dan Pertanggungjawaban Bendahara pada Satuan kerja Pengelola APBN serta Verifikasi Laporan Pertanggungjawaban Bendahara dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.05/2013 Tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola APBN.

Mulai tahun 2023, Direktorat Jenderal Perbendaharaan sudah mulai menggunakan SAKTI Web full Modul bagi Satuan Kerja Direktur Jenderal Perbendaharaan khususnya KPPN. Terkait dengan penggunaan SAKTI, LPJ Bendahara merupakan output dari penggunaan salah satu modul di SAKTI yaitu Modul Bendahara. LPJ beserta ADK LPJ Bendahara Penerimaan maupun Pengeluaran diperoleh satker dari SAKTI, maka satker wajib mengupload LPJ beserta ADK LPJ Bendahara tersebut ke aplikasi SPRINT (Sistem Pengelolaan Rekening Terintegrasi). Untuk selanjutnya seki verifikasi dan akuntansi di KPPN yang bersangkutan dapat melakukan proses rekonsiliasi dan verifikasi pada LPJ Bendahara yang telah disampaikan.

Untuk mendukung satuan kerja dan membantu menyelesaikan kendala yang dihadapi satuan kerja dalam penyampaian LPJ Bendahara, KPPN berinisiatif untuk membuat suatu platform melalui google site untuk memberikan tutorial berupa video dan juknis mengenai hal-hal yang harus diperiksa oleh bendahara dalam membuat LPJ Bendahara pada Aplikasi SAKTI sampai dengan tahap penyampaian LPJ pada aplikasi SPRINT agar LPJ yang dilaporkan tepat dan akurat.

Dampak yang diberikan dengan adanya inovasi adalah proses penyampaian LPJ Bendahara satuan kerja dapat lebih akurat dan mengurangi kesalahan yang terjadi sehingga penyampaian LPJ dapat lebih cepat dilakukan validasi ataupun approve.

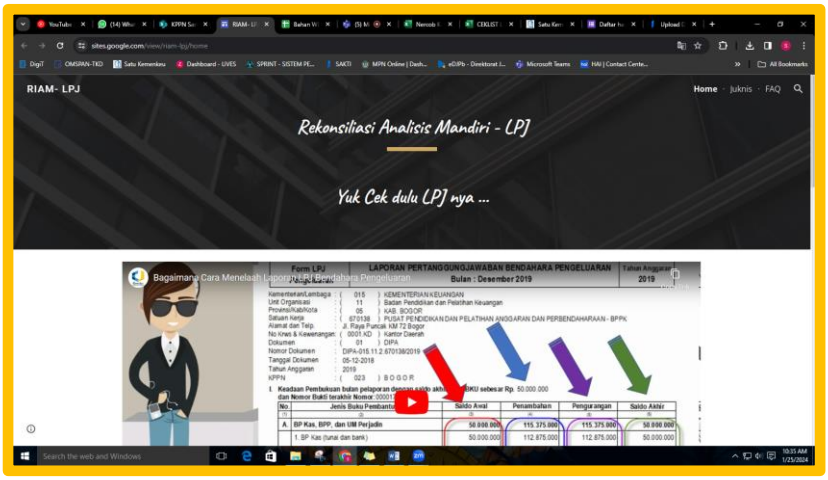

e. Inovasi FAFC

Inovasi ini dibuat dengan membangun Forum *Financial Advisor Fun Club (FAFC),* Dimana sebelumnya tidak pernah ada forum sejenis. Forum *FAFC* bersifat unik karena dilakukan secara fleksibel, tidak harus dalam suasana kantor dan jam kantor. Memiliki keaslian karena ide dimulai idenya dari pegawai KPPN Sanggau. Kearifan local wilayah Sanggau, Dimana Masyarakat memiliki kebiasaan untuk duduk ngopi di warung. Hal ini memberikan ide bahwa diskusi terkait keuangan pusat dan keuangan daerah serta perekonomian daerah tidak hanya dilakukan di kantor, namun juga di luar kantor dalam suasana santai. Kegiatan ini melibatkan seluruh pegawai KPPN dan stakeholder eksternal yang terkait.

Berdasarkan Keputusan Dirjen Perbendaharaan Nomor KEP3/PB/2023 tentang Pembentukan *Shadow Organization* pada Instansi Vertikal Ditjen Perbendaharaan, KPPN Tipe A2 Sanggau telah menindaklanjuti dengan menugaskan pegawai untuk menjalankan peran dalam *Shadow Organization* melalui Surat Keputusan KPPN Sanggau Nomor KEP11/KPN.1703/2023 tanggal 11 Januari 2023 tentang Struktur *Shadow Organization* Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Sanggau sebagaimana diubah dengan KEP29/KPN.1703/2023 tanggal 24 Maret 2023. Pembentukan *Shadow Organization* tersebut menjadi pondasi penguatan pelaksanaan tugas KPPN sebagai *Treasurer*, *Regional Economist* dan *Financial Advisor* (TREFA).

Di samping pelaksanaan peran dalam *Shadow Organization* terdapat beberapa kegiatan standarisasi manajemen yang merupakan perwujudan peran KPPN sebagai *Treasurer*, wakil Menteri Keuangan di Daerah, dan Pengelola Fiskal di Daerah, yang merupakan penguatan dari implementasi PMK Nomor 262/PMK.01/2016.

Beberapa kegiatan dalam pelaksanaan peran tersebut memiliki irisan, baik terkait waktu pelaksanaan, *stakeholder* yang terlibat, substansi materi dan lain-lain.

Financial Advisor merupakan fungsi baru yang melengkapi fungsi KPPN sebagai Kuasa BUN Daerah atau Treasurer. Dalam rangka menguatkan peran sebagai *Financial Advisor* tersebut KPPN Sanggau telah memandang penting untuk membentuk Forum *Financial Advisor Fun Club* (FAFC). Forum FAFC menjadi wadah untuk peningkatan kompetensi maupun implementasi *Financial Advisory*.

Konsep FAFC dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Merupakan wadah dan sarana untuk peningkatan kompetensi pegawai di bidang *data analytic*, perekonomian daerah, pertumbuhan ekonomi, indicator kesejahteraan masyarakat, pengelolaan perbendaharaan, APBN/APBD, dan lain-lain.
2. Merupakan wadah untuk diskusi dan penulisan tematik tentang perekonomian daerah, pertumbuhan ekonomi, pengelolaan dana transfer ke daerah, pembinaan perbendaharaan satuan kerja K/L dan lain-lain.
3. Pelaksanaan FAFC kegiatan secara fleksibel, dapat dilakukan di kantor maupun di luar kantor dalam suasana serius maupun santai. Dapat dilakukan melalui daring maupun luring.

Manfaat Forum FAFC:

1. Meningkatkan kompetensi SDM agar siap menjadi *Financial Advisor* di daerah.
2. Mendukung pelaksanaan peran KPPN sebagai *Treasurer* dan *Financial Advisor*.

3. Meningkatkan fungsi koordinasi dengan *stakeholder* internal dan eksternal.

f. 167 JEkPod (Jumat Edukasi Podcast)

JEkPod Edisi Kesatu

Jumat Edukasi Podcast atau JEKPOD merupakan inovasi terbaru KPPN Sanggau dalam memberikan informasi dengan penyajian yang lebih menarik. Dalam jekpod ini tidak hanya membahas terkait tugas dan fungsi KPPN tapi bisa juga menjadi sarana untuk promosi umkm atau info info lain yang bisa membantu dan menambah wawasan masyarakat ketika menonton jekpod.

Inovasi ini merupakan inovasi baru yang ada di KPPN Sanggau dan telah dikeluarkan episode 1 jekpod dan membahas terkait Jaminan Pembayaran Akhir Tahun 2023, Episode 2 dengan tema membahas terkait pelaksanaan pembayaran belanja pemerintah pusat dengan mekanisme melalui Aplikasi *digital payment* (DIGIPAY), video episode dua tersebut dikeluarkan pada pertengahan bulan Agustus 2023. Episode Ketiga dengan tema tata cara Pembayaran tagihan APBN melalui Rekening Penampungan Akhir Tahun Anggaran (RPATA). Rekening Penampungan Akhir Tahun Anggaran atau disebut RPATA adalah rekening lain-lain milik BUN untuk menampung dana atas penyelesaian pekerjaan yang direncanakan untuk diserahterimakan di antara batas akhir pengajuan tagihan kepada negara s.d. tanggal 31 Desember tahun anggaran berkenaan dan pekerjaan yang tidak terselesaikan sampai dengan akhir TA yang penyelesaiannya diberikan kesempatan untuk dilanjutkan pada tahun anggaran berikutnya. RPATA diatur dalam PMK Nomor 109 Tahun 2023 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran atas Pekerjaan yang Belum Diselesaikan pada Akhir Tahun Anggaran. Video tersebut dikeluarkan pada akhir tahun 2023.

JEkPod Edisi Kedua

JEkPod Edisi Ketiga

2. **Penghargaan-penghargaan**

   a. **Inovasi MANDAU Sebagai Inovasi Terbaik Kategori Tata Kelola Internal**

   KPPN Sanggau di Tahun 2023 mendapatkan penghargaan dari Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Barat pada Festival Inovasi Lingkup Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Barat tahun 2023, penghargaan tersebut adalah ditetapkannya Inovasi MANDAU pada KPPN Sanggau sebagai Inovasi Terbaik Kategori Tata Kelola Internal.

Inovasi Terbaik Kategori Tata Kelola Internal Tahun 2023 Lingkup Kanwil DJPb Prov Kalimantan Barat

b. **Peringkat II Capaian IKU Nilai Kinerja Penyaluran Dana Transfer ke Daerah Terbaik Periode Triwulan II Tahun 2023 Lingkup Kanwil DJPb Prov Kalbar.**

Pada tahun 2023 KPPN Sanggau mendapatkan penghargaan dari Kanwil DJPb Provinsi Kalbar sebagai Peringkat II Capaian IKU Nilai Kinerja Penyaluran Dana Transfer ke Daerah Terbaik Periode Triwulan II tahun 2023 Lingkup Kanwil DJPb Prov Kalbar.

c. **Penghargaan KPPN Terbaik Kedua dalam Pembinaan Satker atas Kinerja Pelaksanaan Anggaran Semester I Tahun 2023 Lingkup Kanwil DJPb Prov Kalbar**

KPPN Sanggau meraih penghargaan sebagai KPPN Terbaik Kedua dalam Pembinaan Satker atas Kinerja Pelaksanaan Anggaran Semester I Tahun 2023 Lingkup Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat.

3. Capaian Lainnya

KPPN yang menjadi Unit *Piloting* Pelaksanaan *Quality Assurance Financial Advisor* pada Belanja Pemerintah Pusat

Melalui Nota Dinas Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan nomor ND-3227/PB.1/203 tanggal 2 Oktober 2023 hal Penunjukan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara untuk Menjadi Unti *Piloting* Implementasi *Quality Assurance* sebagai *Financial Advisor* pada Belanja Pemerintah Pusat, KPPN Sanggau menjadi satau satu kantor yang ditunjuk menjadi unit *piloting*. Dengan adanya penunjukkan sebagai unit *piloting* semakin mempertajam dan menguatkan peran KPPN Sanggau di daerah sebagai *Financial Advisor* khususnya dalam hal belanja pemerintah pusat.

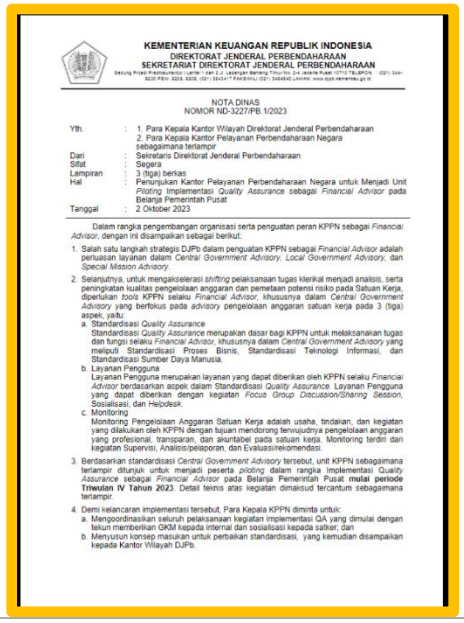

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

NOTA DINAS
NOMOR ND-3227/PB.1/2023

Yth. : 1. Para Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan
2. Para Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
sebagaimana terlampir
Dari : Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Sifat : Segera
Lampiran : 3 (tiga) berkas
Hal : Penunjukan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara untuk Menjadi Unit *Piloting* Implementasi *Quality Assurance* sebagai *Financial Advisor* pada Belanja Pemerintah Pusat
Tanggal : 2 Oktober 2023

Dalam rangka pengembangan organisasi serta penguatan peran KPPN sebagai *Financial Advisor*, dengan ini disampaikan sebagai berikut:

1. Salah satu langkah strategis DJPb dalam penguatan KPPN sebagai *Financial Advisor* adalah perluasan layanan dalam *Central Government Advisory*, *Local Government Advisory*, dan *Special Mission Advisory*.
2. Selanjutnya, untuk mengakselerasi *shifting* pelaksanaan tugas klerikal menjadi analisis, serta peningkatan kualitas pengelolaan anggaran dan pemetaan potensi risiko pada Satuan Kerja, diperlukan *tools* KPPN selaku *Financial Advisor*, khususnya dalam *Central Government Advisory* yang berfokus pada *advisory* pengelolaan anggaran satuan kerja pada 3 (tiga) aspek, yaitu
   a. Standardisasi *Quality Assurance*
   Standardisasi *Quality Assurance* merupakan dasar bagi KPPN untuk melaksanakan tugas dan fungsi selaku *Financial Advisor*, khususnya dalam *Central Government Advisory* yang meliputi Standardisasi Proses Bisnis, Standardisasi Teknologi Informasi, dan Standardisasi Sumber Daya Manusia.
   b. Layanan Pengguna
   Layanan Pengguna merupakan layanan yang dapat diberikan oleh KPPN selaku *Financial Advisor* berdasarkan aspek dalam Standardisasi *Quality Assurance*. Layanan Pengguna yang dapat diberikan dengan kegiatan *Focus Group Discussion/Sharing Session*, Sosialisasi, dan *Helpdesk*.
   c. Monitoring
   Monitoring Pengelolaan Anggaran Satuan Kerja adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilakukan oleh KPPN dengan tujuan mendorong terwujudnya pengelolaan anggaran yang profesional, transparan, dan akuntabel pada satuan kerja. Monitoring terdiri dari kegiatan Supervisi, Analisis/pelaporan, dan Evaluasi/rekomendasi.
3. Berdasarkan standardisasi *Central Government Advisory* tersebut, unit KPPN sebagaimana terlampir ditunjuk untuk menjadi peserta *piloting* dalam rangka implementasi *Quality Assurance* sebagai *Financial Advisor* pada Belanja Pemerintah Pusat **mulai periode Triwulan IV Tahun 2023**. Detail teknis atas kegiatan dimaksud tercantum sebagaimana terlampir.
4. Demi kelancaran implementasi tersebut, Para Kepala KPPN diminta untuk:
   a. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan kegiatan implementasi QA yang dimulai dengan tekun memberikan GKM kepada internal dan sosialisasi kepada satker; dan
   b. Menyusun konsep masukan untuk perbaikan standardisasi, yang kemudian disampaikan kepada Kantor Wilayah DJPb.

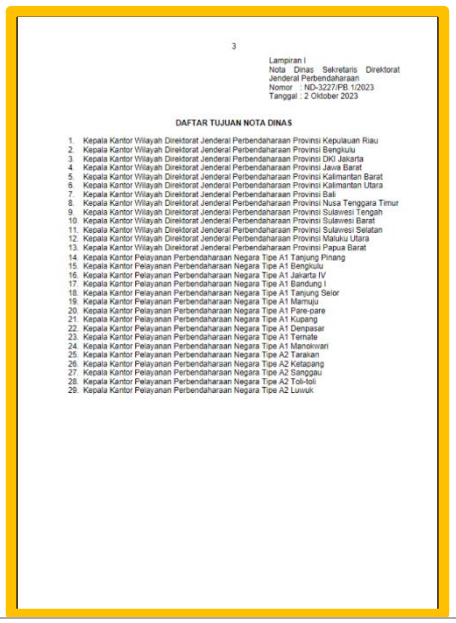

3

Lampiran I
Nota Dinas Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Nomor : ND-3227/PB.1/2023
Tanggal : 2 Oktober 2023

DAFTAR TUJUAN NOTA DINAS

1. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kepulauan Riau
2. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Bengkulu
3. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat
5. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Barat
6. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Utara
7. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Bali
8. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Nusa Tenggara Timur
9. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tengah
10. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Barat
11. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Selatan
12. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Maluku Utara
13. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Papua Barat
14. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A1 Tanjung Pinang
15. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A1 Bengkulu
16. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A1 Jakarta IV
17. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A1 Bandung I
18. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A1 Tanjung Selor
19. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A1 Mamuju
20. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A1 Pare-pare
21. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A1 Kupang
22. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A1 Denpasar
23. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A1 Ternate
24. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A1 Manokwari
25. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A2 Tarakan
26. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A2 Ketapang
27. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A2 Sanggau
28. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A2 Toli-toli
29. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A2 Luwuk

BAB IV

PENUTUP

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja (LAKIN) KPPN Sanggau Tahun 2023 merupakan bentuk pertanggungjawaban pencapaian visi misi KPPN Sanggau dalam tahun anggaran 2023 dan disusun berdasarkan Rencana Kinerja Tahunan yang ditetapkan pada awal tahun anggaran sekaligus sebagai perwujudan pelaksanaan Peraturan Presiden nomor 29 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

KPPN Sanggau merupakan salah satu unit eselon III di lingkungan Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat yang ditinjau dari tugas dan fungsinya memiliki variasi tugas yang beragam. Hal ini mengingat bahwa sebagai hasil reorganisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang merupakan bagian dari pelaksanaan reformasi manajemen keuangan negara, KPPN Sanggau merupakan gabungan dari beberapa tugas dan fungsi yang beragam.

Pada tahun 2023 ini, KPPN Sanggau mendapat tugas tambahan menjalankan *Piloting Quality Assurance Financial Advisor* pada Belanja Pemerintah Pusat. Tugas tambahan ini menegaskan Ditjen Perbendaharaan sedang dan terus melakukan upaya perbaikan dan transformasi menuju organisasi modern dan dapat menjawab tantangan zaman. Tugas dan fungsi sebagai *Financial Advisor* baik pada Belanja Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah memiliki peran yang strategis dalam mendukung pembangunan regional dan nasional untuk kemakmuran negeri. KPPN Sanggau memiliki peran strategis di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan, mengingat bahwa dari keseluruhan siklus APBN, KPPN Sanggau memegang peran yang dinamis berkaitan dengan penyiapan/penyelesaian dokumen pelaksanaan anggaran, pengelolaan kas, sistem perbendaharaan maupun pertanggungjawaban pelaksanaan APBN.

Pencapaian kinerja KPPN Sanggau tahun 2023 telah sesuai dengan target yang ditetapkan di mana seluruh IKU telah mencapai target yang ditentukan. Kinerja KPPN Sanggau tahun 2023 yang dapat dinilai sebagai sebuah prestasi, antara lain:

a. Nilai Kinerja Organisasi yang diukur berdasarkan pengelolaan klinerja berbasis *balance scorecard* (BSC) mencapai 113.68 dari total 18 IKU;

b. Di samping itu, terdapat beberapa penghargaan yang diraih KPPN Sanggau pada tahun 2023.

Meksipun realisasi seluruh IKU telah mencapai targetnya, KPPN Sanggau secara berkelanjutan berusaha mengatasi segala permasalahan yang terdapat pada pencapaian setiap IKU untuk terus meningkatkan kinerja secara optimal.

Dengan disusunnya LAKIN ini diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan baik kepada pimpinan Direktorat Jenderal Perbendaharaan maupun seluruh pihak yang terkait dengan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan untuk seluruh jajaran KPPN Sanggau dapat menjadi umpan balik guna peningkatan kinerja pada periode mendatang.